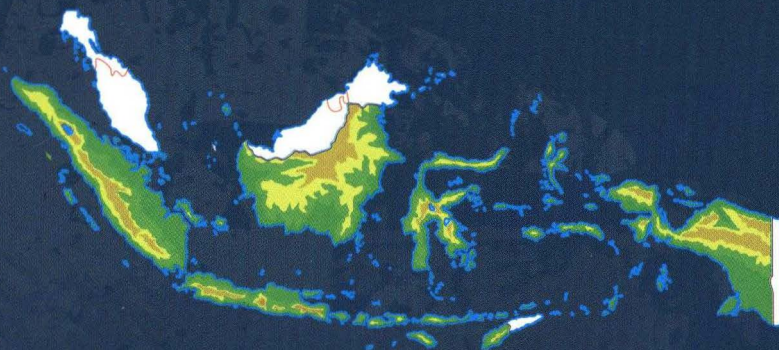


Bahasa Indonesia

Pemakai dan Pemakaiannya



Hasan Alwi



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2011



PERPUSTAKAAN
BADAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Bahasa Indonesia

Pemakai dan Pemakaiannya

Hasan Alwi

HADIAH

BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
2011

Penyunting Penyelia
Alma Evita Almanar

Penyunting

Pewajah Kulit
Gerdi W.K.

**PROYEK PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH-JAKARTA
TAHUN 2000**

Utjen Djusen Ranabrata (Pemimpin), Tukiyar (Bendaharawan), Djamari
(Sekretaris), Suladi, Haryanto, Budiyo, Radiyo, Sutini (Staf)

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa seizin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

306-218

ALW
b

Alwi, Hasan,
Bahasa Indonesia: Pemakai dan
Pemakaiannya/Hasan Alwi—Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011.--
xiv + 170 hlm. 21 cm.

ISBN 979-685-125-3

1. Bahasa Indonesia-Pemakaian
I. Judul

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Dua belas tahun telah berlalu sejak dilaksanakannya Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1999. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan bahasa Indonesia sangat menggembirakan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan tersebut, antara lain, adalah tuntutan fungsional bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memosisikan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, dan bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, tetapi juga mengembangkan diri sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara semakin kukuh. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan pemakaian bahasa di Indonesia menjadi lebih teratur dan berkembang ke arah yang lebih positif.

Untuk menjadikan bahasa Indonesia seperti yang diharapkan itu, tentu saja diperlukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai politik bahasa dan perencanaan bahasa kita.

Penerbitan kembali buku *Bahasa Indonesia: Pemakai dan Pemakaiannya* ini merupakan salah satu upaya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang penanganan bahasa itu di samping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bacaan yang bermutu. Buku ini memuat tulisan yang dapat menambah dan memperluas wawasan para pembaca tentang bahasa Indonesia, terutama yang berkenaan dengan mutu dan tingkat keterampilan masyarakat pemakai serta cakupan ranah pemakainya.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Dr. Hasan Alwi yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan melalui karangan-karangan bernas dalam buku ini.

Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada tim penerbitan, yakni Drs. Prih Suharto, M.Hum., Lince Siagian, S.E., Drs. Hartono, Siti Darini, S.Sos., Drs. Muhammad Nurhanadi, Ciptodigiyarto, Warno, Edi Suyanto, dan Andri Supriyadi, S.E. yang telah bekerja keras hingga buku ini dapat terwujud dan sampai ke tangan pembaca.

Semoga penerbitan buku *Bahasa Indonesia: Pemakai dan Pemakaiannya* ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum.

Jakarta, Oktober 2011

Agus Dharma, Ph.D.

KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA

Setiap buku yang diterbitkan, tentang apa pun isinya, oleh penulis dan penerbitnya pasti diharapkan dapat dibaca oleh kalangan yang lebih luas. Pada sisi lain pembaca mengharapkan agar buku yang dibacanya itu dapat menambah wawasan dan pengetahuannya. Di luar konteks persekolahan, jenis wawasan dan pengetahuan yang ingin diperoleh dari kegiatan membaca buku itu berbeda antara pembaca yang satu dan pembaca yang lain, bahkan antara kelompok pembaca yang satu dan kelompok pembaca yang lain. Faktor pembeda itu erat kaitannya dengan minat yang sedikit atau banyak pasti berkorelasi dengan latar belakang pendidikan atau profesi dari setiap pembaca atau kelompok pembaca yang bersangkutan.

Penyediaan buku atau bahan bacaan yang bermutu yang diasumsikan dapat memenuhi tuntutan minat para pembaca itu merupakan salah satu upaya yang sangat bermakna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pengertian yang luas. Hal ini menyangkut masalah keberaksaraan yang cakupan pengertiannya tidak hanya merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis, tetapi juga menyangkut hal berikutnya yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana mengembangkan dan mengoptimalkan kemampuan tersebut agar wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan minat itu dapat secara terus-menerus ditingkatkan.

Dalam konteks masyarakat-bangsa, kelompok masyarakat yang tingkat keberaksaraannya tinggi memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu yang bertujuan mengentaskan kelompok masyarakat yang tingkat keberaksaraannya masih rendah. Hal itu berarti bahwa mereka yang sudah tergolong pakar, ilmuwan, atau cendekiawan berkewajiban "menularkan" wawasan dan pengetahuan yang dimilikinya kepada mereka yang masih tergolong orang awam. Salah satu upayanya yang patut dilakukan ialah melakukan penelitian yang hasilnya dipublikasikan dalam bentuk terbitan.

Dilihat dari isinya, buku yang dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan itu amat beragam dan menyangkut bidang ilmu tertentu. Salah satu di antaranya ialah bidang bahasa dan sastra termasuk peng-

ajarannya. Terhadap bidang ini masih harus ditambahkan keterangan agar diketahui apakah isi buku itu tentang bahasa/sastra Indonesia atau mengenai bahasa/sastra daerah.

Bidang bahasa dan sastra di Indonesia boleh dikatakan tergolong sebagai bidang ilmu yang peminatnya masih sangat sedikit dan terbatas, baik yang berkenaan dengan peneliti, penulis, maupun pembacanya. Oleh karena itu, setiap upaya sekecil apa pun yang bertujuan menerbitkan buku dalam bidang bahasa dan/atau sastra perlu memperoleh dorongan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan hal itu, buku *Bahasa Indonesia: Pemakai dan Pemakaiannya* ini patut kita sambut dengan hati yang lega disertai harapan bahwa ketujuh belas tulisan yang termuat di dalamnya dapat menambah dan memperluas wawasan para pembaca tentang bahasa persatuan dan bahasa negara kita, bahasa Indonesia, terutama yang berkenaan dengan mutu dan tingkat keterampilan masyarakat pemakai serta cakupan ranah pemakaiannya. Kepada Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta beserta seluruh staf, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukannya dalam menyiapkan naskah siap cetak untuk penerbitan buku ini.

Jakarta, Oktober 2000

Hasan Alwi

PRAKATA

Secara jujur harus diakui bahwa bahasa Indonesia di dalam pertumbuhan dan perkembangannya selama abad ke-20 telah memperlihatkan tingkat percepatan yang sekurang-kurangnya sangat membesarkan hati; sekadar untuk tidak mengatakan bahwa sebenarnya tingkat percepatan itu sangat mengagumkan. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu dapat ditelusuri dari dua peristiwa besar yang amat bersejarah dan sekaligus merupakan tonggak pernyataan politis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang antara lain menggambarkan tekad bangsa Indonesia untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalam Bab XV Pasal 36 menyatakan dan mengukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Ada sejumlah faktor yang telah mengakibatkan tingkat percepatan bahasa Indonesia itu begitu tinggi. Salah satu di antaranya ialah tuntutan fungsionalnya sebagai bahasa negara. Ia tidak hanya harus memposisikan dan memfungsikan dirinya sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, dan bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, tetapi juga ia harus memacu dan mengembangkan dirinya sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan sebagai sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek modern.

Hal yang disebut terakhir inilah yang menjadi komponen paling dominan sehingga pertumbuhan dan pertambahan kosakata dan peristilahan yang amat pesat, yang antara lain mengakibatkan jumlah lema atau entri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dari edisi yang satu ke edisi yang lain terus meningkat, terutama disebabkan oleh tuntutan agar bahasa Indonesia tetap menjadi sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai bidang ilmu mutakhir yang lazim disebut iptek modern itu. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan kebudayaan nasional, seperti telah disinggung di atas, juga turut berperan dalam proses pemercepatan tersebut: apalagi kontak budaya antarbangsa ini sejak awal peradaban

manusia telah sama-sama diakui dan diterima sebagai sesuatu yang dampaknya dapat dengan mudah diamati lewat sikap dan perilaku dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sikap dan perilaku berbahasanya.

Selain kelima fungsi yang telah disebutkan di atas, masih perlu disebutkan tiga fungsi lainnya yang diemban oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa media massa, pendukung sastra Indonesia, serta pemer kaya bahasa dan sastra daerah. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi, acapkali disebut-sebut sebagai pihak yang begitu besar pengaruhnya terhadap masyarakat pemakai bahasa sampai-sampai dapat mengalahkan peran lembaga pendidikan. Dengan perkataan lain, bahasa pers lebih berpengaruh daripada bahasa guru di sekolah dalam hal pembentukan sikap dan perilaku berbahasa murid khususnya dan generasi muda umumnya. Seberapa jauh pandangan seperti itu dapat dibenarkan, hal itu masih perlu dibuktikan lewat penelitian yang memadai dan komprehensif. Kalau secara khusus diperbandingkan pengaruh dari kedua jenis media massa itu, kecenderungannya ialah bahwa pengaruh media elektronik jauh lebih kuat daripada media cetak. Implikasi lebih jauh dari kecenderungan itu tampaknya mengarah kepada pembenaran terhadap kekhawatiran yang sering diungkapkan oleh berbagai kalangan yang cukup luas, yaitu bahwa minat baca masyarakat kita rendah sekali. Sebaliknya, minat menonton (televisi) mereka amat tinggi.

Perbandingan antara media cetak dan elektronik itu sengaja dikemukakan karena yang satu berhubungan dengan bahasa tulis dan yang lain dengan bahasa lisan. Bahasa tulis tidak terikat oleh ruang dan waktu sehingga kita diasumsikan selalu memiliki kesempatan untuk melihat kembali apa yang telah kita tuangkan untuk melakukan koreksi, penambahan, atau pengurangan. Adapun bahasa lisan sangat terikat oleh ruang dan waktu sehingga bahasa yang digunakan harus serba spontan, tidak boleh lama-lama berpikir karena akan sangat mengganggu kelancaran berkomunikasi. Atas dasar itu, dapatlah dikatakan atau diperkirakan bahwa bahasa tulis seharusnya lebih unggul daripada bahasa lisan dalam dua hal, yaitu dalam kerapian bahasanya dan dalam hal kecermatan penerapannya. Kalau perkiraan itu benar, maka masyarakat kita yang lebih suka

menonton televisi dan mendengarkan radio daripada membaca itu dapat dipastikan memperoleh pengaruh yang kuat dan dominan dari pemakaian bahasa lisan yang kerapian bahasa dan kecermatan penerapannya lebih rendah daripada pemakaian bahasa tulis. Akses pada pemakaian bahasa lisan yang demikian pasti akan berdampak pada sikap dan perilaku berbahasa mereka.

Peran bahasa Indonesia sebagai pendukung sastra Indonesia sesungguhnya harus dipandang sebagai *conditio sine qua non*. Fungsi ini sepintas lalu seperti bertumpang tindih dengan fungsi yang telah dikemukakan, yakni sebagai sarana pengembangan kebudayaan nasional. Adalah benar bahwa sastra merupakan bagian dari kebudayaan. Namun, dilihat dari begitu eratny hubungan antara bahasa dan sastra--sering diumpamakan bahwa keduanya ibarat dua sisi dari satu keping mata uang atau bahkan dikatakan bahwa sastra itu mahkota bahasa--, maka penyebutan secara khusus bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai pendukung sastra Indonesia sepatutnya dilihat dalam konteks pemahaman seperti itu.

Dalam hubungannya dengan bahasa daerah, ada pandangan yang selalu disebut-sebut, yaitu bahwa bahasa daerah berfungsi memperkaya bahasa Indonesia. Hal yang sebaliknya--bahwa bahasa Indonesia juga memperkaya bahasa daerah--tidak pernah diperkatakan. Jadi, pandangan yang berat sebelah itu sungguh sangat tidak realistis. Untuk konsep yang berkaitan erat dengan budaya Nusantara dan keetnikan, memang benar bahasa Indonesia menerima pengaruh dari dan diperkaya oleh bahasa daerah. Akan tetapi, untuk konsep yang berkenaan dengan iptek modern, dapat dipastikan bahwa bahasa daerah diperkaya oleh bahasa Indonesia karena konsep mengenai iptek modern dapat dipastikan berasal dari kebudayaan dan peradaban asing yang masuk ke Indonesia lewat bahasa asing, terutama lewat bahasa Inggris. Kontak bahasa yang terjadi bukanlah antara bahasa asing dan bahasa daerah, melainkan antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Pengaruh kontak dengan bahasa asing itu pada gilirannya diteruskan oleh bahasa Indonesia kepada bahasa daerah. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan dalam bahasa daerah seperti *radio*, *televisi*, *krisis moneter*, *industri*, *komputer*, dan *sinetron* tidaklah diambil alih secara langsung dari bahasa asingnya untuk kemudian disesuaikan dengan kaidah bahasa daerah yang bersangkutan, tetapi peng-

ambilalihan dan penyesuaian itu dilakukan oleh bahasa Indonesia. Itulah sebabnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemer kaya bahasa dan sekaligus sastra daerah.

Dengan mempertimbangkan apa yang tersurat dan tersirat dari paparan di atas, melalui berbagai tulisan dalam buku ini, seperti yang diisyaratkan di dalam judulnya, *Bahasa: Pemakai dan Pemakaiannya*, di-coba dikemukakan beberapa hal tentang bahasa Indonesia yang berhubungan dengan pemakai dan pemakaiannya. Masyarakat dalam arti luas merupakan pemakai bahasa Indonesia yang dilihat dari segi usia, latar belakang pendidikan, dan jenis pekerjaan, misalnya, menggambarkan keheterogenan bukan saja dalam hal penguasaan dan kemampuannya dalam berbahasa Indonesia, melainkan juga dalam hal sikap dan perilaku berbahasanya, seperti yang sedikit banyak telah disinggung di atas. Mengenai butir permasalahan ini, ada tiga tulisan yang dapat dirujuk, yaitu *Bahasa Indonesia dan Perilaku Berbahasa*, *Bahasa sebagai Jati Diri Bangsa*, dan *Menumbuhkan Sikap Berbahasa Indonesia dalam Pembentukan Jati Diri*. Sikap dan perilaku berbahasa, seperti telah disebutkan, tidak dapat dipisahkan dari peristiwa kontak bahasa khususnya dan kontak budaya umumnya. Kontak bahasa dalam konteks budaya yang demikian tidak akan pernah berhenti dan akan terus berlangsung dengan intensitas yang kadarnya akan makin meningkat. Fenomena ini lazim disebut dan dipahami sebagai era globalisasi. Tentu saja fenomena ini akan memberi dampak yang tidak menguntungkan jika ditinjau dari sudut pandang yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Untuk itu, tulisan dengan tajuk *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Menuju Era Globalisasi* diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran ke arah upaya-upaya yang perlu dipertimbangkan agar bahasa Indonesia tetap berfungsi sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara.

Tulisan dengan tajuk *Peningkatan Mutu SDM melalui Pembinaan Bahasa Indonesia* mengemukakan beberapa segi yang perlu diperhatikan agar mutu kemampuan dan penguasaan berbahasa masyarakat dapat ditingkatkan. Bagaimana bahasa Indonesia dalam bidang iptek dikemukakan dalam tulisan yang bertajuk *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek*. Selain kita menyadari betapa pentingnya dunia pendi-

dikan sebagai peletak dasar penguasaan bahasa Indonesia bagi para siswa melalui kegiatan belajar-mengajar, dan hal itu terlihat dalam tulisan dengan tajuk *Pengembangan Kurikulum Bahasa*, pihak yang tidak kalah penting dan strategisnya ialah media massa. Di atas sudah digambarkan bagaimana besarnya pengaruh media massa, terutama dalam upaya pembentukan sikap dan perilaku berbahasa masyarakat ke arah yang lebih positif. Dalam buku ini hal tersebut dapat disimak lebih lanjut melalui tajuk tulisan *Peran Media Massa dalam Pembinaan Bahasa Indonesia*.

Dilihat dari jumlah pemakainya di kawasan Nusantara yang sering dikatakan mencapai angka di atas atau melebihi 200 juta orang, bahasa Indonesia memiliki peluang untuk diupayakan menjadi salah satu bahasa internasional, apalagi dilihat dari bahasa Indonesianya itu sendiri sebagai salah satu sistem komunikasi verbal sering dikategorikan sebagai bahasa yang tidak terlalu banyak memiliki tingkat kesulitan morfosintaktis yang berarti sehingga, secara singkat, bahasa Indonesia tidaklah sulit untuk dipelajari sebagai bahasa asing. Tajuk tulisan dalam buku ini, *Perspektif dan Peluang Masa Depan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional*, mencoba menyiasati berbagai kemungkinan yang dapat diupayakan ke arah terciptanya peluang tersebut. Selain itu, bahasa Indonesia sudah lama diajarkan di berbagai perguruan tinggi di Eropa, Amerika, Australia, dan bahkan di beberapa negara Asia sendiri seperti halnya di Jepang. Sejak Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988, bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan topik yang senantiasa menarik untuk dibahas dalam berbagai pertemuan kebahasaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejalan dengan perkembangan tersebut, empat tulisan terakhir dalam buku ini secara khusus mengangkat masalah BIPA sebagai pokok bahasan.

Di samping beberapa tulisan yang sudah disebutkan di atas, yang pada dasarnya berkaitan dengan ihwal pemakai atau pemakaian bahasa Indonesia, empat tulisan pertama dalam buku ini tidak secara langsung berhubungan baik dengan pemakai maupun pemakaiannya. *Fungsi Politik Bahasa* jelas berkenaan dengan masalah kebijakan bahasa yang sangat diperlukan di Indonesia mengingat ruang lingkup permasalahannya yang cukup rumit dan kompleks karena ia tidak terlepas dari keterkaitannya dengan keberadaan ratusan bahasa daerah dan pemakaian bahasa asing,

terutama bahasa Inggris. Sementara itu, dua tulisan berikutnya, yaitu *Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Konteks Transformasi Budaya* dan *Peran Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Seni dan Budaya* merupakan sisi lain dari bahasa Indonesia yang juga sering dijadikan pokok bahasan dalam kaitannya dengan kebudayaan yang oleh sebagian orang diposisikan sebagai superordinatnya. Dalam menghadapi pandangan seperti itu, seyogianya kita kembali kepada salah satu fungsi bahasa Indonesia yang telah disebutkan, yaitu sebagai bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional. Yang terakhir ialah tulisan dengan tajuk *Penelitian Kebahasaan di Indonesia: Bagaimana Dasar Kebijakan Perencanaannya*. Tulisan ini dimunculkan karena penelitian berbagai aspek kebahasaan yang dilakukan oleh para peneliti di perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian lainnya tampaknya sangat tidak terkoordinasi, apalagi kalau dihubungkan dengan jumlah tenaga dan dana yang setakat ini masih sangat terbatas, cara seperti itu merupakan bentuk kemubaziran yang sebenarnya dapat diupayakan agar hal itu tidak terjadi atau sekurang-kurangnya tidak makin parah.

Jakarta, September 2000

Hasan Alwi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	iii
KATA PENGANTAR KEPALA PUSAT BAHASA	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xiii
1. Fungsi Politik Bahasa	1
2. Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	11
3. Peran Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Seni dan Budaya	19
4. Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan di Indonesia: Bagaimana Dasar Kebijakan Perencanaannya	26
5. Bahasa sebagai Jati Diri Bangsa	39
6. Menumbuhkan Sikap Berbahasa Indonesia	49
7. Bahasa Indonesia dan Perilaku Berbahasa	61
8. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Menuju Era Globalisasi	67
9. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia melalui Pembinaan Bahasa Indonesia	74
10. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek	87
11. Peran Media Massa dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	98
12. Pengembangan Kurikulum Bahasa	106
13. Perspektif dan Peluang Masa Depan	114
14. Pengajaran BIPA	123
15. Upaya Meningkatkan Pengajaran BIPA	132
16. BIPA: Hari Ini dan Esok	142
17. Pengajaran BIPA: Upaya Pengembangan	154
DAFTAR PUSTAKA	163

FUNGSI POLITIK BAHASA*

1. Masalah kebahasaan di Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat kompleks. Hal itu berkaitan erat dengan tiga aspek, yaitu yang menyangkut *bahasa*, *pemakai bahasa*, dan *pemakaian bahasa*. Aspek bahasa menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing (terutama bahasa Inggris). Aspek pemakai bahasa terutama berkaitan dengan mutu dan keterampilan berbahasa seseorang. Dalam perilaku berbahasa tidak saja terlihat mutu dan keterampilan berbahasa, tetapi juga sekaligus dapat diamati apa yang sering disebut sebagai *sikap* pemakai bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Adapun aspek pemakaian bahasa mengacu pada bidang-bidang kehidupan yang merupakan ranah pemakaian bahasa.

Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks itu perlu didasarkan pada *kehendak politik* yang mantap. Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai *bahasa persatuan* yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga negara, secara jelas merupakan *pernyataan politik* yang sangat mendasar dan strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 36 UUD 1945 berikut penjelasannya, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai *bahasa negara*, merupakan landasan konstitusional yang kokoh dan sekaligus sebagai pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasaan. Selain itu, berbagai macam rekomendasi yang disepakati dalam setiap kali penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia perlu dicatat sebagai gambaran keinginan yang kuat dari para pesertanya agar segala sesuatu yang menyangkut masalah kebahasaan di Indonesia ditangani melalui upaya *pembinaan* dan *pengembangan* bahasa yang lebih efektif dan efisien.

* Makalah Seminar Politik Bahasa, 9--12 November 1999, Hotel Puncak Raya, Cisarua, Bogor.

2. Kesimpulan, pendapat, dan usul Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan tahun 1975 di Jakarta telah memberikan gambaran yang komprehensif dan lengkap mengenai butir-butir pokok yang harus diperhatikan dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu meliputi ketiga aspek yang telah disebutkan di atas (bahasa, pemakai bahasa, dan pemakaian bahasa). Selain itu, secara khusus dikemukakan juga rumusan tentang *kedudukan* dan *fungsi* yang merupakan kerangka dasar dalam *perencanaan bahasa*.

Kerangka dasar yang mantap akan menjadi sumber acuan bagi upaya pengembangan korpus bahasa dan pengidentifikasian ranah pemakaian bahasa. Kedua hal itu pada gilirannya dapat dijadikan semacam tolok ukur untuk mengetahui mutu dan keterampilan berbahasa seseorang, termasuk sikap bahasa yang bersangkutan. Sementara itu, rumusan hasil Seminar juga memberikan perhatian khusus pada *pengembangan pengajaran* dan *bahasa pengantar*. Keduanya masih merupakan bagian dari aspek pemakaian bahasa yang perlu memperoleh porsi perhatian yang sungguh-sungguh.

Seperti yang dirumuskan Seminar, "pengembangan pengajaran ialah usaha-usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada pengembangan pengajaran bahasa agar dapat dicapai tujuan pengajaran bahasa itu sendiri, yaitu agar penutur bahasa itu memiliki keterampilan berbahasa, pengetahuan yang baik tentang bahasa itu, dan sikap positif terhadap bahasa itu, termasuk hasil sastranya." Mengenai bahasa pengantar disebutkan bahwa yang dimaksudkan ialah "bahasa resmi yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di lembaga-lembaga pendidikan."

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia". Dalam undang-undang itu juga dirumuskan ihwal bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam tahap awal pendidikan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu, bahasa daerah atau bahasa asing juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

3. Seperti sudah disebutkan, hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 memuat rumusan dengan tiga macam tajuk, yaitu *kesimpulan*, *pendapat*, dan *usul*. Rumusan kesimpulan diawali dengan paparan tentang pengertian dasar mengenai *kebijaksanaan nasional*, *bahasa nasional*, *bahasa daerah*, dan *bahasa asing*. Kebijakan nasional dirumuskannya sebagai politik bahasa nasional "yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan." Ditambahkan bahwa penanganan masalah kebahasaan itu perlu diupayakan secara berencana, terarah, dan menyeluruh. Selanjutnya, berturut-turut disajikan rumusan tentang *kedudukan dan fungsi*, *pembinaan dan pengembangan*, *pengembangan pengajaran*, dan *bahasa pengantar* yang semuanya dikaitkan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Perlu ditambahkan bahwa dalam rumusan tersebut bahasa asing hanya dikemukakan sehubungan dengan pemakaian dan pemanfaatannya di Indonesia yang bersama-sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjalin masalah kebahasaan di Indonesia yang perlu ditangani secara berencana, terarah, dan menyeluruh dalam suatu kebijaksanaan nasional seperti yang telah disebutkan di atas.

Rumusan yang bertajuk *pendapat* berisi delapan butir yang secara umum menyangkut pengajaran, ketenagaan, dan sarana. Salah satu butir yang amat penting ialah dikemukannya pandangan bahwa Politik Bahasa Nasional merupakan penjabaran terhadap Penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Pandangan tersebut sudah tepat, tetapi hal itu dalam seminar ini masih perlu dimantapkan lagi, terutama mengingat adanya tuntutan dan tantangan baru yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama 24 tahun terakhir.

Tiga butir rumusan yang bertajuk *usul* masing-masing menyangkut *pengindonesiaan* nama-nama asing, *penerjemahan*, dan *pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku* dalam situasi yang menuntut digunakannya ragam bahasa baku tersebut. Pemberian sanksi ini tampaknya dihadapkan pada berbagai kendala sehingga usul ini masih belum mungkin dapat dilaksanakan. Apalagi dalam suasana dan semangat gerakan reformasi yang masih tetap ber-

gelora seperti sekarang ini, usul tersebut akan dirasakan sangat tidak populer dan pasti memiliki tingkat kesensitifan yang tinggi sehingga hal itu diperkirakan akan menyudutkan posisi Pemerintah pada umumnya dan posisi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada khususnya.

Usul agar kegiatan *penerjemahan* dilaksanakan secara berencana telah diupayakan melalui berbagai cara. Akan tetapi, hasilnya masih amat jauh dari yang diharapkan. Dalam berbagai pertemuan yang secara khusus membahas masalah penerjemahan, persoalan yang sama selalu kembali, yaitu bahwa imbalan yang dapat diberikan kepada penerjemah masih belum sesuai. Akibatnya, sampai saat ini penerjemahan masih merupakan lahan kegiatan yang kering dan tidak menarik. Kita menyadari bahwa penerjemahan itu sangat penting. Masalahnya ialah bahwa hal itu tidak sepenuhnya bergantung pada tersedianya tenaga penerjemah yang bermutu. Perlu dipertimbangkan sejumlah faktor penunjang, antara lain masalah imbalan seperti yang baru saja dikemukakan dan--ini sangat penting dan menentukan--adanya niat atau bahkan tekad yang mantap dari Pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain untuk secara bersungguh-sungguh menangani masalah penerjemahan ini.

Sehubungan dengan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu, masih ada tiga hal lagi yang perlu memperoleh catatan tersendiri, yaitu dua hal yang menyangkut upaya pembinaan dan pengembangan serta satu hal yang berkenaan dengan pengembangan pengajaran. Catatan tentang ketiga hal itu adalah sebagai berikut.

- a. Upaya *pembakuan bahasa Indonesia ragam lisan* patut memperoleh perhatian yang berimbang dengan pembakuan bahasa Indonesia ragam tulis. Untuk itu, saatnya sudah tiba karena kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi informasi telah memberikan kemungkinan yang amat luas bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk lebih mudah mengakses pada penggunaan bahasa lisan dibandingkan dengan bahasa tulis. Dalam bidang media massa, misalnya, masyarakat lebih mudah mendengarkan radio dan/atau "menonton" televisi daripada membaca surat kabar dan/atau majalah. Untuk keperluan itu, apa yang

telah dirumuskan Seminar, yakni diperlukannya pembakuan lafal sebagai pegangan bagi para guru, penyiar radio/televisi, dan masyarakat umum, perlu benar-benar dilaksanakan karena sampai saat ini upaya pembakuan tersebut belum memperoleh perhatian dan upaya penanganan yang memadai. Yang telah dilakukan sangat bersifat sporadis karena masalah lafal ini hanya disinggung pada saat siaran Pembinaan Bahasa Indonesia lewat radio/televisi itu sekadar dikomentari dalam kegiatan penyuluhan bahasa.

- b. Pelbagai *ragam dan gaya bahasa* seperti yang digunakan dalam perundang-undangan, administrasi pemerintahan, dan sarana komunikasi massa memang sudah diteliti. Namun, upaya penelitian itu bukan saja belum tuntas dan belum meliputi seluruh bidang pemakaian bahasa, melainkan juga belum dikodifikasikan. Masalah ini perlu segera ditangani sebagaimana mestinya dan memperoleh prioritas yang sama dengan pembakuan lafal.
 - c. Penelitian *pengajaran bahasa*, baik yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, perlu benar-benar dilaksanakan secara lebih berencana dan lebih terarah agar mutu dan keterampilan siswa dalam berbahasa secara lisan ataupun tertulis dapat ditingkatkan. Dalam berbagai pertemuan masih sering dilontarkan keluhan dan keprihatinan tentang penguasaan bahasa yang masih rendah di kalangan siswa.
4. Dengan beberapa catatan di atas, secara keseluruhan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 masih tetap relevan karena butir-butir rumusannya sudah tepat menggambarkan hal-hal mendasar dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Yang masih perlu diupayakan lebih banyak berkaitan dengan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa. Selain itu, rumusan tentang bahasa tertentu yang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia perlu disesuaikan. Tanpa harus menghubungkannya dengan tuntutan keterbukaan dan transparansi yang menjadi ciri era reformasi--lazimnya masalah ini dikaitkan dengan bidang politik, hukum, dan ekonomi--atau juga tanpa harus menyiasatnya

dari keniscayaan global abad ke-21, bahasa Cina (juga bahasa Arab?) perlu diposisikan secara lebih cermat, apakah bahasa yang juga digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia itu akan tetap kita golongkan sebagai bahasa asing atau sebagai salah satu bahasa daerah karena para penuturnya, seperti sudah disebutkan, merupakan salah satu di antara sejumlah kelompok etnis yang sama-sama membangun masyarakat bangsa Indonesia. Kemungkinan perubahan tentang "status" itu akan berakibat pada adanya "pergeseran" tentang kedudukan dan fungsi dari bahasa tersebut.

Penjelasan Pasal 36 UUD 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara, akan memperoleh dorongan dan tenaga baru dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Selama ini upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, termasuk pengajarannya, dilakukan oleh Balai Bahasa yang sampai akhir tahun lalu (1998) hanya terdapat di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang. Pada tahun ini unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Bahasa itu bertambah 14 buah lagi, yaitu di Surabaya, Semarang, Bandung, Padang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Palu, Manado, dan Jayapura. Bersama-sama dengan Balai Bahasa dan Proyek Pembinaan Bahasa yang ada di hampir semua provinsi, pemerintah daerah (tingkat I dan II) dapat menangani masalah kebahasaan dan kesastraan secara lebih terkoordinasi. Perlu ditambahkan bahwa sudah ada kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Pusat Bahasa dan Pemda Tingkat I seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pemyarakatan bahasa Indonesia di daerahnya masing-masing dan, sebagai akibat dari Undang-Undang tentang Otonomi Daerah itu, cakupan tugas itu dapat dan harus diperluas dengan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa dan sastra daerah berikut pengajarannya.

Dalam rumusan tentang pengembangan pengajaran bahasa Indonesia, secara singkat disinggung perlunya menyiapkan program khusus pengajaran bahasa Indonesia, antara lain untuk orang asing. Sejak tahun 80-an telah berlangsung berbagai pertemuan di dalam

dan di luar negeri yang secara khusus membicarakan pengajaran *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)*. Kalau diperhatikan dari segi peserta yang menghadiri pertemuan itu, patut dicatat bahwa forum seperti itu ternyata mendapat perhatian yang cukup luas dan menggembirakan, terutama dari para pengajar BIPA di luar negeri. Oleh karena itu, pada tempatnyalah kalau seminar ini memberikan perhatian khusus pada masalah pengajaran BIPA dengan merumuskannya secara lebih tegas dan lebih eksplisit.

Masalah kelembagaan yang dikaitkan dengan penanganan masalah kebahasaan di Indonesia, baik yang berupa instansi Pemerintah maupun institusi lainnya (termasuk lembaga swasta), juga perlu memperoleh porsi pembahasan yang memadai dalam seminar ini. Sejauh yang menyangkut keberadaan Pusat Bahasa berikut UPT-nya, momentum perubahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan semacam revisi dan menyampaikan usul perubahan terhadap struktur instansi Pemerintah ini berikut cakupan tugas dan wewenangnya. Tanpa hal itu, tampaknya instansi ini akan tetap menghadapi kendala birokratis di dalam melaksanakan misi yang dipercayakan kepadanya.

5. Dengan kedudukannya sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan sebagai bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945), bahasa Indonesia harus berperan dan memenuhi fungsinya sebagai *sarana komunikasi dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa*. Politik bahasa di Indonesia harus jelas menggambarkan kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan dengan tujuan mencerdasan kehidupan bangsa dalam arti yang luas. Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, kebijaksanaan nasional kebahasaan yang perlu dirumuskan secara berencana, terarah, dan menyeluruh itu harus menggambarkan rambu-rambu yang jelas mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai *wahana modernisasi kebudayaan*, khususnya sebagai *alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Oleh karena itu, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa boleh dikatakan sepenuhnya bergantung pada peran bahasa Indonesia dalam memenuhi fungsi atau tuntutan ini.

Kebiasaan sebagian masyarakat kita dalam berbahasa, seperti yang terlihat pada kecenderungan generasi (cendekiawan) muda yang menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris, belum dapat dikategorikan sebagai gejala yang membahayakan semangat persatuan bangsa. Dilihat dari sifat hubungan informal dan akrab, gejala ke-bahasaan yang demikian lazim terjadi dalam masyarakat dwibahasa dan dalam kasus tertentu bahkan mungkin dapat dipandang sebagai kreativitas ekspresif kelompok masyarakat yang bersangkutan. Namun, apabila pemakaian bahasa campuran itu lebih cenderung mencerminkan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam berbahasa, gejala itu merupakan kecerobohan. Gejala "kebudayaan santai" tersebut juga bersumber pada kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pengembangan masyarakat Indonesia secara umum, termasuk dalam konteks pembangunan bangsa. "Kebudayaan santai" itu bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan merupakan pola hidup yang lebih berorientasi pada kebudayaan asing. Kendurnya semangat nasional pada sementara kalangan masyarakat itu pada hakikatnya merupakan masalah politik. Akan tetapi, hal itu tercerminkan dalam perilaku berbahasa.

Kalau pemakaian bahasa campuran itu bukan karena kecerobohan, melainkan karena kurangnya penguasaan bahasa Indonesia--seperti halnya yang diperlihatkan oleh sebagian besar dari mereka yang telah memperoleh seluruh pendidikannya dalam bahasa Indonesia, tetapi penguasaan bahasa Indonesiannya secara lisan apalagi tertulis masih jauh di bawah mutu yang seharusnya--, kalau tetap dibiarkan, hal itu dapat menjadi tendensi regresif dalam peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, politik bahasa harus mencakupi sejumlah aspek yang memungkinkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan.

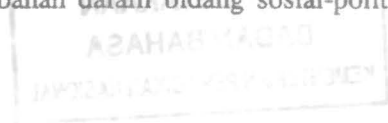
Selain sebagai *wahana modernisasi kebudayaan* dan sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam politik bahasa harus pula berfungsi sebagai *wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat*. Sejak awal pertumbuhannya, bahasa Indonesia disepakati pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 karena cirinya sebagai bahasa yang demokratis, yang tidak mencerminkan

status stratifikasi sosial pemakainya. Itulah sebabnya bahasa Indonesia dapat diterima dan dengan mudah dipelajari oleh generasi muda bangsa dari seluruh kelompok etnik.

Egalitarianisme yang dimiliki bahasa Indonesia itu merupakan jawaban yang tepat atas keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan (sebelum kemerdekaan) dan untuk menikmati kehidupan yang lebih demokratis (setelah kemerdekaan). Dalam perkembangannya kemudian, bahasa Indonesia memperlihatkan pertumbuhan ke arah terciptanya *bahasa tinggi* dan *bahasa rendah*, terutama dalam komunikasi lisan. Pemakaian kata dan ungkapan tertentu dalam jumlah yang makin lama makin besar, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, mencerminkan bangkitnya kembali sikap dan jiwa feodal atau neofeodal dalam strata masyarakat dan kebudayaan kita.

Gejala itu memperlihatkan eratnya hubungan antara perkembangan bahasa Indonesia dan perkembangan masyarakat pemakaiannya, sesuai dengan aspirasi sosial-politik dan sosial-budaya yang melatarbelakanginya. Dalam batas-batas tertentu, hal itu dapat berdampak positif terhadap upaya pengembangan daya ungkap bahasa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya selama ini yang menggejala ialah *kerancuan semantik* yang lebih luas dan lebih dominan daripada berkembangnya daya ungkap tersebut. Selama kerancuan semantik ini masih melekat dalam perilaku berbahasa kelompok masyarakat tertentu, maka selama itu pula kerancuan semantik itu akan menjadi penghalang bagi masyarakat luas untuk menggunakan bahasa Indonesia secara lebih bebas dan lebih leluasa. Oleh karena itu, membebaskan bahasa Indonesia dari pengaruh neofeodal seperti itu dan mengembalikan ciri demokratis dan egalitarianisme yang dimilikinya merupakan kewajiban semua pihak yang harus terintegrasi dalam rumusan politik bahasa.

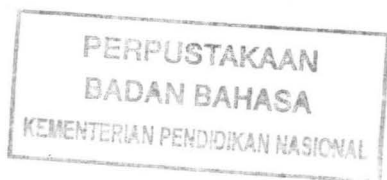
6. Sehubungan dengan beberapa butir pandangan di atas, seminar ini diselenggarakan dengan tujuan meninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Selama 24 tahun telah terjadi berbagai perubahan dalam bidang sosial-politik dan sosial-bu-



daya, baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap situasi dan kehidupan kebahasaan di Indonesia. Empat pokok bahasan dalam seminar ini diharapkan dapat menjaring dan mengidentifikasi perubahan-perubahan tersebut sebagai bahan masukan dan sekaligus bahan pertimbangan bagi para peserta Seminar dalam meninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 itu.

Keempat pokok bahasan itu masing-masing berkaitan dengan (1) kedudukan dan fungsi bahasa, (2) mutu dan peran bahasa, (3) mutu pemakaian bahasa, dan (4) kelembagaan. Kedudukan dan fungsi bahasa disoroti dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, sastra Indonesia dan daerah, dan bahasa asing. Adapun topik tentang penelitian bahasa, penelitian sastra, penelitian pengajaran bahasa dan sastra, serta penyusunan sarana uji kemahiran berbahasa tercakup dalam pokok bahasan tentang mutu dan peran bahasa. Sementara itu, masalah mutu pemakaian bahasa akan dipaparkan melalui tiga topik, yaitu peningkatan mutu pengajaran bahasa, peningkatan mutu pengajaran sastra, dan peningkatan pemyarakatan bahasa dan sastra. Akhirnya, hal yang berkenaan dengan masalah kelembagaan secara khusus akan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi lembaga kebahasaan.

Melalui pemaparan dan pembahasan keempat pokok bahasan itu, seminar ini diharapkan dapat menyusun dan merumuskan suatu politik bahasa yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam menangani berbagai masalah kebahasaan yang aktual di Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi pada abad ke-21, rumusan tentang kedudukan dan fungsi bahasa perlu benar-benar lebih dimantapkan dalam seminar ini. Selain itu, masalah kelembagaan perlu ditata kembali sesuai dengan tuntutan perubahan yang timbul di dalam masyarakat sehingga mekanisme kelembagaan tersebut mencerminkan rambu-rambu yang jelas dalam mengelola setiap upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia.



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DALAM KONTEKS TRANSFORMASI BUDAYA*

Bahasa dan pembangunan bangsa (*nation building*) merupakan dua hal yang kesalingterkaitannya antara yang satu dengan yang lain sangat erat. Seberapa jauh tingkat dan intensitas kesalingterkaitan itu berbanding se-jajar dengan besarnya sumbangan yang diberikan bahasa terhadap pem-bangunan bangsa itu sendiri. Dengan perkataan lain, kesalingterkaitan itu diwarnai oleh peran yang dimainkan oleh bahasa dalam pembinaan ke-jatidirian dan sistem nilai yang bercorak nasional. Peran bahasa dalam pembinaan kejatidirian dan sistem nilai yang bercorak kebangsaan ini akan dengan sendirinya tercerminkan melalui kekuatan atau daya rekat yang dimiliki bahasa untuk mempersatukan berbagai kelompok masya-rakat yang latar belakang etnis, budaya, dan bahasanya berbeda-beda menjadi kesatuan masyarakat yang lebih besar yang disebut bangsa.

Interaksi antara bahasa pada satu pihak dan gerak serta laju pem-bangunan bangsa pada pihak lain dengan demikian harus memperlihatkan porsi yang seimbang. Kalau tidak, terutama kalau bahasa tidak dapat me-laksanakan fungsinya dengan baik sebagai alat komunikasi masyarakat bangsa yang tengah membangun dirinya agar bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kelompok masyarakat bangsa yang lain, maka benteng pertahanan kebangsaan dalam bentuk identitas dan sistem nilai itu makin lama akan makin rapuh. Hal itu berarti pula bahwa bahasa makin lama akan makin kehilangan kekuatan dan daya rekatnya sebagai alat pemersatu. Oleh karena itu, dalam menentukan dasar dan arah ke-bijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa, faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi laju dan gerak pembangunan bangsa harus benar-benar dipertimbangkan.

* Makalah Seminar Bahasa dan Sastra dalam rangka Sidang Ke-32 Mabbim, Cisarua, 8--12 Februari 1993

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dominan di luar kebahasaan itu, penetapan dasar dan arah kebijakan bahasa tidak semata-mata didasarkan pada eksistensi bahasa sebagai sistem fonologis, gramatikal, atau semantis saja. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan dasar dan arah kebijakan bahasa itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-kebahasaan. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat dikaitkan dengan masalah politik, pendidikan, atau kebudayaan.

Dasar dan arah kebijakan bahasa itu dapat pula diacu sebagai garis kebijakan bahasa. Pada hakikatnya, penetapan garis kebijakan bahasa bersangkutan paut dengan penentuan fungsi kemasyarakatan berbagai jenis bahasa dalam masyarakat yang didasarkan pada praanggapan bahwa tidak ada masyarakat modern yang betul-betul bersifat monolingual. Penetapan fungsi itu haruslah sedemikian rupa sehingga pertanyaan tentang maksud atau tujuan yang berkenaan dengan pemakaian bahasa tertentu yang harus atau akan digunakan sebagai alat perhubungan warga masyarakat yang bersangkutan dapat dengan mudah dijawab. Pemakaian bahasa tertentu sebagai alat perhubungan oleh warga masyarakat menyiratkan pengertian tentang warga masyarakat yang multilingual atau sekurang-kurangnya bilingual, seperti halnya warga masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia dapat dibedakan tiga golongan bahasa menurut kedudukannya, yakni menurut tempatnya berdasarkan nilai sosial budaya yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Ketiga golongan bahasa itu ialah (1) bahasa kebangsaan, (2) bahasa daerah, dan (3) bahasa asing. Kedudukan bahasa kebangsaan ditempati oleh bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Nama yang diberikan kepada bahasa itu, yakni bahasa persatuan, bertalian erat dengan cita-cita pembinaan kepribadian sosial budaya masyarakat bangsa yang harus diupayakan dapat mengatasi kepribadian kelompok. Kedudukan bahasa daerah dimiliki oleh beratus-ratus bahasa daerah di kepulauan Indonesia yang jumlah penuturnya berkisar antara beberapa ratus orang saja (misalnya di Irian Jaya) dan tujuh puluh juta orang (bahasa Jawa)². Kedudukan bahasa asing terlihat pada sejumlah bahasa asing yang dipakai dan/atau dipelajari di dalam lingkungan budaya Indonesia. Berbeda dari bahasa daerah yang merupakan unsur kebudayaan Indonesia, bahasa-bahasa asing ini, meskipun dipakai atau di-

pelajari, tidaklah dianggap sebagai unsur kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan fungsi kemasyarakatannya, ketiga golongan bahasa itu dipakai sebagai (1) bahasa resmi, (2) bahasa untuk hubungan luas, (3) bahasa dalam sistem pendidikan, dan (4) bahasa dalam bidang seni, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia menjalankan fungsi bahasa resmi kenegaraan (UUD 1945, Pasal 36). Hal itu berarti bahwa di dalam segala urusan negara yang resmi, seperti di dalam tata usahanya, peradilanannya, dan penyelenggaraan politiknya, akan dipakai bahasa Indonesia. Di samping itu, dapat dicatat bahwa di dalam berbagai upacara adat, bahasa daerah juga berfungsi sebagai bahasa resmi kedaerahan. Artinya, bahasa daerah dipakai di muka umum pada kesempatan seperti itu.

Bahasa Indonesia juga menjalankan fungsi bahasa untuk hubungan luas dalam komunikasi antardaerah dan antarbudaya Indonesia. Fungsi itu juga dijalankan oleh sejumlah bahasa asing yang dipakai di Indonesia untuk hubungan antarbangsa dan untuk penyebarluasan ilmu dan teknologi modern. Dapat juga dikatakan bahwa bahasa Indonesia dalam fungsi itu menjadi alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan.

Bahasa Indonesia selanjutnya berfungsi sebagai bahasa di dalam sistem pendidikan formal. Fungsi kemasyarakatan yang ketiga ini berkaitan dengan garis kebijakan dalam penentuan bahasa sebagai bahasa pengantar dan/atau sebagai mata pelajaran atau objek studi. Di dalam situasi keanekaragaman di Indonesia, pendidikan formal berhadapan dengan tiga masalah kebahasaan, yakni (1) bagaimana orang harus mempelajari bahasa kebangsaannya demi perpaduan nasional di antara warga negara, dan demi pemerataan kesempatan bekerja yang diciptakan oleh pembangunan nasional dan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang mampu berbahasa Indonesia; (2) bagaimana orang dapat memahami bahasa ibunya, atau bahasa bapaknya, jika ia bukan penutur asli bahasa nasional sehingga ia dapat menghayati, menginternalkan, dan melestarikan warisan budaya kelompok etnisnya; dan (3) bagaimana orang dapat mempelajari jenis bahasa asing yang akan membukakan gerbang baginya ke dunia ilmu dan teknologi modern, ke dunia keagamaan yang supranasional, dan ke peradaban dunia yang makin merata.

Fungsi bahasa dalam bidang kesenian secara bersama-sama dipikul

oleh bahasa Indonesia dan pelbagai bahasa daerah Nusantara. Dapat dicontohkan bahwa cabang seni yang diungkapkan lewat bahasa ialah seni vokal, seni sastra (prosa, puisi, dan drama), dan seni pertunjukan seperti film dan wayang. Seni yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai medium ini diciptakan oleh penyair, pengarang, dan pengubah drama yang latar sosial budayanya bertumpu pada budaya etnis dan daerahnya yang beragam-ragam.

Fungsi bahasa dalam bidang ilmu dan teknologi terutama diisi oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tentu saja ada beberapa bahasa asing lain, seperti bahasa Belanda, Jepang, Arab, Perancis, dan Jerman yang juga berperan pada skala yang lebih terbatas. Bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi yang disebutkan terakhir ini karena bahasa Indonesia memiliki ragam tulis yang dapat dipakai untuk merekam penelitian dan menjabarkan ilmu, serta untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam pelbagai jenisnya. Sebenarnya ada hubungan timbal balik antara kemajuan ilmu dan kemampuan berbahasa yang harus merekam kemajuan itu, menguraikannya, dan kemudian menyampaikannya kepada kalangan yang lebih luas. Masyarakat yang tidak mampu merangsang pengembangan ilmu dan teknologi tidak dapat berharap memiliki bahasa keilmuan dan keteknologian. Sebaliknya, ketiadaan bahasa keilmuan dan keteknologian akan menghambat usaha penyemaian dan pembinaan generasi ilmuwan dan pakar teknologi yang berkesinambungan.

Usaha pengembangan bahasa nasional bertolak dari kenyataan bahwa bahasa itu harus meningkatkan fungsi kemasyarakatan yang sebelumnya kurang berkembang. Sebagai akibat dari kegiatan masyarakat Indonesia yang tengah membangun dan mengembangkan penyelenggaraan tata usaha kenegaraannya di berbagai bidang, timbul keperluan baru pada diri anggota masyarakatnya untuk dapat berbicara dan menulis tentang apa saja yang mungkin dipikirkan dalam proses transformasi budaya. Jalinan antara pengembangan kebudayaan dan pengembangan bahasa nasional menjadi lebih jelas pada waktu berlangsungnya perubahan masyarakat, yang antara lain disebabkan oleh arus migrasi, urbanisasi, dan modernisasi, yang masing-masing dapat menghasilkan fungsi kemasyarakatan bahasa yang baru atau yang lebih berkembang.

Usaha pengembangan bahasa nasional, dan sampai taraf tertentu pengembangan bahasa daerah tertentu juga, memperlihatkan tiga aspek yang berkorelasi dengan tolok ukur pembangunan nasional. Taraf keberaksaraan fungsional (*functional literacy*) penduduk berjalan seiring dengan peningkatan keberaksaraan orang dalam bahasa nasional dan bahasa daerah. Pembakuan atau standardisasi di bidang industri dan perdagangan mensyaratkan pembakuan atau standardisasi bahasa. Selanjutnya, pemodernan dan peningkatan keefisienan dan keefektifan aparatur pemerintah dan dunia swasta memerlukan keperluan akan pemodernan bahasa.

Keberaksaraan fungsional, terutama dalam bahasa nasional, bertujuan mengukuhkan kohesi nasional di antara warga masyarakat; menjembatani kesenjangan antara orang tua yang monolingual dan anaknya yang bilingual (bahkan mungkin multilingual); dan membuka pintu gerbang ke pasaran kerja yang sering hanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang mampu membaca dan menulis bahasa Indonesia.

Usaha pembakuan bahasa nasional berhadapan dengan dua ragam pokok bahasa yang dipakai secara berdampingan untuk fungsi sosial yang berbeda-beda. Ada ragam pokok yang terutama diperoleh penuturnya lewat pendidikan formal yang menginternalkan norma dan kaidah bahasa. Selain itu ada ragam pokok yang diperoleh penuturnya lewat proses sosialisasi dengan bantuan orang tua dan teman sebaya. Yang pertama dapat disebut ragam pokok pendidikan dan yang kedua ragam pokok sehari-hari. Ragam pokok "pendidikan" digunakan, misalnya, dalam pidato resmi, khotbah, kuliah atau ceramah; dalam siaran media massa cetak dan elektronik, dalam komunikasi di bidang pendidikan, ilmu, teknologi, dan kesusasteraan. Ragam pokok "sehari-hari" yang berkembang dalam berbagai rupa dialek dan sosiolek, biasanya dipakai dalam lingkungan keluarga, di pasar dalam tawar-menawar, di dalam kegiatan seni dan sastra rakyat, dan dalam pergaulan yang tidak resmi.

Pembakuan bahasa nasional terutama ditujukan pada ragam pokok "pendidikan"-nya, yakni di bidang ejaan, tata bahasa, dan kosa kata. Pilihan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa ragam itu dinilai lebih mampu mengungkapkan pikiran yang berbobot dan kompleks. Lagi pula, berkat sistem pendidikan nasional, proses pembakuan ragam itu dapat menghasilkan dengan lebih mudah penyeragaman norma dan kaidah

bahasa yang sekaligus memperikutkan kemantapan. Kemantapan itu diperlukan agar hasil pembakuan itu dapat berfungsi sebagai acuan atau model. Pembakuan seperti itu dapat digolongkan ke dalam upaya pemodernan bahasa.

Pemodernan bahasa bertujuan menjadikan bahasa itu memiliki taraf yang secara fungsional sederajat dengan bahasa lain di dunia yang lazim disebut bahasa modern yang sudah terkembang yang sudah mantap. Pemodernan itu akan memudahkan, antara lain, penerjemahan timbal balik di berbagai bidang, seperti industri, perniagaan, teknologi, dan pendidikan lanjut. Pemodernan itu bertalian baik dengan pemekaran kosa kata bahasa maupun dengan pengembangan berbagai langgam, gaya, dan bentuk wacana. Pemodernan bahasa itu dengan demikian tidak dapat mengabaikan aspek pencendekiaan bahasa, mengingat tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni dalam rangka usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pokok kedua dalam makalah ini, yaitu pembinaan bahasa, berkenaan dengan usaha pencermatan pemakaian bahasa. Yang menjadi sasaran bukan lagi kerumpangan dalam sistem bahasa, melainkan kerumpangan dalam perilaku kebahasaan para penuturnya. Yang diperhatikan bukan saja pengetahuan tentang kaidah bahasa, melainkan kemampuan berkomunikasi dalam pelbagai situasi. Ada sejumlah perintang yang dapat menghambat kelancaran pembinaan bahasa itu. Dapat disebut di antaranya, keanekabahasaan yang disertai taraf kebutuhurufan yang tinggi; kelangkaan penutur atau penulis tolok atau model yang dapat dicontoh; adanya bahasa asing yang nilai pasarnya lebih tinggi dan karena itu bergengsi sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat; serta ketiadaan pe-rangsang dan sistem ganjaran atau imbalan yang dapat meningkatkan motivasi penutur untuk mencapai kemahiran berbahasa yang tinggi.

Keberhasilan pembinaan pemakaian bahasa sebenarnya sering bergantung pada tersedia dan terjangkauunya sumber acuan yang dianjurkan sebagai tolok ukur. Di samping produksi berbagai sumber acuan itu, yang juga sangat penting ialah penyampaiannya ke berbagai kelompok sasaran lewat pasar buku dan penyuluhan. Produksi istilah, misalnya, yang tidak disertai sarana penerbitan dan penyebarluasannya, akan tetap tinggal sebagai harta karun. Jika para ilmuwan diharapkan menggunakan

istilah yang sudah dibakukan dengan taat asas, maka harus diciptakan saluran komunikasi yang dapat menjamin terciptanya arus balik yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengembangan bahasa. Tidak dapat disangkal bahwa yang penting dalam pembinaan bahasa yang berkenaan dengan kosa kata ilmiah ialah masuknya istilah itu ke dalam buku ajar, makalah para ahli, atau diskusi profesional.

Yang perlu diusahakan segera, di dalam rangka pembinaan bahasa, ialah penerbitan dan pemasaran daftar istilah dan kamus bidang ilmu yang ditujukan ke berbagai kelompok sasaran, seperti perguruan tinggi, kalangan profesi, dunia industri dan perniagaan. Di samping itu, perlu dipasarkan berbagai buku panduan yang memperkenalkan jenis langgam dan wacana yang tingkat keterpakaiannya sangat tinggi, seperti format dan bahasa surat, bahasa yang digunakan dalam skripsi dan makalah, serta pemakaian bahasa dalam laporan dinas dan laporan penelitian.

Dunia pendidikan dan kalangan media massa merupakan dua saluran komunikasi yang terpenting bagi penyebaran hasil pengembangan bahasa, khususnya hasil pembakuan serta kodifikasi. Untuk tujuan itu, hubungan kelembagaan antara badan pengembang dan pembina bahasa di satu pihak dan dunia pendidikan serta kalangan media massa pada pihak lain perlu ditingkatkan.

Pembinaan bahasa mungkin berkisar pada dua jenis kegiatan yang bersinggungan dan yang saling mempengaruhi dalam hal keberhasilannya. Yang pertama berkenaan dengan pengubahan sikap bahasa, sedangkan yang kedua berhubungan dengan penyuluhan lewat saluran media massa, penerangan untuk kelompok sasaran yang berkepentingan, dan pelayanan jasa terhadap kalangan masyarakat luas yang dilakukan secara teratur, melalui sarana lisan atau tulisan.

Berdasarkan fungsi dan sikap bahasa yang berpautan dengan ragam bahasa itu, maka usaha pengubahan sikap itu akan dipusatkan pada peningkatan sikap kesetiaan bahasa, sikap kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma dan kaidah bahasa sebagai kerangka acuan. Penyuluhan bahasa dapat dianggap sebagai pelengkap terhadap penyebaran hasil pengembangan bahasa lewat bentuk terbitan. Jika ditinjau dari jenis kelompok sasarannya, penyuluhan bahasa dapat ditujukan kepada khalayak umum, kelompok khusus, atau kepada perseorangan

Penyuluhan kepada khalayak umum biasanya dilakukan dengan memanfaatkan media massa. Yang termasuk sasaran khusus ialah kalangan pejabat dan karyawan. Corak penyuluhan kepada kelompok khusus itu berbeda dalam dua hal dari penyuluhan kepada khalayak umum. Kelompok khusus mempunyai kepentingan yang sama sehingga bahan penyuluhan yang disusun dengan baik akan dirasakan memiliki taraf kegunaan yang tinggi. Kedua, penyuluhan itu terbatas dalam cakupan materi dan jangka waktu pelaksanaannya. Badan pengembang dan pembina bahasa yang melayani permintaan keterangan yang melayani permintaan keterangan yang berasal dari anggota masyarakat penutur secara perseorangan berpeluang menjalin hubungan kemasyarakatan yang baik. Akhirnya, dapat ditambahkan bahwa putusan garis haluan yang menetapkan bahwa setiap permintaan pribadi melalui telepon atau surat, betapa pun kecil pokok masalah yang ditanyakannya, harus dijawab dengan baik dan segera karena pelayanan yang demikian pasti akan menumbuhkan rasa muhibah di kalangan khalayak terhadap usaha penyuluhan itu.

Catatan:

1. Saya berterima kasih kepada Prof. Dr. Anton M. Moeliono yang telah berbagi pengalamannya dalam penyusunan makalah ini.
2. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (1983), jumlah penutur yang menggunakan bahasa tertentu dalam pergaulan sehari-hari memperlihatkan pemerinkatan berikut:
 - a) 59.357.000 penutur bahasa Jawa (40%)
 - b) 22.110.000 penutur bahasa Sunda (15%)
 - c) 17.505.000 penutur bahasa Indonesia (12%)
 - d) 6.914.000 penutur bahasa Madura (5%)
 - e) 3.546.000 penutur bahasa Minang (2%)
 - f) 3.322.000 penutur bahasa Bugis (2%)
 - g) 3.107.000 penutur bahasa Batak (2%)
 - h) 2.481.000 penutur bahasa Bali (2%)
 - i) 1.662.000 penutur bahasa Banjar (1%)

Angka persentase dihitung berdasarkan penduduk Indonesia pada saat itu yang berjumlah 146.775.000 orang.

PERAN BAHASA INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SENI DAN BUDAYA^{*)}

1. Konsep atau makna *seni* dan *budaya*, dua kata yang terdapat dalam judul makalah ini, boleh dikatakan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung dan saling melengkapi.¹ Itulah sebabnya sulit dibayangkan "Kesenian tanpa kebudayaan" atau "kebudayaan tanpa kesenian". Namun, di dalam kenyataannya ungkapan yang sering kita tenui adalah, misalnya, *bangsa yang berbudaya*. Ungkapan *bangsa yang berseni* (hampir) tidak pernah kita dengar atau baca, apalagi kalau hal itu dihubungkan dengan imbauan atau anjuran yang acap kali dilontarkan oleh para pemimpin atau pemuka masyarakat. Cakupan makna *budaya* atau *kebudayaan* memang lebih luas daripada *seni* dan *kesenian* (lihat Catatan 1). Berdasarkan cakupan makna itu, pada makalah ini kata *seni dan budaya* selanjutnya akan disebut *kebudayaan*.

2. Kebudayaan dalam konteks Indonesia perlu dibedakan antara kebudayaan daerah dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Kebudayaan daerah mengacu kepada kebudayaan setiap kelompok etnis yang mendukung pemahaman kita tentang bangsa Indonesia. Dalam hal *kebudayaan Indonesia*, tampaknya penamaan itu bukan merupakan satu-satunya pilihan. Dalam dokumen resmi seperti UUD 1945 pun terdapat tiga macam sebutan, yaitu *kebudayaan Indonesia*, *kebudayaan bangsa*, dan *kebudayaan nasional*.² Sementara itu, pemakaian *kebudayaan nasional* atau *kebudayaan bangsa* sebagai istilah ini juga bahkan masih jelas terlihat dalam GHBN.³ Terlepas dari kemungkinan timbulnya perdebatan akademis yang diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang tentang ketiga istilah itu, yang akan digunakan dalam makalah ini adalah *kebudayaan nasional*.⁴

^{*)} Makalah Seminar Nasional VIII HPBI, 21-23 Juli 1998, Semarang

3. "Pengembangan seni dan budaya" pada judul makalah ini dengan demikian seyogianya dibaca sebagai "pengembangan kebudayaan" yang pada gilirannya bermakna 'pengembangan kebudayaan nasional' dan/atau 'pengembangan kebudayaan daerah'. Salah satu aspek yang diharapkan dapat memantapkan pemahaman kita tentang kebudayaan nasional adalah Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa puncak-puncak kebudayaan daerah tergolong sebagai kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional (lihat Catatan 2.c.).⁵ Kalau kita mencoba membandingkan kebudayaan Indonesia (bukan kebudayaan nasional) dengan kebudayaan daerah, maka kebudayaan yang sudah berakar pada tradisi dan adat istiadat yang kuat pasti bukan kebudayaan Indonesia, melainkan kebudayaan daerah. Kenyataan itu tidak usah membuat siapa pun menjadi merasa malu untuk mengakui dan meyakini bahwa kebudayaan daerah sudah jauh lebih lama mengalami perkembangan daripada kebudayaan Indonesia. Itulah sebabnya, sekali lagi, kebudayaan nasional lebih tepat untuk digunakan daripada kebudayaan Indonesia.
4. Kalau dasar pemikirannya ialah meletakkan berbagai puncak kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional, maka kebudayaan daerah yang mencapai puncaknya itu mampu melintasi batas-batas kedaerahannya. Sedyawati (1998) dalam hubungan itu mengemukakan contoh tari bali dan tari seudati. Tari bali tidak lagi dibawa oleh penari orang Bali. Demikian pula halnya dengan yang membawakan tari seudati yang belum tentu orang Aceh. Hal itu berarti bahwa masyarakat di luar kedua kelompok etnis itu sudah dapat mengapresiasi kedua jenis tarian itu dan mereka tidak akan merasa berkeberatan sama sekali kalau dalam kesempatan-kesempatan tertentu di luar negeri, misalnya, kedua jenis tarian itu mewakili tarian Indonesia. Tentu saja masih amat banyak contoh yang dapat dikemukakan untuk menggambarkan bahwa budaya daerah apa pun yang sudah dapat diterima oleh masyarakat kelompok etnis lain, budaya daerah tersebut sudah dapat digolongkan sebagai kebudayaan nasional.
5. Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan di atas, pengembangan kebudayaan nasional haruslah ditujukan kepada peningkatan mutu se-

hingga, pada gilirannya, kebudayaan yang bermutu itu akan dengan sendirinya memberikan dampak yang positif terhadap upaya menumbuhkan, memupuk, dan memelihara apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan. Sehubungan dengan yang disebutkan terakhir ini, perlu dikemukakan catatan bahwa kebudayaan yang bermutu tidak senantiasa berkorelasi dengan tingginya apresiasi masyarakat. Dalam dunia musik, misalnya, minat masyarakat yang begitu tinggi kepada musik dangdut sama sekali tidak dapat ditafsirkan bahwa musik dangdut itu bermutu tinggi. Kasus seperti itu dengan mudah dapat kita amati pada bidang-bidang lainnya, seperti seni lukis, seni sastra, seni drama, dan bahkan seni tari. Oleh karena itu, upaya pengembangan kebudayaan, baik kebudayaan nasional maupun kebudayaan daerah, perlu mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh tingkat "alamiah" apresiasi yang diperlihatkan oleh lapisan-lapisan masyarakat tersebut.

6. Upaya peningkatan mutu barulah merupakan satu sisi dari pengembangan kebudayaan dalam arti yang luas, terutama apabila hal itu dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang akan "mengonsumsi" dan mengapresiasi kebudayaan tersebut. Sisi lainnya berkenaan dengan upaya memproduksi karya-karya budaya agar bisa dipasarkan kepada masyarakat konsumen. Yang terkait dalam hal ini adalah medium yang dipilih dan digunakan. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi akan sangat mewarnai dan menentukan pilihan medium yang akan digunakan. Dalam kerangka itu, sejak beberapa tahun terakhir sering dikemukakan perlunya kita mengembangkan industri budaya dengan memanfaatkan teknologi informasi mutakhir, baik yang berupa media cetak, elektronik, maupun multimedia. Sehubungan dengan kedua sisi pengembangan kebudayaan itu, yang perlu diupayakan ialah jangan sampai industri budaya itu mengorbankan mutu dan peningkatan mutu itu sendiri jangan sampai sama sekali tidak memperhitungkan tingkat apresiasi masyarakat.⁶
7. Faktor lain yang tidak boleh tidak harus dipertimbangkan dalam pengembangan kebudayaan nasional adalah fenomena kultural yang lazim disebut "kontak budaya". Selama kebudayaan suatu bangsa ma-

sih hidup, selama itu pula kebudayaan bangsa tersebut akan "bersinggungan" dengan kebudayaan bangsa lain. Di Indonesia sudah sejak lama berlangsung kontak budaya antarbudaya daerah dan apabila budaya yang dapat disebut budaya Indonesia itu ada, maka berlangsung pulalah kontak budaya antara budaya Indonesia dan berbagai budaya daerah. Ketika dua kebudayaan atau lebih saling bersinggungan, yang akan terjadi ialah proses saling mempengaruhi. Dalam hal itu, hanya kebudayaan yang lebih "kuat" yang akan memberikan pengaruhnya kepada kebudayaan yang lain. Proses seperti itu sudah, sedang, dan akan terus berlangsung di Indonesia antara budaya daerah, budaya nasional, dan budaya asing. Kita tidak mungkin mengelak dari kemungkinan berlakunya budaya yang kuat mempengaruhi budaya yang lemah. Masalahnya ialah apakah kita memposisikan budaya asing sebagai kebudayaan yang kuat yang akan memberikan rona dan warna yang dominan dalam upaya pengembangan kebudayaan nasional kita?

8. Apa pun yang akan kita kemukakan sebagai jawaban terhadap pertanyaan itu, kita perlu tetap menyadari bahwa kebudayaan suatu bangsa itu pasti merupakan refleksi dan realisasi secara akumulatif dari pertumbuhan dan perkembangan akal budi, sikap, dan pandangan bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi dan menafsirkan berbagai aspek kehidupan. Itulah sebabnya kemudian ada nilai-nilai budaya yang mungkin hanya berlaku bagi bangsa yang bersangkutan itu saja. Ketika kebudayaan bangsa tersebut bersinggungan dengan kebudayaan bangsa lain, nilai-nilai budaya itu belum tentu cocok dan dapat diberlakukan dalam kehidupan bangsa lain yang terkena oleh kontak budaya itu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa di dalam setiap kontak budaya pasti ada nilai-nilai budaya yang positif dan ada pula nilai-nilai budaya yang negatif bagi bangsa lain. Kita perlu memiliki wawasan dan kepekaan untuk membedakan dan sekaligus menyaringnya.
9. Pemertahanan budaya itu pada hakikatnya merupakan strategi yang kritis dan dinamis yang harus kita upayakan sehubungan dengan kon-

tak budaya. Kritis karena kita dituntut untuk menapis unsur-unsur positif dari unsur-unsur negatif dari nilai-nilai budaya asing. Dinamis karena kita pun selanjutnya dituntut pula untuk mentransformasikan unsur-unsur positif budaya asing itu menjadi semacam faktor pendorong ke arah perkembangan maju kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah di Indonesia. Karena kontak budaya akan berlangsung secara terus menerus selama bangsa-bangsa di dunia ini saling berhubungan satu sama lain, maka landasan transformasi seperti itu harus secara terus-menerus pula diberi makna, baik pada kontak budaya antarbudaya daerah (lewat budaya nasional?) dan budaya asing maupun antara budaya nasional dan budaya asing. Dengan demikian, pengembangan kebudayaan nasional itu haruslah didasarkan pada suatu kerangka kebijakan yang berencana, terarah, dan terpadu.⁷

10. Salah satu komponen utama dalam kerangka kebijakan pengembangan kebudayaan nasional itu adalah bahasa Indonesia. Apabila kita sepakat terhadap pandangan bahwa bahasa pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan, maka sesungguhnya bahasa Indonesia dalam konteks kebudayaan nasional kita merupakan komponen yang paling representatif dan dominan. Itulah sebabnya peran bahasa Indonesia perlu makin dimantapkan sebagai alat, media, atau sarana utama dalam proses pengembangan kebudayaan nasional secara keseluruhan. Ketika pengembangan nasional itu bertujuan meningkatkan mutu, peran bahasa Indonesia dalam upaya pencapaian tujuan itu pasti akan sangat menonjol. Langkah-langkah penelitian, pengkajian, dan perumusan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan pengembangan kebudayaan itu tidak bisa tidak harus menggunakan dan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Penuangan dan penyampaian berbagai wawasan dan gagasan mengenai pengembangan kebudayaan, termasuk dalam hal penulisan karangan/buku atau penyelenggaraan berbagai pertemuan tentang kebudayaan seperti seminar dan kongres, juga dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan aspek lainnya dalam upaya pengembangan kebudayaan nasional, yaitu pemasyarakatan kebudayaan na-

sional dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai budaya nasional dan memantapkan jati diri bangsa. Dalam upaya penumbuhan dan peningkatan apresiasi budaya di kalangan masyarakat yang multietnis ini pun peran bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi akan tetap menonjol dan dominan sehingga fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangan kebudayaan ini perlu dilakukan seoptimal mungkin.⁸

Catatan:

1. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II seni didefinisikan sebagai 'keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya)' dan 'karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa' (1997:915). Adapun rumusan *budaya* adalah 'pikiran, akal budi; adat istiadat; sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju)', sedangkan *kebudayaan* mengandung makna 'hal kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat (1997:147).
2. Di dalam UUD 1945, sejauh yang menyangkut Pasal 32 tentang kebudayaan dan Pasal 36 tentang bahasa, *kebudayaan Indonesia* disebut satu kali, *kebudayaan nasional* satu kali, dan *kebudayaan bangsa* tiga kali.
 - a. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya). Bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari *kebudayaan Indonesia* yang hidup". (Penjelasan Pasal 36)
 - b. "Pemerintah memajukan *kebudayaan nasional* Indonesia". (Pasal 32)
 - c. "*Kebudayaan bangsa* ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai *kebudayaan bangsa*. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya *kebudayaan bangsa* sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". (Penjelasan Pasal 32)

3. Lihat GBHN 1998, antara lain, pada sektor Kebudayaan, Pendidikan, dan Pariwisata.
4. Pilihan atas sebutan *kebudayaan nasional* ini sejalan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 32 UUD 1945 berikut penjelasannya. Hal itu berarti bahwa sebutan tersebut mengandung implikasi bahwa kebudayaan daerah yang beraneka macam itu tercakup di dalamnya.
5. Ketika Kongres Kebudayaan diselenggarakan tahun 1991 di Jakarta, ada sementara pihak yang menyimpulkan bahwa kalau kebudayaan nasional itu ditopang oleh puncak-puncak kebudayaan daerah dan puncak kebudayaan pasti menyiratkan pengertian bahwa kebudayaan yang bersangkutan tidak akan tumbuh atau berkembang lagi (karena sudah mencapai puncaknya), maka tak ayal lagi kebudayaan nasional yang demikian akan bersifat statis.
6. GBHN 1998 antara lain menyebutkan bahwa "pengembangan kebudayaan nasional harus mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan memperkuat jati diri serta kepribadian bangsa...".
7. Kerangka kebijakan pengembarigan kebudayaan nasional ini, menurut hasil/kesimpulan Kongres Kebudayaan 1991, hendaknya diarahkan pada tujuan nasional, yaitu terbentuknya "manusia-manusia yang berbudaya, bebas dari kebodohan dan kemiskinan dan semua jenis tindakan yang menurunkan martabat seseorang sebagai manusia, seperti penghinaan dan penindasan".
8. Soedjatmoko (1996:187) mengemukakan bahwa "bahasa Indonesia sudah merupakan wahana kemajuan sosial (*upward mobility*) dan perluasan komunikasi (*language for wider communication*). Dalam konteks yang terakhir inilah dapat kita lihat peran bahasa Indonesia dalam pengembangan kebudayaan nasional.

PENELITIAN KEBAHASAAN DI INDONESIA

Bagaimana dasar kebijakan dan perencanaannya?^{*)}

1. Yang akan dipaparkan dalam makalah ini adalah ihwal kegiatan penelitian kebahasaan yang bertujuan menyingkapkan berbagai aspek kebahasaan tentang bahasa Indonesia (bukan tentang bahasa daerah ataupun bahasa asing)¹. Paparan tersebut akan dikemukakan dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan seperti yang diangkat menjadi subjudul makalah ini, yaitu bagaimana dasar kebijakan dan perencanaan yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksudkan.

Pertanyaan seperti itu didasari oleh semacam pengetahuan bersama--yang mungkin merupakan asumsi--bahwa kegiatan penelitian terhadap bahasa Indonesia itu selama ini telah dilakukan berdasarkan adanya rambu-rambu yang dapat diacu sebagai dasar kebijakan berikut perencanaannya. Dilihat dari keluasan jangkauannya, asumsi itu bisa benar--atau sekurang-kurangnya mendekati benar--dan bisa juga, sebaliknya, sama sekali tidak benar. Penelitian kebahasaan yang dilakukan oleh para peneliti yang bernaung di bawah suatu fakultas atau lembaga penelitian yang sama diharapkan dapat menengarai kebenaran asumsi itu karena para penelitiannya telah saling mengenal, terutama dalam konteks topik penelitian yang mereka garap. Selain itu, terutama untuk penelitian yang dilaksanakan di lingkungan fakultas, para dosen yang menjadi pembimbingnya pun diperkirakan memiliki kebiasaan untuk saling menginformasikan topik penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingannya. Dengan demikian, dasar kebijakan dan perencanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi itu boleh dikatakan memang ada meskipun secara remi tidak dinyatakan secara hitam di atas putih.

^{*)} Makalah Pertemuan Linguistik PELBBA 14, Unika Atma Jaya, Jakarta, 24-25 Juli 2000.

Contoh di atas merupakan kasus lokal yang ruang lingkupnya satu perguruan tinggi atau satu lembaga penelitian tertentu. Kalau masalah penelitian itu dicermati dan ditempatkan pada skala nasional, maka asumsi tersebut menjadi kabur dan tidak bermakna lagi. Dengan perkataan lain, tidak ada indikator yang dapat menggambarkan bahwa penelitian kebahasaan itu secara nasional dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan perencanaan yang telah digariskan dan disepakati bersama.

Kedua seperti itu jelas tidak menguntungkan bagi masa depan penelitian linguistik di Indonesia. Tinjauan mengenai hal itu yang dikemukakan dalam makalah ini tentu hanya merupakan salah satu alternatif, di antara sejumlah upaya lainnya yang dapat dilakukan, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pola alternatif yang diajukan pada akhir makalah ini didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut.

- (1) Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara berimplikasi pada jenis penelitian yang seharusnya dilakukan.
 - (2) Setiap penelitian yang dilakukan harus mampu menjelaskan secara tuntas aspek kebahasaan yang menjadi topik penelitian.
 - (3) Hasil setiap penelitian perlu diupayakan agar bermuara pada makin kokohnya landasan yang memungkinkan dunia linguistik Indonesia dapat dibangun dan dikembangkan.
 - (4) Penelitian yang dilakukan akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti itu sendiri.
2. Di dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dicoraki oleh dua peristiwa yang secara politis amat signifikan. Sumpah Pemuda tahun 1928 tidak saja menggambarkan kesepakatan nasional untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, tetapi juga sekaligus memancarkan tekad untuk menjunjungnya sebagai bahasa persatuan. Peristiwa kedua terjadi tujuh belas tahun kemudian. UUD 1945, Bab XV Pasal 36, memberikan dasar dan arah yang lebih pasti karena bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara.

Dengan kedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa Indonesia dituntut untuk senantiasa mampu berperan se-

bagai komunikasi yang mantap dalam memenuhi berbagai fungsi yang diembannya.² Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia antara lain berfungsi sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia harus mampu memenuhi fungsinya antara lain sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, dan sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek modern.³

Fungsi bahasa persatuan atau bahasa nasional sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu itu oleh Holmes (1994:105) dipandang sebagai fungsi yang bersifat simbolik. Hal itu dikontraskan dengan fungsi bahasa negara atau bahasa resmi yang menekankan fungsi bahasa dari segi manfaat atau faedah penggunaannya. Atas dasar itu, Holmes menyebutkan bahwa fungsi yang bersifat simbolik ditandai oleh pemakaian bahasa yang afektif dan ideologis, sedangkan yang tidak simbolik oleh pemakaian bahasa yang referensial dan instrumental.

3. Kalau fungsi bahasa yang simbolik dan nonsimbolik itu diamati lewat penelitian yang cermat, hasilnya tentu akan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa jauh korelasi antara fungsi yang simbolik dan pemakaian bahasa yang afektif dan ideologis pada satu pihak serta korelasi antara fungsi yang nonsimbolik dan pemakaian bahasa yang referensial dan instrumental pada lain pihak. Korelasi itu mungkin akan terlihat pada tataran frasa, klausa, atau bahkan wacana. Mungkin pula korelasi itu bisa tercerminkan lewat bentuk dan pilihan kata serta stilistikanya. Dengan memperhatikan aspek-aspek linguistik seperti yang dicontohkan itu, pada gilirannya dapat diidentifikasi kriteria yang membedakan bahasa yang afektif dari yang referensial atau bahasa yang ideologis dari yang instrumental. Selain itu, dapat pula dipertanyakan apakah penelitian yang preskriptif hanya sesuai untuk bahasa yang referensial/instrumental dan penelitian yang deskriptif untuk bahasa yang afektif/ideologis.

Contoh di atas dikemukakan untuk memberikan gambaran bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia seperti yang telah dise-

butkan (lihat juga Catatan 3) memiliki implikasi pada topik-topik penelitian yang perlu dirancang dan dilaksanakan. Dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif, implikasi yang demikian jelas berpihak pada pandangan bahwa penelitian apa pun yang akan dilakukan harus senantiasa bertolak dari garis kebijakan yang telah ditentukan, sedangkan hasilnya dituntut untuk dapat memberikan manfaat bagi upaya-upaya pembinaan dan pengembangan bahasa yang merupakan tindak lanjut dari garis kebijakan tersebut.⁴

Dalam hal menentukan topik penelitian itu ada pandangan lain yang liberal: siapa pun boleh melaksanakan penelitian tentang apa pun selama anjakan teoretis dan metodologinya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Ditinjau dari kepentingan yang lebih luas dan mendasar, yakni pengembangan linguistik Indonesia, penelitian yang didasarkan pada pandangan yang liberal itu akan mengakibatkan tidak berimbangnya aspek-aspek kebahasaan yang dijadikan topik penelitian. Ada aspek kebahasaan yang sering dijadikan topik penelitian dan ada pula aspek kebahasaan yang boleh dikatakan kurang mendapat perhatian.

Ketidakseimbangan itu sangat mungkin berkorelasi dengan sesuatu yang dapat disebut faktor kepraktisan, yaitu bahwa dalam penentuan topik penelitian pertimbangannya lebih banyak bertumpu pada minat yang dimiliki si peneliti dan/atau dosen pembimbingnya. Sementara itu, pertumpangtindihan topik penelitian bukan tidak mungkin akan (atau telah?) terjadi kalau di antara institusi pengelola penelitian tidak ada kontak atau koordinasi. Yang perlu segera dipikirkan ialah upaya agar pertumpangtindihan itu tidak terjadi atau tidak terlalu sering terjadi.

Para peneliti kebahasaan, yang jumlahnya pasti masih amat terbatas, perlu dioptimalkan potensinya dan diefisienkan penelitian yang dilakukannya agar gambaran yang tidak menguntungkan bagi pengembangan linguistik Indonesia, seperti yang dikemukakan di atas, tidak terjadi dalam jenis dan frekuensi yang mengarah pada kemubaziran. Oleh karena itu, sebelum terlambat, perlu mulai dipikirkan dan ditata apa yang dapat diacu sebagai perencanaan penelitian untuk bahasa Indonesia.⁵

4. Bagaimana perkembangan linguistik Indonesia selama ini? Pertanyaan ini dicoba dijawab oleh Wahab (2000) dan Lauder (2000). Dengan memperhatikan 99 laporan penelitian tahun 1984--1989 dan 1994--1999 dari 22 perguruan tinggi (universitas dan IKIP) dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Wahab menyimpulkan bahwa yang sangat menonjol sebagai topik penelitian yang sering dipilih ialah aspek sintaksis dengan pendekatan struktural yang berpedoman pada aliran linguistik yang deskriptif struktural. Ditambahkannya bahwa aspek semantik pun termasuk bidang yang cukup mendapat perhatian, tetapi masih terbatas pada semantik leksikal.

Bahwa minat para peneliti Indonesia lebih banyak terfokus pada aspek sintaksis, sebagaimana yang disimpulkan Wahab di atas, hal itu memperlihatkan adanya kesamaan dengan hasil pengamatan yang dilakukan Lauder terhadap laporan penelitian di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Oleh Lauder disampaikan bahwa struktur bahasa menempati peringkat pertama sebagai topik penelitian yang sangat diminati (67,65%). Yang lainnya adalah sastra (16,46%), dialektologi (9,12%), sosiolinguistik (3,67%), dan pengajaran (3,10%).⁶ Catatan penting lainnya dari Lauder ialah bahwa (a) fokus penelitian hanya pada analisis produk bahasa, bukan pada analisis proses berbahasa; (b) perhatian pada data bahasa Indonesia barat lebih besar daripada Indonesia timur⁷; dan (c) masalah perencanaan bahasa, yang merupakan bagian dari sosiolinguistik, kurang sekali dibicarakan.

Apa yang disampaikan Wahab dan Lauder itu pada dasarnya menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam hal aspek-aspek kebahasaan yang diteliti karena terlalu terpusat pada aspek sintaksis. Gambaran itu tetap tidak bergeser pada topik disertai mengenai bahasa Indonesia yang digarap oleh para ahli kita yang menyelesaikan studinya di luar negeri. Dari 13 disertai yang diamati, pemeringkatan berdasarkan aspek kebahasaan yang diteliti adalah: sintaksis (30,76%), sosiolinguistik (30,76%), dan semantik (7,70%).⁸ Yang patut dicatat ialah bahwa minat pada sosiolinguistik ternyata sama dengan sintaksis, hanya tentu saja dengan fokus kajian yang berbeda.⁹

5. Untuk memperoleh gambaran yang agak lebih luas mengenai penelitian linguistik tentang bahasa Indonesia yang telah dilakukan selama ini, perlu pula ditambahkan data yang ada di Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Yogyakarta.¹⁰ Pada kedua instansi ini pun kedudukan aspek sintaksis sebagai topik penelitian yang paling diminati tetap tidak tergoyahkan, yaitu sebanyak 68,75% untuk Balai Bahasa Yogyakarta dan 32% untuk Pusat Bahasa. Menurut data di Pusat Bahasa, aspek sintaksis yang 32% itu cukup ketat bersaing dengan aspek sosiolinguistik yang mencapai 26%. Selain itu, aspek kebahasaan yang diteliti menurut data yang ada di Pusat Bahasa lebih bervariasi daripada data yang dimiliki Balai Bahasa Yogyakarta. Data aspek bahasa yang ada di Pusat Bahasa, yaitu fonologi, dialektologi, leksikografi, historis-komparatif, dan analisis kontrastif, tidak terlihat sebagai aspek bahasa yang diteliti oleh Balai Bahasa Yogyakarta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.
 - a. Balai Bahasa Yogyakarta dengan 32 hasil penelitian: sintaksis (68,75%), analisis wacana (12,50%), morfologi (6,25%), semantik (6,25%), dan sosiolinguistik (6,25%).
 - b. Pusat Bahasa dengan 50 hasil penelitian: sintaksis (32%), sosiolinguistik (26%), semantik (10%), fonologi (8%), morfologi (8%), analisis wacana (6%), historis-komparatif (4%), dialektologi (2%), leksikografi (2%), dan analisis kontrastif (2%).
6. Kalau pada paparan di atas jelas terlihat bahwa aspek sintaksis, baik pada tataran frasa maupun klausa, senantiasa menjadi topik penelitian yang paling banyak mendapat perhatian, hal itu berarti bahwa kita perlu menelusuri sejumlah kemungkinan yang melatarbelakanginya. Pertama, seperti sudah disebutkan, karena hal itu cocok dengan minat peneliti dan dosen pembimbingnya (khusus untuk penelitian di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan program pascasarjana). Kedua, aspek sintaksis atau struktur bahasa itu merupakan topik yang relatif mudah untuk diteliti sehubungan dengan status penelitiannya yang boleh disebut sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Ketiga, sebaliknya dari yang baru saja disebutkan, justru aspek sintaksis itu merupakan topik yang paling menantang. Selain itu, mungkin pula

ada faktor yang lain, misalnya tersedianya data yang cukup melimpah, baik data bahasa tulis maupun data bahasa lisan. Yang jelas ialah bahwa aspek sintaksis itu mengandung cukup banyak permasalahan, apalagi kalau ditinjau dari segi dan kepentingan bahasa tulis dan bahasa lisan yang secara sintaksis memiliki sejumlah perbedaan yang cukup signifikan; belum lagi kalau tinjauan tentang aspek sintaksis itu secara khusus dihubungkan dengan persoalan baku dan tidak bakunya bentuk-bentuk yang digunakan.

Terlepas dari kemungkinan mana yang benar dan bisa diterima secara objektif-akademis, sudah saatnya semua persoalan kebahasaan yang menyangkut kegiatan penelitian itu dikaji secara sistematis dan menyeluruh. Kalau aspek sintaksis itu sudah cukup sering dijadikan topik penelitian, pertanyaannya ialah: sudahkah ada upaya untuk memeriksa kembali semua penelitian tentang sintaksis dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, pertumpang-tindihannya, dan rumpang-rumpang yang masih memerlukan penuntasan lewat penelitian lebih lanjut. Pada akhirnya, upaya seperti ini harus bermuara pada kegiatan "pembulatan" dari aspek sintaksis itu sendiri.

Aspek-aspek kebahasaan lainnya pada saat yang sama perlu memperoleh porsi perhatian yang sama. Aspek fonologi, morfologi, dan semantik masih sangat memerlukan uluran tangan untuk digarap lebih lanjut penelitiannya sampai ke taraf yang mendekati ketuntasan. Sebagai bahasa yang masih sedang berkembang melalui berbagai pengaruh dari bahasa lain yang lebih modern, khususnya dari bahasa Inggris, masalah ketuntasan itu mungkin tidak terlalu relevan untuk disebut. Kemajuan di bidang teknologi informasi akan makin memacu perkembangan bahasa Indonesia lisan, di samping tentu saja tetap memberikan pengaruh yang penting bagi perkembangan bahasa tulisnya.

Kalau semua aspek kebahasaan yang telah diteliti itu dicermati, maka perencanaan yang menyangkut penelitian kebahasaan ini sudah dapat disusun garis-garis besarnya. Hal itu perlu segera dilakukan, paling tidak agar kekuatiran yang dikemukakan pada bagian awal makalah ini, yakni kemungkinan terjadinya pertumpangtindihan pe-

nelitian yang mengarah pada kemubaziran, sedapat mungkin dapat diupayakan untuk tidak berulang.

7. Dalam hubungannya dengan pencermatan terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan menyusun perencanaan itu, ada baiknya kita mengingat kembali apa yang telah diupayakan oleh ILDEP (Indonesian Linguistics for Development Project), suatu wadah kerja sama kebahasaan antara Pusat Bahasa dan Universitas Leiden, Negeri Belanda. Sebelum perguruan tinggi di Indonesia menyelenggarakan program pascasarjana seperti sekarang, kegiatan ILDEP berupa penataran yang pesertanya adalah para dosen bahasa/sastra dari seluruh Indonesia itu telah berjalan dengan sangat efektif karena ditunjang dengan dana yang cukup dan, yang tidak kalah pentingnya, perencanaan kegiatan yang mencakup hampir seluruh aspek kebahasaan yang perlu diteliti.

Aspek kebahasaan yang diangkat menjadi tema penataran adalah leksikografi (1974), sociolinguistik (1975), dialektologi (1976), penerjemahan (1977), sastra (1978), morfo-sintaksis (1979), dan historis komparatif (1980). Setiap penataran dilaksanakan dalam empat tahapan: tahap I untuk memperluas wawasan teori, tahap II untuk latihan penelitian lapangan, tahap III untuk melaporkan hasil penelitian dalam sebuah seminar, dan tahap IV untuk studi lanjutan di Belanda bagi peserta yang terpilih dan untuk melakukan penelitian bagi peserta lainnya. Tingkat keberhasilan penataran ILDEP itu cukup tinggi. Di antara pesertanya banyak yang telah menyelesaikan program doktor. Catatan penting untuk penataran ILDEP ini ialah bahwa wawasan kebahasaan para pesertanya mengalami peningkatan yang sangat berarti.¹¹

Yang disebutkan terakhir ini sangat penting sebagai modal bagi terpenuhinya dua hal yang telah disebutkan pada bagian awal makalah ini, yaitu ketuntasan masalah kebahasaan yang diteliti dan peran penelitian yang demikian bagi pengembangan linguistik Indonesia.

8. Paparan singkat di atas mencoba menggambarkan dua hal pokok, yaitu bahwa pada satu sisi penelitian kebahasaan di Indonesia telah banyak dilakukan dan akan terus dilakukan, tetapi pada sisi lain ada

kesan bahwa penelitian-penelitian tersebut dilaksanakan tanpa dasar kebijakan dan acuan yang jelas. Sementara itu, di dalam menentukan topik penelitian, tampaknya setiap lembaga pengelola penelitian berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kerja sama atau koordinasi antara lembaga yang satu dan lembaga yang lain. Akibatnya, pertumpang-tindihan topik penelitian, meskipun tidak persis sama, bukan mustahil sering terjadi. Mengingat jumlah peneliti yang masih sangat terbatas, hal tersebut jelas mencerminkan pelaksanaan penelitian yang tidak efisien.

Keadaan seperti itu harus kita sadari sebagai sesuatu yang tidak boleh berlanjut. Para pengelola program pascasarjana untuk bidang studi bahasa dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, perlu segera duduk bersama untuk membicarakan dan menyepakati berbagai hal yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian kebahasaan di Indonesia. Prioritas utama perlu diberikan pada penyusunan rencana induk (*grand design*) penelitian yang tidak perlu terlalu rinci, cukup garis-garis besarnya saja. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pokoknya harus dibahas secara tuntas. Sekadar contoh: karena selama ini penelitian yang dilakukan boleh dikatakan lebih condong pada analisis bahasa tulis, mungkin sudah tiba saatnya untuk berganti haluan dan mulai lebih banyak mencurahkan perhatian kita pada analisis bahasa lisan.

Setelah rencana induk penelitian tersebut memperoleh bentuk yang memadai, dapat dilakukan pembagian tugas berdasarkan ketersediaan kepakaran atau keahlian yang diperlukan. Pembagian tugas yang disesuaikan dengan faktor kepakaran ini hendaknya benar-benar disadari sebagai salah satu upaya peningkatan mutu agar tidak terjadi seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan topik tertentu, padahal sebenarnya kepakaran untuk topik tersebut di perguruan tinggi yang bersangkutan tidak tersedia. Untuk penyegaran dan saling bertukar pengalaman, pertukaran tenaga dosen di antara perguruan-perguruan tinggi tertentu patut juga dipertimbangkan.

Saling memberikan informasi tentang topik penelitian yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi hen-

daknya dijadikan semacam kesepakatan tidak tertulis. Kenyataan mengenai hal itu sekarang ini masih memprihatinkan sehingga seringkali seseorang tidak mengetahui apa yang dilakukan orang lain di tempat lain karena informasinya sama sekali tidak tersedia di perpustakaan.

Masih banyak hal lainnya yang bisa dimanfaatkan lewat forum koordinasi seperti itu. Akan tetapi, pertanyaan yang segera perlu dijawab ialah siapa pemrakarsanya. Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) dapat mengambil alih tugas itu. Di sela-sela kesibukan pertemuan berkalanya, dapat disisihkan waktu untuk mengadakan forum tersebut. Kalau tidak, Pusat Bahasa dapat juga memegang peran pemrakarsa itu. Pihak mana pun yang tampil, apakah MLI, Pusat Bahasa, ataupun pihak lain, hal itu bukanlah persoalan yang mendasar karena yang penting adalah mengupayakan agar perguruan tinggi pengelola penelitian tidak berjalan sendiri-sendiri.

Catatan

1. Kalau kita menyebut masalah kebahasaan di Indonesia, maka masalah yang dimaksudkan mengacu pada tiga hal, yaitu masalah bahasa Indonesia, masalah bahasa daerah, dan masalah bahasa asing. Masalah bahasa Indonesia dan daerah dikaitkan dengan upaya pembinaan dan pengembangannya, sedangkan masalah bahasa asing hanya perlu dihubungkan dengan upaya pemakaian atau pemanfaatannya, terutama yang menyangkut pengajarannya (lihat Halim (Ed.), 1976: 144). Yang dicoba dikemukakan dalam makalah ini difokuskan pada masalah bahasa Indonesia dalam konteks upaya pengembangannya yang dilakukan lewat kegiatan penelitian.
2. Tuntutan agar bahasa Indonesia tetap dapat berperan sebagai sarana komunikasi yang mantap itu harus dijadikan landasan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan dalam bidang iptek yang antara lain ditandai oleh begitu pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kalau bahasa Indonesia tidak mampu berperan sebagai sarana komunikasi dalam bidang kehidupan yang modern, misalnya karena kosakata dan peristilahannya tidak menunjang, dikuatirkan masyarakat terpelajar kita akan meninggalkan bahasa Indonesia dan berpaling kepada bahasa Inggris untuk dijadikan sebagai sarana komunikasi mereka. Dalam konteks bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa, kemungkinan tersebut harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat

merisaukan. Oleh karena itu, upaya pemekaran atau pemutakhiran kosakata dan peristilahan bahasa Indonesia untuk berbagai bidang ilmu perlu diprioritaskan dan digarap secara bersungguh-sungguh.

3. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu tercantum dalam putusan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dan dibicarakan kembali dalam Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Sejauh yang menyangkut kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedua Seminar menyepakati bahwa bahasa Indonesia memiliki empat fungsi, yaitu sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah. Akan tetapi, mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdapat perbedaan karena Seminar tahun 1999 menambahkan tiga jenis fungsi, yakni bahasa Indonesia sebagai (1) bahasa media massa, (2) pendukung sastra Indonesia, dan (3) pemerkaya bahasa dan sastra daerah. Adapun fungsi-fungsi yang lainnya berhubungan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu memperlihatkan adanya persamaan antara Seminar tahun 1975 dan Seminar tahun 1999. Yang dimaksudkan adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, dan (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
4. Sejak dua tahun yang lalu, Pusat Bahasa melaksanakan penelitian tentang pemakaian bahasa di Indonesia yang antara lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan berbahasa (*parole*) masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pemakaian bahasa secara umum, maupun dengan ragam bahasa tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih memanfaatkan perencanaan yang menyangkut pembinaan bahasa agar kegiatan penyuluhan, misalnya, dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
5. Perencanaan penelitian itu perlu didukung oleh perencanaan korpus (*corpus planning*) yang menurut Noss (1994: 4--5) terdiri atas dua konsep yang berbeda, tetapi saling mendukung. Yang pertama menyangkut ketersediaan data bahasa, baik data bahasa tulis maupun data bahasa lisan, yang meliputi berbagai jenis ragam bahasa yang ada. Yang ke dua berkenaan dengan analisis linguistik yang unsur-unsurnya terdiri atas (1) fonologi dan ejaan (termasuk

angka dan tanda baca), (2) morfologi dan sintaksis, (3) leksikon, dan (4) wacana dan stilistika serta sosiolek dan ragam bahasa (yang bukan dialek geografis ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sudah tidak digunakan lagi). Pandangan Noss mengenai korpus bahasa itu terbatas pada data bahasa yang sinkronis. Dalam konteks upaya mengembangkan linguistik Indonesia yang lebih komprehensif, data bahasa yang diakronis pun diperlukan, antara lain untuk keperluan penelitian historis-komparatif.

6. Dilihat dari benang merah yang menjadi alur pemikiran dalam makalah ini, komponen-komponen yang diamati Lauder itu seharusnya bukan seperti itu. Karena yang diamati adalah laporan penelitian yang dikelola oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengelompokan bidang penelitian yang dilakukan berkisar pada tiga komponen utama, yaitu bahasa, sastra, dan pengajaran. Baik bahasa maupun sastra, perlu pula dibedakan antara yang Indonesia dan daerah. Atas dasar itu, yang seyogianya diperhatikan dalam konteks makalah ini hanya tiga aspek, yakni struktur bahasa, dialektologi, dan sosiolinguistik.
7. Pernyataan ini berkenaan dengan penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang oleh Lauder disimpulkan seperti itu, yakni bahwa perhatian peneliti pada data bahasa di Sumatera dan Jawa (termasuk Madura) jauh melebihi perhatian terhadap data bahasa di bagian Indonesia lainnya. Kutipannya mengenai hal itu adalah: Sumatera (31,87%), Jawa Madura (24,76%), Bali--Nusa Tenggara (8,76%), Kalimantan (11,26%), Sulawesi (18%), Maluku (4,74%), dan Irian Jaya (0,61%).
8. Harus diakui bahwa data yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengenai hal itu masih belum memadai. Ketiga belas disertasi yang dimaksudkan ditulis oleh Soenjono Dardjowidjojo, Sri Utari Nababan, Amran Halim, Zaini Machmoed, Maruli Butar-Butar, Daulat P. Tampubolon, Husen Abas, Asim Gunarwan, M. Diah, dan I Gusti Made Sucaya. Selain itu, masih ada catatan mengenai disertasi Samsuri, E. Sadtono, P.W.J. Nababan, Abbas Badib, dan Stephanus Djawanai. Akan tetapi, disertasi dari kelima peneliti ini bukan tentang bahasa Indonesia.
9. Disertasi tentang sosiolinguistik yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.
 - a. *Indonesia: Problems of Development and Use of a National Language* (Khaidir Anwar, 1976)

- b. *Bahasa Indonesia as a Unifying Language of Wider Communication: a Historical and Sociolinguistic Perspective* (Husen Abas, 1978)
 - c. *A Sociolinguistic Study of Grammatical Variation in Indonesia* (Asim Gunarwan, 1981)
 - d. *National Language Policy and the Writing Curriculum in Indonesia* (M. Diah, 1982)
10. Penulis sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Wahab yang telah mengirimkan penulis daftar karya ilmiah tentang penelitian kebahasaan yang ada di Universitas Negeri Malang (sebelumnya bernama IKIP Malang). Daftar itu memuat 411 karya ilmiah S2 dan S3 yang secara keseluruhan boleh dikatakan dikaitkan dengan masalah pengajaran. Untuk keperluan makalah ini penelitian kebahasaan yang dihubungkan dengan pengajaran belum dibicarakan, sama halnya dengan penelitian tentang bahasa daerah dan sastra. Dalam konteks perencanaan penelitian kebahasaan yang benar-benar komprehensif, tentu saja masalah pengajaran pun perlu mendapat perhatian yang sama. Demikian juga halnya dengan penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah.
 11. Wawasan kebahasaan bagi seorang peneliti bahasa merupakan faktor determinan. Ia dituntut tidak saja untuk menguasai pengetahuan teoretis, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam berbagai kegiatan penelitian yang dilakukannya. Dilihat dari perlunya hasil penelitian untuk menunjang para pengambil keputusan dalam menentukan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa, maka sebenarnya tugas peneliti itu ialah menyediakan berbagai informasi kebahasaan yang bersumber dari hasil penelitiannya. Hal itu berarti pula bahwa secara tidak langsung para peneliti ikut mengambil bagian dalam mengembangkan teori kebahasaan di Indonesia (lihat juga Effendi, 2000: 895--896)

1. Bahasa menunjukkan bangsa. Demikianlah untaian kata dari kaum cerdik-pandai dan para bijak-bestari zaman dahulu kala yang selalu kita kaji ulang pada saat-saat yang dianggap tepat untuk mengungkapkannya. Dalam konteks Indonesia dan berbagai hal yang menyangkut keindonesiaan, pengajiulangan terhadap "butir mutiara" itu akan tetap penting dan selalu relevan, terutama sehubungan dengan ciri keindonesiaan yang multietnis, multikultural, dan (yang berakibat pada) multilingual.

Kongres bahasa seperti ini merupakan forum yang sungguh tepat bagi para pakar dan peminat bahasa yang mengikutinya untuk sekurangnya melakukan tiga hal, yaitu (1) memahami apa yang tersurat dan tersirat dalam ungkapan para bijak-bestari dan kaum cerdik-pandai itu; (2) menerjemahkan pemahaman tersebut berdasarkan kenyataan dan kecenderungan sosiolinguistik yang senantiasa bergerak searah dan seirama dengan perubahan sosial budaya yang melingkupi dan menyemangatnya; serta (3) menyusun perencanaan bahasa yang lebih terarah dan komprehensif agar bahasa-bahasa di Indonesia merupakan sarana komunikasi yang tetap mantap sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sehingga "bahasa menunjukkan bangsa" juga tetap terjaga.

Karena masalah kebahasaan di Indonesia erat berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah (selain bahasa asing yang tidak akan secara khusus dibicarakan kecuali dalam hal "pengaruhnya" terhadap kedua jenis bahasa itu), maka lingkup tinjauan dalam makalah ini akan berkisar pada dua hal yang menyangkut perilaku berbahasa. Pertama, pada saat kita berbahasa Indonesia, seharusnya kita menggunakannya sedemikian rupa sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tetap tampak dan terjaga. Kedua, pada saat kita menggunakan bahasa daerah, hendaknya bahasa daerah yang kita gunakan itu juga mencerminkan jati diri keetnisan kita masing-masing. Dengan perkataan lain, jati diri kita sebagai bangsa ataupun suku bangsa/kelompok etnis perlu ditampilkan

* Makalah Kongres Bahasa Bali II, 7--9 November 1996, Denpasar.

dalam setiap pandangan, sikap, dan perbuatan yang salah satu bentuk pengungkapannya adalah perilaku berbahasa.

2. Pemahaman kita terhadap jati diri lazim menggunakan konsep kebudayaan (dalam arti yang seluas-luasnya) sebagai kerangka acuan. Apabila jati diri itu diukur dengan menggunakan parameter perilaku berbahasa, seperti yang telah disinggung di atas dan yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam makalah ini, maka konsep kebudayaan itu harus lebih difokuskan pada seberapa jauh acuan yang lazim disebut faktor sosial budaya itu mampu mempengaruhi dan mewarnai nuansa-nuansa penggunaan bahasa kita. Dampak faktor sosial budaya terhadap perilaku berbahasa ini, kalau dilihat dari masalah kebahasaan di Indonesia yang secara sepintas telah disinggung di atas, seharusnya tidaklah sama antara persoalan yang diakibatkan oleh pemakaian bahasa Indonesia pada satu pihak dan pemakaian (salah satu) bahasa daerah pada pihak lain.

Ketidaksamaan itu bersumber pada atau berkaitan erat dengan "sikap batin" orang Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah kelompok etnisnya. Sikap batin ini sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh hubungan emosional yang bersangkutan terhadap kedua jenis bahasa itu. Tentang hal itu dapat dikemukakan semacam asumsi yang berkenaan dengan tingkat keakraban yang bersangkutan terhadap bahasa Indonesia dibandingkan dengan tingkat keakraban terhadap bahasa ibunya. Secara singkat, karena hal itulah justru yang dijadikan benang merah makalah ini, dapatlah dikatakan bahwa sikap batin, hubungan emosional, dan tingkat keakraban dalam berbahasa itu dapat dihubungkan dengan "usia" bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita masing-masing. Dengan mengecualikan bahasa Melayu yang kita akui bersama sebagai bahasa yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, asumsi itu harus didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa-bahasa daerah di Indonesia (jauh) lebih tua daripada bahasa Indonesia. Atas dasar itu, apabila rata-rata orang Indonesia "menguasai" bahasa daerahnya, hampir dapat dipastikan bahwa sikap batin, hubungan emosional, dan tingkat keakraban mereka terhadap bahasa daerah masing-masing lebih mantap daripada terhadap bahasa Indonesia.

3. Melalui butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia dengan nama bahasa

Indonesia. Meskipun sesungguhnya butir ketiga Sumpah Pemuda itu merupakan pernyataan yang bersifat politis, formulasinya mengisyaratkan agar kita "menjunjung" bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga bahasa Indonesia berfungsi bukan sekadar sebagai lambang kebudayaan dan identitas (jati diri) nasional, melainkan juga sebagai alat mempersatu dan alat perhubungan.

Dengan beban "fungsi" yang demikian, bahasa Indonesia telah terbukti keberhasilannya dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, akan sulit dijawab pertanyaan tentang bahasa apa yang akan digunakan oleh para pemimpin bangsa pada masa perjuangan kemerdekaan, baik sebagai alat komunikasi di antara mereka sendiri maupun untuk membangkitkan dan mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia secara umum. Bahasa apa yang akan digunakan dalam teks proklamasi (kemerdekaan) dan dalam UUD 1945 juga akan sama sulitnya untuk dijawab kalau kita belum memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Satu hari setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia bahkan mempunyai kedudukan yang lain, yaitu sebagai bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945). Yang amat penting dalam hal ini ialah penjelasannya yang menyebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara secara baik-baik oleh rakyatnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Selain itu, disebutkan juga bahwa bahasa-bahasa daerah itu juga merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Kedudukannya sebagai bahasa negara mengakibatkan bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, tetapi juga sekaligus sebagai alat perhubungan (dalam arti yang luas) tingkat nasional dan bahkan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas, bagaimana halnya dengan bahasa daerah? Jawaban atas pertanyaan ini patut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Untuk itu, kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan bahasa daerah yang dipelihara secara baik-baik oleh rakyatnya. Secara sederhana hal itu dapat diartikan bahwa bahasa daerah yang bersangkutan

digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat daerahnya. Selain itu, tentu saja setiap bahasa daerah harus pula dipandang sebagai lambang jati diri daerah dan sekaligus sebagai lambang kebanggaan daerah. Dalam GBHN 1993 bahkan digarisbawahi pentingnya bahasa daerah untuk keperluan pengembangan bahasa Indonesia dan kebudayaan nasional sehingga terhadap bahasa daerah (termasuk sastra) perlu dilakukan berbagai upaya penelitian berikut penyebarluasan atau pemasyarakatannya. Sementara itu, bahasa Indonesia yang pemerikayaannya antara lain diperoleh dari bahasa-bahasa daerah itu perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia dapat berfungsi dengan mantap sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Uraian singkat di atas menggambarkan perlu dibedakannya secara jelas antara peran bahasa Indonesia dan peran bahasa daerah dalam kehidupan berbahasa di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa perlu terus dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dengan mengoptimalkan potensi dan pemanfaatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, terutama yang menyangkut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengoptimalan potensi bahasa Indonesia mengandung makna ganda, yaitu pemantapan norma bahasa yang dibarengi dengan pemerikayaan kosakata berikut peristilahannya. Hal yang disebutkan terakhir ini perlu secara terencana dan terus-menerus diupayakan melalui pemanfaatan sumber-sumber di luar bahasa Indonesia, baik yang terdapat dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Namun, yang perlu tetap diperhatikan ialah bahwa masuknya kosakata dan istilah yang berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing itu haruslah tunduk pada "aturan main" yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan normatif bahasa Indonesia, seperti yang tercantum, misalnya, dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Melalui pemantapan norma bahasa dan pemerikayaan kosakata serta peristilahannya itu, bahasa Indonesia diharapkan tetap berperan sebagai alat pengungkap yang efektif untuk berbagai pikiran, pandangan, dan

konsep, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling rumit dan kompleks.

Pemerayaan kosakata dan peristilahan bahasa Indonesia itu sebenarnya merupakan proses yang sudah sangat alamiah sifatnya dalam setiap peristiwa kontak bahasa. Bahasa yang kuat akan selalu mempengaruhi bahasa yang lemah. Yang perlu diupayakan ialah agar bahasa yang berstatus "lemah" menggali dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan bahasa yang berstatus "kuat" untuk kepentingan dirinya tanpa harus mengorbankan identitas atau jati dirinya. Untuk itu, ada prinsip yang harus secara konsisten diterapkan: kata dan istilah yang diserap dari bahasa daerah dan bahasa asing itu hanyalah bentuk-bentuk yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Adapun kata dan istilah yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus kita hindari pemakaiannya karena hal itu hanya akan mengotori atau mencemari ciri keindonesiaan bahasa persatuan dan bahasa negara kita. Apabila hal itu terjadi, maka kita tidak dapat lagi dengan bangga menyatakan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.

Prinsip seperti itu merupakan bagian yang amat strategis dalam upaya kita menerjemahkan "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Bagian lainnya dari apa yang tersirat dalam butir ketiga Sumpah Pemuda itu berkenaan dengan upaya kita untuk senantiasa meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang secara populer dimasyarakatkan melalui ajakan atau imbauan agar kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang sering disalahpahami ialah seakan-akan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hanyalah satu jenis atau satu macam saja, yaitu bahasa Indonesia yang tingkat kebakuan dan keresmiannya tinggi, padahal kenyataan pemakaian bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ragam bahasa Indonesia itu alangkah banyak dan beranekanya: ada bahasa tulis dan bahasa lisan, ada ragam resmi dan tidak resmi (dengan sejumlah gradasi di antara keduanya), dan ada pula ragam fungsional (seperti bahasa jurnalistik, bahasa laporan, dan bahasa surat-menyurat).

Kalau upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dikaitkan dengan pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan, peran apa yang harus dimainkan oleh bahasa daerah? Seperti

yang telah ditegaskan di atas, pemantapan norma bahasa dan pemerka-
yaan kosakata berikut peristilahannya itu haruslah diupayakan tanpa harus
mengorbankan ciri keindonesiaan bahasa Indonesia sebagai lambang jati
diri bangsa. Untuk keperluan yang disebutkan terakhir inilah bahasa dae-
rah dapat mengambil posisi untuk tampil secara lebih berperan.

Fungsinya sebagai bahasa yang digunakan di lingkungan keluarga
dan masyarakat daerah serta sebagai lambang identitas dan kebanggaan
daerah pada gilirannya akan berfungsi sebagai perekat yang makin me-
ngukuhkan pilar-pilar dari sebuah bangunan monumental yang bernama
kebudayaan Indonesia.

5. Kecenderungan sosiolinguistik yang senantiasa bergerak mengikuti
perubahan sosial budaya itu, bila dihubungkan dengan pemakaian bahasa
Indonesia dan bahasa daerah, akan makin jelas memperlihatkan perbe-
daan peran di antara kedua jenis bahasa itu. Dengan memperlihatkan pe-
ran seperti itu, seharusnya kita dapat pula menentukan dan menarik garis
pembatas yang transparan dalam pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa
daerah dengan tolok ukur sikap batin, hubungan emosional, dan tingkat
keakraban yang sesuai untuk jenis bahasa yang digunakan. Tolok ukur
"kedaerahan" digunakan untuk melihat (atau menilai?) mutu pemakaian
bahasa daerah. Sejalan dengan hal itu, mutu pemakaian bahasa Indonesia
pada gilirannya harus pula dipertanyakan dengan menggunakan tolok
ukur "keindonesiaan".

Apabila mutu pemakaian bahasa Indonesia itu dihubungkan dengan
cara pengungkapannya yang berbentuk bahasa tulis dan bahasa lisan,
yang patut dirisaukan adalah pemakaian bahasa lisan karena pemakaian
bahasa tulis tidak memperlihatkan tingkat kegawatan yang merisaukan
seperti halnya bahasa lisan. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan yang
amat mendasar: bahasa lisan terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan
bahasa tulis tidak. Akibatnya, karena tuntutan bahwa bahasa lisan itu ha-
rus berciri spontan, sedangkan kita sebagai pembicara kurang "mengua-
sai" bahasa Indonesia yang kita gunakan, maka yang akan terjadi ialah
interferensi dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

Interferensi dalam bentuk pengaruh lafal untuk sementara tidak per-
lu diperhitungkan sebagai faktor yang menimbulkan kerisauan. Keaneka-
ragaman pelafalan setiap bahasa daerah, bagaimanapun, akan tetap meru-

pakan batu sandungan ke arah terciptanya satu jenis pelafalan bahasa Indonesia yang dapat dicermati oleh keseluruhan bangsa Indonesia. Yang dapat diupayakan untuk dihindari ialah interferensi leksikal dan gramatikal. Dalam hal ini, upaya untuk mengatasi interferensi leksikal harus lebih diprioritaskan daripada yang gramatikal, terutama apabila kita sedang berbicara terhadap khalayak yang bahasa ibunya belum tentu sama dengan bahasa ibu kita. Apabila hal itu tetap berlangsung karena kita belum mampu mengatasinya (karena berbagai alasan), maka pendengar atau lawan bicara kita tidak akan sepenuhnya memahami apa yang kita ucapkan. Akibatnya, bahasa yang kita gunakan dapat disebut gagal sebagai alat komunikasi. Selain itu, bahasa yang kita gunakan akan kehilangan ciri ke-indonesiaannya. Dengan perkataan lain, bahasa Indonesia yang kita gunakan tidak lagi mencerminkan lambang jati diri bangsa.

Pemakaian bahasa Indonesia lisan dengan interferensi leksikal dari bahasa daerah itu, apalagi dalam porsi yang berlebihan, dapat diartikan bahwa yang bersangkutan belum termasuk ke dalam penutur yang "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Gejala berbahasa seperti ini tampaknya tidak atau belum disadari sebagaimana mestinya oleh yang bersangkutan. Sebaliknya, kita bahkan dapat menyaksikan makin meningkatnya kecenderungan yang tidak menggembirakan itu. Penulis makalah ini belum dapat memastikan apakah masalah itu, yang makin lama akan makin terakumulasi kalau tetap dibiarkan, pada saatnya nanti akan berpengaruh terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah sejak lama kita bina dan kita pelihara.

6. Interferensi leksikal dari bahasa daerah yang terjadi ketika seseorang tengah berbahasa Indonesia itu perlu dilihat dari wacana komunikasinya itu sendiri agar kita terhindar dari kecerobohan yang akan membawa kita kepada semacam penilaian bahwa yang bersangkutan dengan serta merta dianggap sebagai orang yang "tidak menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Wacana komunikasi yang dimaksudkan paling tidak berhubungan dengan dua hal, yakni tingkat keresmiannya dan usia serta status sosial para peserta komunikasi.

Dengan memperhatikan kedua jenis parameter itu, kita akan dapat memahami, mungkin dalam arti 'memaafkan', bahwa interferensi leksikal yang terjadi dalam situasi komunikasi yang tingkat keresmiannya re-

latif rendah dan para peserta komunikasinya memperlihatkan tingkat usia dan status sosial yang secara alamiah dan spontan tidak mengikat mereka untuk hanya menggunakan satu jenis atau ragam bahasa saja. Sebaliknya, dalam situasi komunikasi yang tingkat keresmiannya tinggi, interferensi leksikal seperti itu tidak pada tempatnya kita beri toleransi meskipun dari segi usia dan status sosial peserta komunikasinya, parameter yang di atas disebutkan layak dipertimbangkan, interferensi tersebut masih dapat "dimaafkan".

Yang perlu kita sadari benar ialah bahwa interferensi leksikal itu seharusnya tidak boleh terjadi dalam situasi komunikasi yang tingkat keresmiannya tinggi. Akan tetapi, tuntutan yang demikian itu akan terasa sebagai beban yang berat kalau dihubungkan dengan ciri bahasa lisan yang harus serba spontan karena terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Akibatnya, kalau "spesifikasi" pembicara seperti itu memang tidak mendukung, interferensi itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan oleh pembicara yang bersangkutan. Spesifikasi pembicara yang dimaksudkan berkorelasi dengan latar belakang pendidikan, bidang profesi yang dihadapi, serta yang tidak kalah pentingnya ialah minat dan perhatian yang bersangkutan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Kesemuanya itu akan sangat jelas tergambarkan lewat keterampilan berbahasanya, baik keterampilan dalam menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis.

Seseorang yang berbicara di hadapan khalayak umum yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang pasti berciri heterogen dari segi keetnisan, tetapi mungkin memperlihatkan kehomogenan dari segi yang lain, harus diasumsikan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan bahasa Indonesia lisan. Asumsi itu seharusnya memperhadapkan kita kepada kenyataan berbahasa yang mengisyaratkan bahwa kita sudah mampu 'menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia' sebagaimana mestinya, antara lain karena kita sudah memiliki kemampuan atau bahkan daya tahan untuk tidak dijangkiti oleh "penyakit interferensi" itu.

Penjelasan singkat tentang asumsi di atas memberikan gambaran berbahasa yang sangat ideal. Apa pun yang tergolong ideal biasanya selalu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Demikian pula halnya dengan kenyataan berbahasa sehingga sangat tidak

mungkin kita mengharapkan agar setiap orang yang berbicara dalam situasi komunikasi yang tingkat keresmiannya tinggi dapat benar-benar membebaskan dirinya dari gangguan interferensi tersebut.

Yang dapat dikemukakan dan oleh karena itu layak untuk diharapkan ialah agar ketika seseorang sedang berbahasa Indonesia, yang bersangkutan tetap menyadari ciri keindonesiaannya. Harapan seperti ini bertolak dari analogi yang menggambarkan melekatnya ciri keetnisan atau kedaerahan pada seseorang yang tengah berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Dengan perkataan lain, yang diharapkan dari seseorang yang tengah berbahasa Indonesia dalam situasi pemakaian yang resmi itu ialah adanya sikap batin, hubungan emosional, dan keakraban yang memadai terhadap bahasa yang digunakannya sehingga setelah itu kita lalu dapat mengidentifikasikannya sebagai ciri keindonesiaan dari yang bersangkutan.

7. Dalam konteks pembicaraan seperti itu, yang relevan untuk diungkapkan ialah pertanyaan tentang seberapa jauh ciri keindonesiaan itu dipahami dan disadari oleh masyarakat kita, terutama oleh mereka yang karena tuntutan profesinya sering berbahasa untuk kepentingan khalayak yang lebih luas. Jawaban terhadap pertanyaan itu sejak awal harus dihubungkan dengan masalah *bilingualisme*.

Hampir semua orang Indonesia pada umumnya dapat dikatakan sebagai anggota masyarakat yang bilingual. Selain berbahasa Indonesia, mereka juga merupakan penutur bahasa daerah tertentu. Bahasa daerah ini pada umumnya juga merupakan bahasa ibu yang bersangkutan. Catatan yang perlu ditambahkan ialah bahwa ada juga orang Indonesia, yang jumlahnya setakat ini boleh dikatakan amat terbatas, yang bahasa ibunya bahasa Indonesia. Kelompok masyarakat penutur bahasa Indonesia yang jumlahnya terbatas ini dengan mudah dapat dijumpai di hampir semua kota besar di Indonesia, yaitu pada generasi muda yang orang tuanya atau ayah dan ibunya memperlihatkan perbedaan dalam hal kelompok etnis dan yang wilayah atau kawasan tempat tinggalnya dihuni oleh warga yang secara etnis heterogen. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi serta informasi, diperkirakan kelompok penutur bahasa Indonesia seperti ini akan makin bertambah. Selama hal itu berlangsung secara alamiah, kita tak perlu merasa

risau semata-mata karena bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia itu akan berakibat kepada makin berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah.

Dengan mengecualikan kelompok yang terbatas itu, fenomena kebhahasaan yang menarik untuk diamati ialah adanya semacam tarik-menarik antara ciri keindonesiaan dan ciri kedaerahan pada diri seseorang yang sedang berbahasa Indonesia di depan khalayak umum. Tarik-menarik itu akan sangat diwarnai oleh ketiga aspek yang telah disebutkan, yaitu sikap batin, hubungan emosional, dan keakraban. Ketiga aspek tersebut akan menentukan kecenderungan berbahasa yang pada dasarnya akan menentukan apakah yang bersangkutan lebih condong kepada ciri keindonesiaan atau ciri kedaerahannya.

8. Kalau ihwal tarik-menarik antara ciri kedaerahan dan ciri keindonesiaan itu dihubungkan dengan pandangan yang menyebutkan bahasa sebagai jati diri bangsa, yang menjadi topik bahasan dalam makalah ini, maka seyogianya ciri kedaerahan hanya melekat pada seseorang yang sedang berbicara dalam bahasa daerah dan ketika orang yang sama pada kesempatan lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasinya, maka secara moral yang bersangkutan berkewajiban tampil dengan ciri keindonesiaanya.

Agar gambaran ideal yang telah disebutkan di atas secara berangsur-angsur dapat mendekati kenyataan yang sebenarnya, maka semua pihak harus mengambil posisi dan peran yang cocok untuk menerjemahkan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928. Para ahli bahasa berkewajiban mengembangkan bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang mantap dan modern. Para guru, wartawan, pengarang, wartawan, dan tokoh masyarakat serta pejabat negara perlu menyadari dirinya sebagai tokoh yang akan diteladani oleh masyarakat luas dalam hal berbahasa. Sementara itu, masyarakat umum diharapkan untuk memperlihatkan sikapnya yang positif terhadap bahasa Indonesia.

MENUMBUHKAN SIKAP BERBAHASA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI*

Beberapa Masalah Pemakaian

Sampai saat ini kita sering membaca di surat kabar berita tentang akan diselenggarakannya berbagai jenis pameran, seperti pameran perumahan, produk elektronik, dan furnitur. Penyelenggaraannya di *Jakarta Convention Center*.

Mengapa berita seperti di atas ditampilkan sebagai contoh untuk mengawali tulisan ini? Apakah karena ada sesuatu yang istimewa, menarik, atau bahkan salah? Contoh itu memang istimewa dan menarik, tetapi mengandung "kesalahan" gara-gara *Jakarta Convention Center*. Kita tentu (atau mudah-mudahan) masih ingat bahwa Presiden Soeharto menandatangani "Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar" pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1995. Pada upacara ini nama *Jakarta Convention Center* diubah menjadi *Balai Sidang Jakarta*. Peristiwa itu secara simbolik mengawali gerakan pengindonesiaan nama dan kata asing yang selama ini kian merebak digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama dan iklan/reklame. Sang wartawan penulis berita itu mustahil tidak mengetahuinya. Namun, yang dia lakukan dalam mengemban profesinya ialah bukan menggunakan dan memasyarakatkan nama *Balai Sidang Jakarta*, melainkan makin mengukuhkan dan mengekalkan nama asingnya.

Berikut adalah contoh lain mengenai pengindonesiaan nama/kata asing dalam bidang properti: kawasan permukiman yang semula, misalnya, bernama *Astina Resort* kemudian diubah menjadi *Astina Resor*. Perubahan *resort* menjadi *resor* sebenarnya sudah sesuai. Dalam buku *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995), *resort* dipadankan dengan *sanggra-*

*Makalah Bulan Apresiasi Budaya, Mataram, 21--25 Juli 1997

loka atau *resor*. Dengan memperhatikan pola urutan kata yang lazim disebut hukum D-M (Diterangkan-Menerangkan), *Astina Resort* seharusnya menjadi *Sanggraloka Astina* atau *Resor Astina*. Dengan demikian, *Astina Resor* jelas bertentangan dengan hukum D-M tersebut.

Masih sering digunakannya kata seperti *marketing*, *security* dan *tailor* alih-alih *pemasaran*, *keamanan*, dan *penjahit*, juga dapat dijadikan tolok ukur tentang betapa masih jauhnya perjalanan yang harus ditempuh untuk "membudayakan" bahasa Indonesia di kalangan masyarakat penutur bahasa Indonesia sendiri. Dampak yang tidak menguntungkan dari pemakaian bahasa asing yang makin tidak terkendali itu boleh dikatakan memperlihatkan tingkat kegawatan yang sama dengan makin bertambah suburnya akronim yang dari waktu ke waktu pertumbuhannya "sangat mengagumkan". Kata *balon* dan *jagung*, sekadar contoh, berbeda muatan maknanya dari akronim *balon* 'bakal calon' dan *jagung* 'jaksa agung'. Pasangan kata dan akronim semacam itu, kalau pertumbuhannya tetap dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian dari "pihak yang berwenang", pada saatnya nanti akan menjadi bumerang bagi keefisienan dan keefektifan bahasa Indonesia sebagai medium komunikasi verbal. Akan timbul "kemacetan komunikasi" kalau orang tidak memahami kandungan makna dari akronim yang kita gunakan. Selain itu, di sekolah murid akan makin terbebani karena dia harus mampu membedakan: kapan suatu bentuk digunakan sebagai kata (utuh) dan kapan bentuk tersebut digunakan sebagai akronim. Kalau akronim ini dibiarkan tumbuh dan berkembang secara liar, pada suatu saat nanti, entah pada generasi mana, bahasa Indonesia akan menjadi hutan belantara akronim yang dapat menyesatkan masyarakat pemakai bahasa Indonesia itu sendiri.

Dari segi kehematan berbahasa, akronim memang diperlukan. Yang sering kita lupakan ialah pengertian dasarnya, yaitu bahwa *akronim* adalah bentuk singkatan yang berupa kata dan yang dapat diperlakukan sebagai kata. Akronim *tilang* 'bukti pelanggaran', misalnya, dapat digunakan dalam bentuk *menilang*, *ditilang*, *penilang*, dan *penilangan*. Kenyataannya menunjukkan bahwa cukup banyak akronim yang tidak dikenal secara meluas, tetapi tetap digunakan. Akibatnya, tujuan utama komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat tidak mencapai sasaran. Oleh sebab itu, biarlah kalangan yang berkepentingan de-

ngan tugas-tugas keamanan saja yang mengetahui bahwa *anirat* itu 'penganiayaan berat' atau bahkan *curanmor* itu 'pencurian kendaraan bermotor'. Masyarakat umum tak perlu sama repotnya dengan anggota pramuka untuk mengingat-ingat bahwa *jumbara* bermakna 'jumpa bakti gembira'. Yang di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tak usah ikut sibuk menyebut *diklusepora* untuk 'pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga'. Akronim jenis ini harus secara ketat dibatasi ruang geraknya. Untuk itu, kelompok wartawan sangat diharapkan berfungsi sebagai penapis atau filter agar akronim yang seharusnya hanya diketahui dan digunakan oleh kalangan yang (amat) terbatas itu tidak dengan begitu saja berhamburan memenuhi kolom-kolom surat kabar setiap harinya.

Dengan alasan (atau dalih?) yang sama, yaitu demi kehematan berbahasa, bentuk ungkapan padu seperti *sesuai dengan* sudah biasa 'disunat' menjadi *sesuai*. Hampir setiap saat kita berhadapan dengan model kalimat seperti *Hal itu sesuai kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor*. Seharusnya: *Hal itu sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor*. Kejanggalan yang diakibatkan oleh 'diheimat'-nya kata *dengan* itu jelas makin terasa kalau setelah *sesuai* ditambahkan kata *sekali* atau *benar*. Rasa bahasa kita tentu tidak akan membenarkan kalimat *Hal itu sesuai sekali kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor* atau *Hal itu sesuai benar kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor*.

Dalam hal tata kalimat kita juga terkesan sudah sangat terlena dalam kebiasaan memproduksi kalimat rancu. Cobalah disimak contoh berikut. *Kepada para peserta yang masih berada di luar diharap segera masuk* lazim sekali disampaikan oleh seorang pembawa acara. *Untuk medali perunggu direbut oleh atlet Sumatera Utara* sering kita baca dalam surat kabar atau kita dengar melalui siaran berita di radio atau televisi. Contoh itu tidak memungkinkan kita dapat menjawab pertanyaan tentang siapa yang diharap segera masuk dan apa yang direbut oleh atlet Sumatera Utara. Kerancuan itu akan sirna kalau *untuk* pada contoh pertama dan *kepada* pada contoh kedua tidak digunakan: *Para peserta yang masih berada di luar diharap segera masuk* dan *Medali perunggu direbut oleh atlet Sumatera Utara*.

Sikap Bahasa

Contoh yang ditampilkan di atas sekurang-kurangnya mencerminkan mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh sebagian besar dari kita dewasa ini. Mutu pemakaian ini pada hakikatnya berkorelasi dengan tingkat kemampuan dan keterampilan kita dalam berbahasa. Akan tetapi, contoh-contoh tersebut, baik yang berkaitan dengan pemakaian bahasa asing (khususnya bahasa Inggris), keasyikan kita dalam menciptakan/menggunakan akronim, maupun dengan kekurangpedulian kita terhadap kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku, sesungguhnya mencerminkan sikap kita yang tidak atau belum positif terhadap bahasa Indonesia.

seberapa jauh sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat berdasarkan tiga macam tolok ukur, yaitu (1) kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, (2) kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dan (3) kesadaran untuk mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran ini bermuara pada apa yang tersurat dan tersirat dalam butir ketiga ikrar Sumpah Pemuda 1928, yaitu "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia".

Butir ketiga Sumpah Pemuda itu, pernyataan politik yang mencaangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (disebut juga bahasa nasional atau bahasa kebangsaan), mengandung makna bahwa kita, baik sebagai perseorangan, anggota masyarakat, maupun terutama sebagai bangsa, harus senantiasa memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan menggunakannya secara baik dan benar. Itulah sebabnya, sekurang-kurangnya sejak tahun tujuh puluhan, kita selalu diimbau untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sering diperkatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik ialah bahasa yang sesuai dengan keperluan pemakaiannya. Bahasa Indonesia lisan tidak dengan sendirinya harus sama dengan bahasa Indonesia tulis. Situasi pemakaian, dengan siapa kita berbahasa, dan tentang apa kita berbicara (dalam hal bahasa lisan) akan sangat menentukan kadar kebaikan kita dalam berbahasa. Faktor-faktor tersebut akan menentukan tidak saja bentuk dan pilihan kata serta struktur kalimat yang kita gunakan, tetapi juga akan mempengaruhi tempo dan intonasi kita dalam berbicara. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang digunakan dalam forum resmi di DPR,

misalnya, pasti jauh berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh dua orang sahabat yang secara kebetulan bertemu pada suatu kesempatan setelah sekian lama berpisah.

Yang menjadi tolok ukur bahasa Indonesia yang benar ialah tingkat kesesuaiannya dengan aturan, norma, atau kaidah kebahasaan. Kata *menyolok* pada kalimat *Warna bajunya sangat menyolok*, misalnya, jelas menyalahi kaidah yang berlaku tentang pembentukan kata. Konsonan *c* pada bentuk dasar *colok* tidak luluh kalau diberi imbuhan *me-*. Jadi, bukan *menyolok*, melainkan *mencolok* (bandingkan dengan *mencuci*, bukan *menyuci*, yang bentuk dasarnya *cuci*). Bentuk *saling kait-mengait* juga merupakan contoh kekurangcermatan berbahasa yang sering kita lakukan. Bentuk itu mengandung dua kesalahan. Pertama, *kait* dengan awalan *me-* menjadi *mengait*, bukan *mengkait* (bandingkan dengan *mengejar* yang berasal dari *kejar*). Kedua, *saling kait-mengait* pun masih memperlihatkan adanya pertumpangtindihan makna resiprokal antara *saling* dan bentuk ulang *kait-mengait*. Atas dasar itu, seyogianya kita menggunakan *saling mengait* atau *kait-mengait*.

Bentuk *mencolok* dan *mengait* sebagai pengganti *menyolok* dan *mengkait* ini sudah kita ketahui. Kesalahan yang kita lakukan boleh dikatakan karena kita sudah terbawa arus kebiasaan berbahasa masyarakat kita. Arus kebiasaan berbahasa yang sebenarnya salah itu sering disebut "salah kaprah". Apabila kita memiliki salah satu ciri dari sikap positif tersebut, yakni kesadaran untuk mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan, seharusnya kita tidak ikut "terjerumus" ke dalam kesalahkaprahan itu.

Kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dua ciri lainnya dari sikap positif, erat sekali kaitannya dengan kebiasaan sebagian anggota masyarakat kita dalam menggunakan kata/istilah asing pada saat yang bersangkutan sebenarnya sedang berbahasa Indonesia. Bagaimana reaksi Anda ketika menyaksikan lewat layar kaca dua orang "pejabat" pada kesempatan yang berbeda berbicara dengan menggunakan dua kalimat berikut?

- Hal itu *mbok* betul-betul dipersiapkan supaya *kita-kita* di lapangan *ndak confused*.
- Kalau *demand* meningkat, *automatically* jumlah persediaan barang harus ditingkatkan pula.

Pejabat yang menggunakan kalimat pertama lebih "gawat" cara berbahasanya daripada yang kedua karena selain memperlihatkan adanya interferensi bahasa daerah (*mbok, ndak*) dan bahasa Inggris (*confused*), kata bahasa Indonesia yang digunakannya (*kita-kita*) juga tidak tepat.

Pertanyaan yang timbul kemudian ialah apakah pejabat yang bersangkutan tidak tahu bahwa dalam bahasa Indonesia ada kata *bingung*, *permintaan*, dan *dengan sendirinya* atau *otomatis* sebagai pengganti *confused*, *demand*, dan *automatically*. Kemungkinan lain ialah bahwa sebenarnya yang bersangkutan mengetahuinya, tapi tetap menggunakan kata dalam bahasa Inggrisnya dengan harapan agar orang lain mempunyai kesan bahwa yang bersangkutan tampak lebih gagah, lebih terhormat, dan lebih terpelajar.

Kecenderungan yang disebutkan terakhir ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga hampir dapat dipastikan bahwa kelompok atau lapisan masyarakat menengah ke atas akan senantiasa menyelip-nyelipkan kata/istilah asing, terutama yang berasal dari bahasa Inggris, meskipun sebenarnya untuk kata/istilah asing yang digunakannya itu sudah ada padanan bahasa Indonesianya. Lambat laun makin mantaplah anggapan pada sebagian anggota masyarakat kita bahwa bahasa Inggris memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Akibatnya, hampir di mana-mana, terutama di kota-kota besar, kita menjumpai tulisan dalam bahasa Inggris yang isinya bermacam-macam: nama perusahaan, nama gedung, nama kawasan permukiman, iklan, dan lain-lain.

Pemakaian bahasa Inggris itu tidak terbatas hanya pada nama diri perusahaan, misalnya, tetapi juga penjelasan/keterangan mengenai jenis usahanya pun ditulis pula dalam bahasa Inggris. Sekadar contoh: *beauty salon*, *shopping center*, dan *after-sales service* jauh lebih mudah kita temukan daripada *salon kecantikan*, *pusat belanja*, dan *layanan pascajual*.

Nama kawasan permukiman dengan bahasa Inggris secara tidak langsung mendidik dan mengarahkan calon pembeli/penghuninya untuk tidak menggunakan "akal sehat". Bukankah mereka diharapkan lebih mementingkan dan mengutamakan kementerengan nama dalam bahasa Inggris dari kawasan permukiman yang diminatinya daripada mempertimbangan mutu bangunan, fasilitas yang disediakan, dan keasrian lingkungannya?

Pemakaian bahasa Inggris yang makin "meriah" itu juga sering dihubungkan dengan dua hal yang akan lebih tepat disebut "dalih", yaitu untuk mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keperluan pembangunan dan untuk lebih memberikan berbagai kemudahan bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Benarkah demikian? Meskipun belum pernah dilakukan studi perbandingan yang layak mengenai hal itu, contoh berikut rasanya patut sekali dipertimbangkan.

Ada beberapa negara di Asia, tanpa harus menyebutkan namanya, yang penguasaan bahasa Inggris di kalangan warga masyarakatnya dikenal cukup meluas. Namun, negara-negara itu tidak pernah disebut-sebut sebagai contoh keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi dan industrinya. Sebaliknya, Jepang dan Korea Selatan sekarang ini selalu dijadikan contoh keberhasilan pembangunan ekonomi dan industri, padahal rakyat kedua negara itu terkenal sangat fanatik dalam mempertahankan tradisi budaya dan bahasanya.

Mengenai pemakaian bahasa Inggris untuk keperluan wisatawan asing agar berbondong-bondong datang ke Indonesia? Kita tahu bahwa wisatawan asing yang datang ke Thailand, terutama ke Bangkok, jumlahnya seringkali membuat kita "iri", padahal di sana jangankan bahasanya, tulisannya pun masih menggunakan huruf setempat (yang sangat jauh perbedaannya dengan huruf Latin).

Kegandrungan kita pada segala hal yang memungkinkan digunakan-nya kata/istilah dari bahasa Inggris itu telah menumbuhkan satu jenis "penyakit" baru, yaitu "biar salah asal berbahasa Inggris". Gejala penyakit baru itu terlihat pada tiga contoh berikut. Pertama, *Economic and Bisnis Center* terpampang pada sebuah papan nama perusahaan di Jakarta. Kedua, di luar Jakarta ada sebuah tempat kursus komputer yang namanya *Profesional Computer College*. Ketiga, *no think to loose* tertulis pada sebuah surat kabar daerah yang menurunkan berita tentang akan berlangsungnya pertandingan tenis antara Michael Chang dan seorang petenis Indonesia. Dengan ungkapan bahasa Inggris itu si wartawan hendak menyatakan bahwa petenis Indonesia tidak perlu menanggung beban mental apa-apa karena lawan yang akan dihadapinya itu tingkat permainannya sudah sangat "canggih". Penyakit "biar salah asal berbahasa Inggris" itu terlihat pada penulisan *bisnis*, *profesional*, dan *no think to*

loose yang maksudnya masing-masing adalah *business*, *professional*, dan *nothing to loose*.

Masih sangat banyak contoh yang dapat diketengahkan sehubungan dengan masih memperihatkannya pandangan dan sikap sebagian anggota masyarakat kita terhadap bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan (butir ketiga Sumpah Pemuda 1928) maupun sebagai bahasa negara (Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945). Untuk itu, upaya **pembinaan** perlu diupayakan secara terus-menerus agar masyarakat kita secara berangsur-angsur memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Pembinaan Bahasa

Menumbuhkan sikap positif bahasa Indonesia yang merupakan tujuan upaya pembinaan itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa kita dilarang menggunakan bahasa asing. Kita bahkan dianjurkan untuk menguasai dan memanfaatkan bahasa asing untuk (1) memperlancar komunikasi dengan bangsa lain, (2) menyerap informasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk keperluan pembangunan nasional, dan (3) memperluas wawasan dan cakrawala pandang bangsa kita (GBHN 1993). Hal itu berarti bahwa kalau selama ini kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pada saatnya yang tepat kita pun dituntut untuk menguasai bahasa asing (terutama bahasa Inggris) serta menggunakannya secara baik dan benar pula.

Upaya pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dilakukan melalui berbagai jalur dengan memperhatikan kelompok sasaran yang strategis. Ada penyuluhan bagi para guru, baik guru bahasa Indonesia maupun guru non-bahasa Indonesia; ada penyuluhan untuk para wartawan, baik dari media massa cetak maupun elektronik; ada penyuluhan untuk para mubalig; bahkan ada pula penyuluhan yang khusus diadakan bagi mereka yang terlibat dalam bidang iklan. Para guru, wartawan, mubalig, dan pengelola iklan ini merupakan kelompok-kelompok profesi yang pemakaian bahasa Indonesianya sering dijadikan contoh oleh masyarakat kita.

Melalui RRI dan TVRI program nasional dilakukan Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia sekali seminggu. Siaran ini mendapat perhatian

yang cukup luas, terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan para peminat bahasa yang lain. Selain itu, karena GBHN 1993 mengamanatkan agar upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat, penyuluhan yang dilakukan melalui kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Pemerintah Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Para pejabat teras di lingkungan Pemda Tingkat I itu merupakan kelompok sasaran yang diprioritaskan. Demikian pula halnya dengan para pejabat teras departemen dan lembaga-lembaga tinggi negara di tingkat pusat. Kegiatan penyuluhan atau pemasyarakatan bahasa Indonesia itu tidak hanya dilakukan selama Bulan Bahasa pada bulan Oktober, tetapi juga senantiasa diupayakan agar kegiatan tersebut berlangsung sepanjang tahun.

Dalam hal penyuluhan itu dilakukan di kantor/instansi pemerintah, perlu pula diperhatikan tingkat dan mutu penguasaan dan keterampilan kelompok sasaran dalam berbahasa Indonesia. Salah satu indikatornya ialah latar belakang pendidikan. Menurut catatan tanggal 31 Maret 1993, dari jumlah PNS (pegawai negeri sipil) sebanyak 4.009.347 orang, yang paling banyak ialah lulusan SLTA (58%), kemudian lulusan SD (14%), disusul oleh lulusan SLTP dan akademi (masing-masing 10%), dan yang paling sedikit ialah lulusan S1, S2, dan S3 (8%).

Pengembangan Bahasa

Kalau upaya pembinaan bahasa, seperti yang telah disebutkan, bertujuan agar masyarakat memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia dan dapat menggunakannya secara baik dan benar, upaya pengembangan bahasa dilakukan agar bahasa Indonesia tetap mantap dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan: pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, pemerintahan, hukum, dan sebagainya. Dengan demikian, kalau sasaran pembinaan ialah para pemakai, maka sasaran pengembangan adalah bahasa Indonesianya itu sendiri sebagai sistem sandi sehingga bahasa Indonesia siap digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang paling kompleks sekalipun. Untuk itu, bahasa Indonesia dituntut untuk memenuhi dua persyaratan pokok, yaitu (1) memiliki tata bahasa yang mantap dan

(2) khazanah perbendaharaan kata dan peristilahannya luas dan lengkap.

Mengenai hal yang disebutkan terakhir, sejak tahun 1972 selalu diupayakan penyusunan padanan istilah dalam bahasa Indonesia untuk berbagai bidang ilmu. Yang menjadi prioritas utama ialah peristilahan untuk empat bidang ilmu dasar, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sampai saat ini telah berhasil disusun 160.092 istilah dari 107 bidang/subbidang ilmu. Kegiatan penyusunan istilah ini dilakukan oleh para pakar/ahli dari berbagai perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia melalui wadah kerja sama kebahasaan antarnegara yang disebut Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia).

Kosakata bahasa Indonesia dari waktu ke waktu memperlihatkan peningkatan yang menakjubkan. Hal ini antara lain terlihat pada jumlah kata yang termuat dalam kamus. *Kamus Indonesia* susunan E.St. Harahap (1951) memuat 21.119 kata. Berikutnya *Kamus Modern Bahasa Indonesia* oleh St. Moh. Zain (1954) sudah memuat 39.738 kata. Tahun 1976 terbit *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan W.J.S. Poerwadarminta dengan 48.004 kata. Setelah itu, ada *Kamus Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1983) dengan 55.406 kata. Akhirnya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi I susunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1988) menampilkan 62.116 kata, sementara pada edisi keduanya (1991) terdapat 73.024 kata. Jumlah kosakata ini akan terus bertambah secara lebih cepat, terutama karena makin pesatnya kemajuan dan perkembangan dalam teknologi informasi.

Kosakata bahasa Indonesia yang kian hari kian bertambah itu diakibatkan oleh masuknya kata/istilah baru dari bahasa daerah dan bahasa asing. Kata/istilah "pendatang baru" itu harus tunduk pada 'aturan main' yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata *grobak* dan *clurit* yang berasal dari bahasa daerah, misalnya, menjadi *gerobak* dan *celurit* dalam bahasa Indonesia. Demikian pula contoh kata Indonesia *televisi*, *departemen*, dan *management*. Aturan atau kaidah mengenai hal ini tercantum baik pada buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* maupun *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.

Sehubungan dengan hal itu, bahasa asing harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya kosakata bahasa nasional kita agar potensi dan daya ungkapnya makin lama makin kuat. Oleh karena

itu, dalam menghadapi ekspansi kata-kata asing ini kita harus benar-benar mampu membedakan kata-kata asing yang memang diperlukan untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia dari kata-kata asing yang tidak kita perlukan karena sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Kata seperti *direktur*, *radio*, *komunikasi*, *struktur*, dan *karier* yang berasal dari bahasa asing memang kita perlukan. Akan tetapi, untuk apa kita menggunakan *skill*, *mental*, *attitude*, *high cost*, *buyer*, dan *airport*, misalnya, kalau kita dapat mengungkapkannya dengan *keterampilan*, *sikap mental*, *biaya tinggi*, *pembeli*, dan *bandara*. Kata-kata asing jenis terakhir ini harus berani kita golongkan sebagai sampah yang hanya akan mencemari citra bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.

Catatan Penutup

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa ini perlu diupayakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kalau dinamika masyarakat pemakaian bahasa Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan tuntutan berbagai bidang kehidupan tidak dapat diimbangi oleh upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesianya, maka bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi akan selalu "ketinggalan".

Keberhasilan upaya pengembangan bahasa dapat diukur atau dapat dikuantifikasi. Adanya buku tata bahasa, kamus umum, kamus istilah, dan berbagai buku pedoman mengenai pemakaian bahasa Indonesia secara tertulis atau lisan merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan upaya pengembangan. Berbeda halnya dengan upaya pembinaan yang tingkat keberhasilannya tidak mungkin dapat diukur. Selama masyarakat kita belum memperlihatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, selama itu pula pembudayaan bahasa Indonesia belum berhasil. Hal itu berarti pula bahwa upaya pembinaan masih harus terus dilakukan oleh semua pihak, tidak saja oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi juga oleh pihak mana saja, baik sebagai perseorangan maupun kelompok, yang merasa terpenggil untuk "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia".

Sejak Presiden Soeharto mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada tanggal 20 Mei 1995, bersamaan dengan

saat pencanangan Gerakan Disiplin Nasional, sejak itu pula terlihat adanya titik-titik terang yang menggembirakan karena bahasa Indonesia mulai menampakkan dirinya sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Mudah-mudahan perubahan papan nama, papan petunjuk, dan iklan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia yang kita saksikan sekarang ini benar-benar mencerminkan mulai tumbuh dan makin mantapnya sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Hal itu berarti pula kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang dan perwujudan jati diri bangsa akan semakin mantap.

BAHASA INDONESIA DAN PERILAKU BERBAHASA*

1. "Bahasa Indonesia sekarang ini sedang sakit. Ia tidak lagi dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang dapat diandalkan, yang efektif". Pernyataan itu diungkapkan oleh seorang wartawan di sela-sela kegiatan Bulan Bahasa beberapa tahun yang lalu. Seminggu yang lalu, dalam suatu pertemuan yang membahas topik pengajaran bahasa Indonesia, seorang mahasiswa pascasarjana jurusan bahasa asing mengemukakan hal yang hampir sama, tetapi dengan cara dan nada yang berbeda. Dikatakannya bahwa bahasa Indonesia berjalan di tempat alias tidak maju-maju sehingga, menurut yang bersangkutan, bahasa persatuan kita itu makin ketinggalan zaman. Bukankah kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih-lebih nanti pada era globalisasi, memperlihatkan peningkatan yang makin cepat?
2. Baik sang wartawan ataupun si mahasiswa sama-sama bertolak dari sudut pandang yang keliru tentang bahasa Indonesia. Akibatnya, timbullah kerancuan dalam penilaian seperti yang digambarkan di atas. Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi verbal harus dibedakan dari kemampuan seseorang di dalam menggunakannya secara tertulis ataupun lisan. Dengan demikian, yang sedang sakit dan berjalan di tempat itu adalah (para) pemakainya, bukan bahasa Indonesianya. Se-jauh yang menyangkut bahasa Indonesianya, selama terus diupayakan agar tata bahasanya tetap mantap, kosakata berikut peristilahannya tetap kaya dan lengkap, serta daya ungkapnya tetap dikembangkan, dan selama dengan bahasa Indonesia yang seperti itu—tata bahasanya mantap, kosakata dan peristilahannya lengkap, dan daya ungkapnya tinggi—orang dapat mengungkapkan berbagai gagasan, konsep, atau

* Makalah "Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan Budaya", Universitas Gunadarma, Depok, 19 Oktober 1999.

pandangan dalam segala bidang kehidupan, mulai dari yang singkat dan sederhana sampai kepada yang rumit dan kompleks, maka selama itu pula bahasa Indonesia tetap merupakan sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien.

3. Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia para pemakainya sangat ditentukan oleh jenis jawaban yang dapat diberikan terhadap ketiga pertanyaan berikut. Seberapa jauh perangkat aturan atau norma kebahasaan yang telah dikodifikasi dalam dokumen yang bernama *tata bahasa* itu kita ketahui dan kita kuasai? Seberapa jauh kita memahami dan mengakrabi khazanah kosakata dan peristilahan yang telah terekam di dalam dokumen yang bernama *kamus*? Dalam hal pengembangan daya ungkap, seberapa jauh upaya yang telah kita lakukan agar bahasa yang kita gunakan benar-benar efektif? Kalau jawaban terhadap ketiga pertanyaan itu nadanya "membesarkan hati", maka bolehlah dikatakan bahwa tingkat kemampuan berbahasa Indonesia kita sekurang-kurangnya telah memadai. Sebaliknya, apabila jawaban yang dapat kita berikan terhadap ketiga pertanyaan itu masih berada pada tingkat "memprihatinkan" sehingga kita merasa gagal tidak dapat mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kemudian kita memberikan penilaian seperti yang dicontohkan—bahwa bahasa Indonesia sedang sakit atau berjalan di tempat—, maka sesungguhnya penilaian kita itu ibarat kata peribahasa *buruk muka cermin dibelah* atau *awak yang tidak pandai menari dikatakan lantai terjungkit*.
4. *Kemampuan atau keterampilan* berbahasa sangat bersifat individual, bergantung pada pengetahuan tata bahasa dan penguasaan kosakata/peristilahan masing-masing. Latar belakang pendidikan dan minat seseorang terhadap bahasa merupakan faktor pendukung keterampilan berbahasa. Selain itu, keterampilan berbahasa ini akan ditentukan mutunya oleh seberapa jauh kita berupaya menerampilkani diri dalam menggunakan bahasa lisan atau tulis. Makin sering kita berbicara, maka makin terampililah kita menggunakan bahasa lisan. Makin sering kita menulis, maka makin terampililah kita dalam menggunakan

bahasa tulis. Upaya menerampilkkan diri dalam berbahasa itu sekaligus berarti pula meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Mutu pemakaian yang meningkat, seperti sudah disebutkan, menggambarkan dapat digunakannya bahasa secara efektif. Penggunaan bahasa secara efektif hanya dimungkinkan kalau bahasa yang bersangkutan memiliki daya ungkap yang tinggi. Meningkatkan daya ungkap bahasa ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Hanya mereka yang benar-benar sudah terampil dan berpengalaman, melalui berbagai kreasi, inovasi, dan eksperimennya dalam pemakaian bahasa, daya ungkap suatu bahasa dapat dikembangkan atau ditingkatkan.

5. Kalau dihubungkan dengan *perilaku berbahasa*, kemampuan atau keterampilan itu merupakan salah satu komponen utamanya. Komponen lainnya ialah *sikap*. Kalau kita memiliki *kebanggaan* dan *kesetiaan* terhadap bahasa Indonesia yang ditunjang oleh *kesadaran* akan norma atau aturan bahasa, hal itu menengarai bahwa kita memiliki *sikap positif* terhadap bahasa Indonesia. Aspek-aspek yang berkenaan dengan sikap itu boleh dikatakan merupakan faktor internal dari perilaku berbahasa seseorang. Di dalam kenyataan berbahasa faktor internal itu berinteraksi dengan sejumlah faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat berupa pola dan praktik berbahasa dari orang-orang yang biasa berkomunikasi dengan masyarakat luas. Kelompok pemakai bahasa yang secara potensial dapat dijadikan model atau contoh berbahasa ini mungkin berperan sebagai *pejabat pemerintah*, *pemuka masyarakat*, *politisi*, atau bahkan *tokoh agama*. Meskipun aktivitas berbahasa ini tidak berlangsung secara bersemuka, kemajuan teknologi informasi sekarang ini membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat luas untuk mengakses pada peristiwa berbahasa itu. Biasanya yang lazim dijadikan contoh adalah gaya bahasa dan pilihan kata atau diksinya, termasuk ungkapan klise yang sebenarnya sangat bertentangan dengan upaya pengembangan daya ungkap bahasa itu sendiri.
6. Dari keempat kelompok pemakai bahasa yang diasumsikan berpengaruh terhadap perilaku berbahasa masyarakat luas itu, tampaknya

yang paling sesuai dengan tema seminar ini, adalah pemakai bahasa yang tergolong sebagai pejabat pemerintah dan politisi. Semasa pemerintahan Orde Baru, misalnya, pendekatan yang ditekankan pada masalah keamanan dan ketertiban dalam pembangunan ekonomi ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan demokrasi pada umumnya dan pada kehidupan politik nasional khususnya. Bahasa yang digunakan pada masa Orde Baru itu dengan demikian diarahkan sedemikian rupa untuk menciptakan mekanisme yang pada satu pihak mampu memaksimalkan produktivitas ekonomi, tetapi pada pihak lain mampu pula meminimalkan kemungkinan terjadinya berbagai konflik sosial. Dengan perkataan lain perilaku berbahasa masyarakat Indonesia harus ditata dan diarahkan untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam sistem politik. Perilaku berbahasa yang didasarkan pada pendekatan seperti itu melahirkan dan menumbuhkan apa yang dikenal sebagai *eufemisme*, semacam gaya bahasa yang bertujuan menghalus-haluskan ungkapan sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar karena dianggap merugikan atau tidak menyenangkan.

7. Penghalusan bahasa yang sudah sangat memasyarakat pada masa Orde Baru itu mengakibatkan kecenderungan yang kuat bahwa pemakaian bahasa Indonesia mengalami proses *kramanisasi* yang ditandai oleh bahasa yang halus dan enak didengar serta terpeliharanya *jarak* antara pembicara dan masyarakat pendengar. Pemakaian kata seperti *rawan pangan*, *subversif*, *stabilitas nasional*, *bersih lingkungan*, *diamankan*, *dirumahkan*, dan *kesalahan prosedur* sengaja diciptakan oleh para pemakai bahasa yang sedang berkuasa pada saat itu dengan makna yang diinginkannya. Masyarakat luas pemakai bahasa yang lain tidak dibenarkan memberikan penafsiran yang berbeda dari konsep dan kandungan makna yang telah mereka tentukan sehubungan dengan pemakaian kata-kata yang dicontohkan tersebut. Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi adalah semacam *hegemoni makna* dalam pemakaian bahasa Indonesia. Dilihat dari perkembangan bahasa yang seharusnya berlangsung secara wajar dan alamiah yang semata-mata didasarkan pada kesepakatan di antara para pemakainya,

pendekatan penguasa dalam hal pemakaian bahasa yang melahirkan kramanisasi dan hegemoni makna itu jelas sangat merugikan.

8. Contoh di atas memperlihatkan bahwa perilaku berbahasa masyarakat sangat dipengaruhi oleh bidang di luar bahasa itu sendiri. Pemakaian bahasa dalam era reformasi sekarang justru memperlihatkan hal yang sebaliknya. Gaya bahasa yang menjurus ke arah kramanisasi sedapat mungkin dihindari, bahkan cenderung diharamkan. Akibatnya, meskipun terdengar kasar, kalau kata yang dipilih sudah dianggap tepat, kata tersebut harus tetap digunakan. Hal itu sejalan dengan semangat reformasi yang di dalam segala hal menuntut keterbukaan dan transparansi. Dengan perkataan lain, setiap kata yang digunakan haruslah sesuai dengan maknanya yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa Indonesia secara keseluruhan. Makna kata yang demikian sudah terekam di dalam kamus.
9. Selain perbedaan yang sangat mencolok dalam hal perilaku berbahasa antara zaman Orde Baru dan Orde Reformasi seperti yang telah dikemukakan di atas, di antara keduanya ada pula persamaannya, yaitu masih tingginya kecenderungan untuk mengutamakan pemakaian kata atau istilah asing, alih-alih kata atau istilah Indonesia. Kalau kecenderungan itu hanya menyangkut kata/istilah asing yang belum ada atau tidak dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, hal tersebut dapat dengan mudah kita pahami. Akan tetapi, kalau yang digunakan dalam konteks berbahasa Indonesia itu adalah kata/istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau yang dapat dengan mudah dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, hal ini benar-benar patut kita catat sebagai cacat yang harus segera diperbaiki. Kata seperti *voting*, *one man one vote*, *power sharing*, dan *bargaining position* adalah kata-kata asing yang dapat dengan mudah dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kenyataannya menunjukkan bahwa kata-kata tersebut masih digunakan oleh masyarakat pemakai, termasuk dan terutama oleh para politisi yang menjadi anggota DPR/MPR. Sementara itu, contoh tambahan perlu disebutkan sehubungan dengan kata *interupsi*. Kata itu digunakan oleh seseorang

di dalam sebuah forum pertemuan resmi yang ingin menyela atau segera mendapat giliran berbicara ketika pada saat tersebut sedang ada orang lain yang tengah berbicara. Yang patut disesalkan adalah karena kata itu cenderung digunakan dalam pengertian yang berbeda dari makna asalnya.

10. Paparan singkat di atas mencoba memperlihatkan bahwa perilaku berbahasa seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dipengaruhi tidak saja oleh faktor internal dari pemakai bahasa itu sendiri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berasal dari berbagai bidang kehidupan di luar masalah kebahasaan. Yang paling dominan dari faktor eksternal ini adalah perilaku berbahasa kelompok pejabat pemerintah dan para politisi. Selama pemakaian bahasa oleh kelompok ini tidak memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi pemakaian bahasa Indonesia secara umum, maka selama itu pula cara berbahasa kelompok tersebut dapat diteladani. Sebaliknya, yang perlu dan harus dicermati adalah jangan sampai cara berbahasa kelompok tersebut akan merugikan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Untuk itu, semua pihak perlu benar-benar memahami dan menyadari makna yang sesungguhnya dari butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berupa pernyataan tekad untuk "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia".

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA MENUJU ERA GLOBALISASI*

1. Judul makalah yang semula diminta Panitia adalah "Pembakuan Bahasa Indonesia Menuju Era Globalisasi". Hubungan pembakuan dengan era globalisasi menyiratkan berbagai langkah dan upaya dalam konteks pengembangan bahasa. Kalau yang dibicarakan hanya ihwal pengembangan bahasa, padahal era globalisasi sebagaimana yang dimaksud menghendaki pula upaya pementapan sikap masyarakat pemakainya, maka masa-lah pembinaan bahasa perlu juga dikemukakan. Itulah sebabnya makalah ini disajikan dengan judul "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Menuju Era Globalisasi".

2. Selama beberapa tahun terakhir ini era globalisasi hampir selalu dijadikan topik pembicaraan, terutama oleh kelompok menengah ke atas. Pada umumnya era globalisasi itu hanya dihubungkan dengan bidang per-ekonomian dan perdagangan. Dalam pengertian itu yang dipermasalahan adalah perdagangan bebas yang menyangkut lalu-lintas barang dan jasa, termasuk lalu-lintas (anggota) kelompok profesional yang terlibat (langsung) dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan proses dihasilkannya barang dan jasa itu. Ini berarti bahwa era perdagangan bebas itu juga ditandai oleh lalu-lintas sumber daya manusia (SDM).

Pada saat era globalisasi itu sudah menjadi kenyataan nanti, pada abad ke-21 atau milenium ketiga, batas-batas geopolitis yang selama ini dipandang sebagai ciri dan sekaligus penyekat suatu negara, dapat dipas-tikan akan makin kabur, sesuai dengan tingkat kepesatan lalu-lintas bar-ang dan jasa serta SDM antarnegara.

Dalam derap dan dinamika arus globalisasi yang demikian, amatlah wajar apabila kita mulai mempertanyakan tentang seberapa jauh potensi

* Makalah Seminar Sehari MGMP Bahasa Indonesia SLTP dan SMU se-Jawa Timur, Surabaya, 17 November 1997.

yang kita miliki guna mempertahankan kedudukan dan peran bahasa Indonesia. Kalau disederhanakan, pertanyaan itu menjadi: Dapatkah bahasa Indonesia bertahan sebagai lambang jati diri bangsa?

3. Ada jawaban yang sudah dapat dipastikan terhadap pertanyaan itu, yakni bahwa era globalisasi dengan ruang lingkup konsep dan muatan makna yang demikian pasti akan berpengaruh terhadap bahasa Indonesia. Pemberian pengaruh itu bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Dampak yang ditimbulkannya bisa positif atau negatif. Dampak positif pasti memberikan keuntungan dan dampak negatif bagaimanapun hanya akan menimbulkan kerugian bagi kelangsungan hidup bahasa Indonesia.

Apa yang akan terjadi pada bahasa Indonesia pada era globalisasi itu sesungguhnya sudah dapat diramalkan. Dengan mudah kita dapat menarik berbagai pelajaran berharga dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Setelah dikukuhkan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung (dalam arti harus dihormati dan digunakan dengan sebaik-baiknya), bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 UUD 1945.

Semboyan atau imbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesungguhnya bersumber pada butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut. Tahun 1928 dengan demikian merupakan tonggak sejarah yang mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tonggak sejarah lainnya bertariikh tahun 1945 karena melalui Pasal 36 UUD 1945 kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan lagi sebagai bahasa negara. Kedudukan yang disebutkan terakhir ini bahkan dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang dan jenis pendidikan. Mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal itu selalu tercantum dalam setiap GBHN, baik dalam sektor pendidikan maupun kebudayaan. Menurut GBHN 1993, secara eksplisit dinyatakan bahwa upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat antara lain untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam GBHN yang sama juga dikemukakan bahwa penggunaan kata atau istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Namun, dalam kenyataannya imbauan itu tidak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya ialah masih adanya pandangan pada sebagian anggota masyarakat kita yang menganggap bahasa asing lebih bergengsi karena memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Masalah inilah yang melatarbelakangi dan mendorong Kepala Negara untuk mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada tanggal 20 Mei 1995. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan itu ialah ditertibkannya pemakaian bahasa asing di tempat-tempat umum dan menggantinya dengan bahasa Indonesia.

Bahasa Melayu, yang pada tahun 1928 disepakati oleh para pemuda yang mewakili hampir seluruh kelompok etnis di Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia, juga sejak awal pertumbuhannya sudah memperlihatkan perkembangan yang dinamis, terutama dari segi pengayaan kosakatanya. Disepakatinya pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia itu oleh Taufik Abdullah (dalam Latif dan Idi Subandy (Ed.), 1996:360) dipandang sebagai proses kimia kebahasaan yang unik karena bahasa Melayu sebagai bahasa non-mayoritas telah disepakati menjadi bahasa nasional tanpa saingan dan bahkan tanpa perdebatan.

Mengenai perkembangan bahasa Melayu itu sendiri, dapat disebutkan, misalnya, bahwa pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu sudah mulai memasuki unsur-unsur bahasa Sansekerta dan pada zaman kerajaan Malaka yang memperkaya kosakata bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Arab. Bahwa pada zaman kerajaan Malaka kedudukan dan peran bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca* di kawasan Asia Tenggara, hal itu diakui oleh seorang peneliti Belanda, Jan Huygen van Linschoten, yang menyatakan bahwa "bahasa Melayu di Asia Tenggara tak kurang pentingnya dalam fungsi komunikasi antarbangsanya daripada bahasa Prancis di Eropa Barat". "...setiap orang yang ingin ikut dalam kehidupan antarbangsa di kawasan itu mutlak perlu mengetahui bahasa Melayu."

Mengenai hal itu, Teeuw (1994:251-252) yang selanjutnya juga mencatat bahwa *Kamus Bahasa Melayu-Belanda* yang disusun oleh Frederick de Houtman, seorang pedagang Belanda, diterbitkan tahun

1603. Kamus itu kemudian diterbitkan pula dalam bahasa Latin dan beberapa bahasa Eropa lain. Menurut Teeuw, hal itu "menjadi bukti pertama yang sangat meyakinkan tentang prestise bahasa Melayu dalam dunia antarbangsa di zaman modern."

4. Dengan memperhatikan secara cermat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sejak bahasa itu masih bernama bahasa Melayu sampai menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (Bab XV Pasal 36 UUD 1945), dapatlah disimpulkan bahwa bahasa persatuan dan bahasa negara kita itu telah berhasil menjalankan peran dan memenuhi fungsinya. Pada kurun waktu 1928--1945 bahasa Indonesia telah berhasil menumbuhkan dan memelihara semangat persatuan di antara seluruh kelompok etnis yang ada sehingga bangsa Indonesia dapat menyatakan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang merdeka di sebuah negara yang berdaulat. Alat komunikasi yang digunakan oleh para pemimpin dan pejuang kemerdekaan (dalam arti yang luas) adalah bahasa Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam UUD 1945 adalah bahasa Indonesia. Kesemuanya itu dengan jelas menggambarkan keberhasilan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Setelah proklamasi 1945 peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara amatlah menonjol dan dominan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Administrasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan peri kehidupan bernegara dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan nasional--kebudayaan nasional yang sudah pasti tidak hanya menyangkut kebudayaan kelompok etnis tertentu--juga dilakukan lewat pemanfaatan bahasa Indonesia. Karena pada umumnya konsep-konsep yang berhubungan dengan iptek modern terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia juga telah terbukti berperan secara efektif dan efisien tidak saja dalam menyebarluaskan (antara lain melalui penerjemahan dan penyaduran), tetapi juga dalam upaya lebih meningkatkan dan mengembangkan bidang-bidang ilmu yang tergolong iptek modern itu (antara lain melalui penu-

lisan buku teks dan karya-karya ilmiah di lembaga pendidikan tinggi, seperti skripsi, tesis, dan disertasi). Sehubungan dengan masalah kebudayaan yang disinggung di atas, Pasal 32 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" yang penjelasannya adalah sebagai berikut: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Sastra Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia dengan demikian menjadi salah satu komponen utama yang perlu dan harus pula "diperhatikan" oleh Pemerintah.

5. Keberhasilan bahasa Indonesia dalam memenuhi peran dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara itu sangat erat berkaitan dengan dua hal yang masing-masing dapat disebut--sekadar penamaan karena tidak didasarkan pada kriteria terminologis tertentu--masalah teknis dan masalah prinsip. Masalah teknis berhubungan dengan hal kebahasaan, sedangkan masalah prinsip dengan hal sikap keindonesiaan.

Upaya yang harus terus-menerus dilakukan untuk masalah kebahasaan ialah upaya yang bertujuan agar bahasa Indonesia tetap dapat digunakan secara mantap sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan segala macam pandangan, gagasan, dan konsep mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai pada yang paling rumit dan kompleks--yang menyangkut berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, ada dua ukuran yang dapat digunakan. Pertama, kaidah atau norma yang tercakup dalam tata bahasa bahasa Indonesia harus mantap, menyeluruh, dan tuntas. Kedua, kosakata bahasa Indonesia, termasuk peristilahannya, harus lengkap sehingga dengan bahasa Indonesia siapa pun dapat berbicara atau menulis tentang apa saja.

Adapun masalah prinsip, yang di atas disebutkan sebagai hal yang berkenaan dengan sikap keindonesiaan, sesungguhnya bermuara pada

muatan makna kata *menjunjung* yang terdapat dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928: "Kami putera dan puteri Indonesia *menjunjung* bahasa persatuan bahasa Indonesia". Makna *menjunjung* yang dilandasi oleh sikap keindonesiaan mengisyaratkan bahwa semua warga negara Indonesia diharapkan untuk menghormati, memelihara, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sikap keindonesiaan tidak berarti bahwa kita harus menutup diri terhadap pengaruh bahasa asing. Kalau hal itu kita lakukan akan berarti bahwa kita telah membentengi bahasa Indonesia bukan dengan maksud agar bahasa persatuan dan bahasa negara itu tetap terjaga ciri keasliannya, melainkan agar bahasa Indonesia tetap miskin (kosakatanya). Akibatnya akan lebih parah, yaitu bahwa bahasa Indonesia tidak akan mampu berperan sebagai bahasa negara dengan sebaik-baiknya karena, misalnya, kita tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam penyebaran dan pengembangan iptek modern. Yang harus diupayakan ialah agar bahasa Indonesia itu sekaligus memenuhi tuntutan teknis kebahasaan (tata bahasanya mantap dan kosakata/peristilahannya lengkap) dan tuntutan untuk tetap bersikap keindonesiaan di dalam menerima pengaruh-pengaruh yang berasal dari bahasa asing itu. Hal itu jelas mengisyaratkan bahwa dalam hal upaya memperkaya kosakata/peristilahan bahasa Indonesia, misalnya, kita harus terbuka, tetapi selektif: terbuka untuk pengaruh yang benar-benar dapat memperkaya, selektif untuk pengaruh yang dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi citra bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.

6. Kalau ditinjau dari segi pembinaan dan pengembangan bahasa, upaya pembinaan berhubungan dengan masalah sikap keindonesiaan dan upaya pengembangan dengan masalah teknis kebahasaan/kesastraan. Di dalam garis-garis haluan kebahasaan yang telah sepakati selama ini (lihat Halim (Ed.), 1976 dan Moeliono, 1985) terlihat bahwa upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia perlu dilakukan secara berencana, teratur, dan terarah. Upaya seperti itu dapat dikaitkan dengan pandangan Soedjatmoko (dalam Latif dan Idi Subandy (Ed.), 1996:184) yang merumuskan tiga buah pertanyaan: "1. Sampai di mana bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa persatuan? 2. Sampai di mana bahasa Indonesia

berhasil menjadi wahana modernisasi kebudayaan, dan khususnya berhasil menjadi alat penguasaan dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi? 3. Sampai di mana bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat?"

Apabila kita berhasil dengan baik dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dengan pengembangan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, rasanya tidak ada alasan untuk bersikap pesimistis dalam memandang kedudukan dan peran bahasa Indonesia dalam era globalisasi nanti.

PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMBINAAN BAHASA INDONESIA⁷

1. Pengantar

Fungsi utama bahasa ialah sebagai alat komunikasi dan alat berpikir. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia dapat saling berhubungan dengan sesamanya, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sebagai alat berpikir memungkinkan seseorang dapat mengembangkan berbagai macam gagasan tentang bidang-bidang kehidupan yang dihadapinya.

Komunikasi akan berlangsung secara efektif apabila para pelaku komunikasi yang bersangkutan menggunakan bahasa secara efektif pula. Bahasa yang dapat digunakan secara efektif, baik untuk keperluan komunikasi maupun dalam rangka proses berpikir, menggambarkan bahwa bahasa tersebut telah memiliki tingkat kemantapan yang tinggi.

Tingkat keefektifan bahasa sebagai sarana komunikasi berkorelasi dengan tingkat kemantapan bahasa yang bersangkutan sebagai suatu sistem yang mencakupi keseluruhan pola dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Selain itu, seberapa luas khazanah perbendaharaan katanya juga merupakan faktor yang sangat menentukan. Makin beragam dan meningkatnya bidang kehidupan yang menjadi ranah pemakaian bahasa pada gilirannya akan mengisyaratkan bahwa keluasan khazanah perbendaharaan kata yang dimaksudkan harus dilengkapi pula dengan perangkat peristilahan yang diperlukan.

Kemantapan bahasa sebagai sarana komunikasi seharusnya mencerminkan kemantapan bahasa sebagai alat berpikir. Seberapa jauh kedua jenis kemantapan itu berkorelasi akan sangat bergantung kepada manusia pelakunya. Uraian pada tulisan ini dikemukakan berdasarkan asumsi bahwa bahasa yang dapat digunakan secara mantap sebagai alat komunikasi

⁷ Makalah ini telah disajikan pada Seminar Nasional VI Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) tanggal 10--12 Desember 1996 di Bandung.

dan alat berpikir dapat memberikan dampak yang positif bagi upaya peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia.

2. Kemantapan Bahasa dan Kemantapan Berbahasa

Kemantapan bahasa perlu dibedakan dari kemantapan berbahasa. Yang secara singkat telah disinggung lebih banyak berkenaan dengan kemantapan bahasa. Adapun kemantapan berbahasa harus dilihat dari sisi para pemakai (bahasa)-nya. Untuk melihat perbedaan semacam itu diperlukan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengamati tingkat kemantapan tersebut. Dengan perkataan lain, yang perlu disimak lebih lanjut ialah faktor apa yang mempengaruhi kemantapan bahasa dan faktor apa pula yang turut menentukan kemantapan berbahasa.

Dasar pemikiran yang telah dikemukakan dapat digunakan untuk menjawab kedua jenis pertanyaan itu. Oleh karena itu, secara sederhana dapatlah dikemukakan bahwa kemantapan suatu bahasa berbanding seajar dengan kemantapan bahasa yang bersangkutan sebagai alat komunikasi dan alat berpikir. Akibatnya, yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya ialah kemantapan sistem, keluasan khazanah perbendaharaan kata, dan tersedianya perangkat istilah untuk ranah pemakaian yang diperlukan.

Adapun kemantapan berbahasa dapat diamati berdasarkan mutu dan keterampilannya dalam menggunakan bahasa secara lisan ataupun tertulis. Mutu dan keterampilan berbahasa ini selain bersifat individual, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, latar belakang pendidikan, minat, dan lingkungan.

Ukuran kemantapan itu tidak mungkin bersifat statis karena ia harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan setiap bidang kehidupan yang senantiasa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan dan perkembangan itu secara jelas memberikan pengaruh yang langsung terhadap bahasa yang digunakan dan hal itu terutama terlihat pada makin meningkatnya jumlah kata dan istilah.¹

Kenyataan itu pada gilirannya memunculkan persoalan yang cukup mendasar dalam hal penanganan masalah bahasa. Dengan menyadari diperlukannya upaya-upaya agar bahasa tetap mantap dan efektif sebagai alat komunikasi dan alat berpikir dalam menghadapi perubahan dan perkembangan berbagai bidang kehidupan yang menjadi ranah pemakaian-

nya, pertanyaan yang timbul ialah siapa yang harus tampil berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan (kalau perlu) mengevaluasi upaya-upaya tersebut.

Pertanyaan semacam itu patut diperhatikan sehubungan dengan adanya beberapa pandangan mengenai hal itu. Ada yang berpendapat bahwa karena bahasa itu pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kesepakatan atau konvensi masyarakat, hal itu serahkan saja sepenuhnya kepada masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan. Pandangan lain menghendaki agar hal itu ditanggulangi saja oleh para pakar atau kelompok ahli bahasa dengan alasan merekalah yang paling berkompeten dalam masalah itu. Sementara itu, mereka yang berpendapat bahwa upaya-upaya itu tidak dapat dipisahkan dari masalah perencanaan dan pelaksanaan yang perlu secara terus-menerus dikaji ulang cenderung menyerahkan masalah tersebut kepada lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

Dari ketiga jenis pandangan itu, yang paling tepat ialah adanya kerja sama di antara ketiga pihak yang disebutkan di atas. Kasus bahasa Indonesia dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasanya merupakan contoh yang dapat dikemukakan mengenai hal itu.

3. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Karena yang menjadi sasaran pembinaan bahasa ialah masyarakat pemakai bahasa dan yang menjadi sasaran pengembangan bahasa ialah bahasanya itu sendiri, maka dapatlah dikatakan bahwa pembinaan bahasa bersangkutan paut dengan upaya pemantapan berbahasa, sedangkan pengembangan bahasa dengan upaya pemantapan bahasa.

Pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukan bahasa Indonesia sekaligus sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa persatuan. Mengingat situasi kebahasaan di Indonesia, maka pembinaan bahasa itu tidak saja diupayakan dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa daerah dan pemakaian bahasa asing.

Pembinaan bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang berkenaan dengan usaha membudidayakan pemakaian bahasa agar para pemakai bahasa Indonesia memiliki sikap positif yang mencakup tiga unsur, yaitu

kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dan kesadaran akan norma bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia itu dilakukan karena terdapat ketakpadanan di dalam perilaku kebahasaan para penuturnya, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

Sehubungan dengan hal itu, pembinaan bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan untuk (1) mempertinggi mutu pemakaian, (2) meningkatkan sikap positif, dan (3) mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penerapan dan penggunaannya perlu terus ditingkatkan dan diperluas sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.²

Pembinaan bahasa daerah, baik sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia, maupun sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional dan alat perhubungan dalam lingkungan masyarakat daerah, perlu dilaksanakan seiring dengan pembinaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain melestarikan sikap positif terhadap bahasa daerah, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, pembinaan bahasa daerah juga bertujuan memotivasi masyarakat khususnya generasi muda, agar mereka tetap memelihara, menghormati, dan menggunakan bahasa daerah dalam situasi dan konteks pemakaian yang tepat.

Berbeda dari pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pembinaan bahasa asing harus diartikan sebagai pembinaan terhadap pemakaian bahasa asing agar peningkatan penguasaan bahasa asing di Indonesia ditujukan untuk (1) memperluas cakrawala berpikir, (2) memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan terhadap bahasa asing di Indonesia hendaknya diupayakan agar pemakaian bahasa asing itu tidak akan mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dalam kenyataannya, upaya pembinaan bahasa, terutama pembinaan bahasa Indonesia, menghadapi berbagai macam kendala, seperti (1) perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah, (2) tingkat keniraksaraan penduduk yang masih cukup tinggi, (3) kelangkaan penutur anutan yang dapat diteladani, (4) adanya bahasa asing yang bergengsi sosial di dalam masyarakat, dan (5) kurang adanya motivasi untuk meningkatkan penguasaan

an dan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan struktur sosial, terutama di daerah perkotaan, cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembinaan bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembinaan bahasa daerah dilakukan atas dasar "semangat" yang saling menunjang dengan pembinaan bahasa Indonesia. Sementara itu, pemakaian bahasa asing di Indonesia mengakibatkan timbulnya kendala yang cukup serius bagi upaya pembinaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kendala itu terutama berkenaan dengan adanya anggapan atau penilaian pada sebagian anggota masyarakat bahwa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia.

Pengembangan bahasa Indonesia diarahkan kepada upaya pemodernan bahasa itu. Pemodernan bahasa dapat diartikan sebagai upaya pemutakhiran atau pemantapan bahasa Indonesia sehingga serasi dengan tuntutan dan keperluan komunikasi dewasa ini dalam berbagai bidang kehidupan, seperti industri, perniagaan, teknologi, dan pendidikan lanjutan.

Sejalan dengan hal itu, pengembangan bahasa Indonesia perlu dilakukan melalui upaya penelitian, pemantapan kaidah-kaidah kebahasaan, pembakuan peristilahan, dan pemekaran perbendaharaan kata dan istilah sehingga bahasa Indonesia benar-benar dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana komunikasi dan sarana berpikir. Upaya yang disebutkan terakhir, yaitu pemekaran perbendaharaan kata dan istilah pada gilirannya akan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi karena kata dan istilah tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan, antara lain, dalam penulisan berbagai karangan ilmiah, penyusunan buku teks, dan penerjemahan.

Sehubungan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa itu, Pusat Bahasa boleh dikatakan telah memberikan perhatian dan melaksanakan kegiatan dalam porsi dan intensitas yang sama. Akan tetapi, hasil kedua jenis kegiatan itu belum memperlihatkan hasil yang sama-sama menggembirakan. Upaya pembinaan tampaknya masih harus terus ditingkatkan, bukan semata-mata karena belum terbinanya sikap positif pada masyarakat pemakai bahasa, melainkan juga karena masih derasnya arus interferensi, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah.³

4. Keadaan dan Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia dalam Pembangunan Jangka Panjang II memperoleh porsi perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hal yang sama pada masa pembangunan 25 tahun sebelumnya. Dalam konteks yang demikian, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia di Indonesia ialah keterampilan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal itu, perlu diperhatikan beberapa faktor yang diperkirakan memberikan pengaruh, secara langsung ataupun tidak langsung, terhadap tingkat kemampuan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia tersebut. Di antara faktor-faktor itu, dapat disebutkan tiga hal, yaitu (1) pemakaian bahasa tertentu sebagai bahasa sehari-hari, (2) kemampuan membaca dan menulis, dan (3) tingkat pendidikan.

a. Pemakaian Bahasa Sehari-Hari

Hasil sensus penduduk tahun 1990, mengenai pemakaian bahasa sehari-hari oleh anggota masyarakat Indonesia yang berusia lima tahun ke atas, memperlihatkan adanya tiga kelompok masyarakat sebagai berikut: (1) masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 23.802.520 orang (15,07%); (2) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (tetapi dapat memahami dan menggunakannya) berjumlah 107.066.316 orang (67,80%); dan (3) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya berjumlah 27.055.488 orang (17,13%).

Hasil sensus itu memperlihatkan bahwa masih cukup banyak penduduk Indonesia (17,13%) yang belum dapat menyerap informasi pembangunan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1980 mengenai hal yang sama, angka-angka tersebut di atas cukup menggembarakan, terutama dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan berkurangnya jumlah penduduk Indonesia yang tidak memahami bahasa Indonesia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980, ketiga kelompok

masyarakat itu adalah sebagai berikut: (1) masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 17.505.303 orang (11,93%); (2) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (tetapi dapat memahami dan menggunakannya) berjumlah 71.758.926 orang (48,89%); dan (3) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya berjumlah 57.512.244 orang (39,18%). Perbandingan antara hasil sensus penduduk tahun 1990 dan 1980 mengenai pemakaian bahasa ini dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1
PENDUDUK INDONESIA USIA 5 TAHUN KE ATAS
MENURUT BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI

Kelompok	Sensus 1980		Sensus 1990	
	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
I	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
II	71.758.926	48,89	107.066.141	67,65
III	57.512.244	39,18	27.154.488	17,16
Jumlah	146.776.473	100,00	158.262.639	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

Keterangan

- Kelompok I : menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
 Kelompok II : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat memahami dan menggunakannya.
 Kelompok III : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya.

Kenyataan itu mengisyaratkan bahwa upaya pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, antara la-

in, melalui jalur pemasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991, tanggal 28 Oktober 1991, tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa (yang ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992, tanggal 10 April 1992).

Bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk Indonesia yang buta bahasa Indonesia itu boleh dikatakan berbanding sejajar dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penutur bahasa-bahasa daerah tertentu, sebagaimana yang dapat diamati melalui angka-angka pada Tabel 2.

TABEL 2
BAHASA-BAHASA DI INDONESIA
DAN JUMLAH PENUTURNYA

No.	Nama Bahasa	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penutur	%	Jumlah Penutur	%
1.	Indonesia	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
2.	Jawa	59.357.040	40,44	60.267.461	38,08
3.	Sunda	22.110.403	15,06	24.155.962	15,26
4.	Madura	6.913.977	4,71	6.792.447	4,29
5.	Batak	3.106.970	2,12	3.120.047	1,97
6.	Minang	3.545.928	2,42	3.527.726	2,23
7.	Bali	2.481.249	1,69	2.589.256	1,64
8.	Bugis	3.322.192	2,26	3.228.742	2,04
9.	Banjar	1.661.792	1,13	2.755.337	1,74
10.	Lainnya	25.653.378	17,48	27.070.883	17,11
11.	Tak terjawab	1.118.235	0,76	712.630	0,45
	Jumlah	146.776.467	100,00	158.262.640	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

b. Kemampuan Membaca dan Menulis

Tingkat penguasaan bahasa seseorang ditentukan, antara lain, oleh kemampuan dan keterampilannya membaca dan menulis. Sebagai sebuah negara yang rata-rata penduduknya tergolong dwibahasawan, terutama sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, hal itu dapat ditelusuri. Dalam hal penguasaan bahasa Indonesia, alat ukurnya ialah kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis aksara Latin karena dalam sistem pendidikan di Indonesia bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Indonesia dan aksara atau huruf yang dipakai ialah huruf Latin.

Berdasarkan alat ukur itu, dengan memperhatikan hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 seperti yang tampak pada Tabel 3, ada dua hal yang perlu dicatat, yakni bertambahnya penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis huruf Latin serta berkurangnya penduduk Indonesia yang buta aksara.

TABEL 3
PENDUDUK INDONESIA USIA 10 TAHUN KE ATAS
DAN KEPANDAIAAN MEMBACA DAN MENULIS

No.	Membaca dan Menulis	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Huruf Latin	72.670.883	69,64	111.365.8	82,47
2.	Huruf Lain	1.514.493	1,45	2.145.277	1,59
3.	Buta Aksara	30.096.559	28,84	21.494.11	15,92
4.	Tak Terjawab	70.635	0,07	34.360	0,02
Jumlah		104.352.570	100,00	135.039.581	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

c. Tingkat Pendidikan

Selain dengan kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis huruf Latin, seperti yang sudah dikemukakan di atas, tingkat penguasaan baha-

sa Indonesia juga berhubungan dengan latar belakang pendidikan penutur yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan makin tinggi pula tingkat penguasaan bahasa Indonesianya, baik penguasaan bahasa Indonesia tulisan maupun penguasaan bahasa Indonesia lisan. Sebaliknya, makin rendah tingkat pendidikan seseorang akan makin rendah pula penguasaan bahasa Indonesianya. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, seperti yang terlihat pada Tabel 4, dari penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang berjumlah 135.038.185 orang, hal yang disebutkan terakhir ini dapat diamati terutama pada kelompok penduduk yang belum pernah duduk di bangku sekolah yang jumlahnya 21.952.791 orang (16,26%).

TABEL 4
PENDUDUK INDONESIA USIA 10 TAHUN KE ATAS
DAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
1.	Belum Pernah Sekolah	21.952.791	16,26
2.	Tidak/Belum Tamat SD	42.480.415	31,46
3.	SD	40.996.434	30,36
4.	SLTP Umum	13.392.558	9,92
5.	SLTP Kejuruan	1.088.539	0,80
6.	SLTA Umum	7.882.905	5,84
7.	SLTA Kejuruan	5.204.538	3,85
8.	Diploma I/II	352.505	0,26
9.	Akademi/Diploma III	700.801	0,52
10.	Universitas	986.699	0,73
Jumlah		135.038.185	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

Dari paparan tentang ketiga faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa Indonesia itu, kalau secara khusus diperhatikan hasil sensus penduduk tahun 1990, maka tampaknya dapat diperkirakan bahwa ada korelasi antara kelompok penduduk yang tidak dapat berbahasa Indonesia

(17,13%), penduduk yang buta aksara (15,92%), dan penduduk yang tidak pernah bersekolah (16,26%). Selain itu, perlu juga dicatat bahwa penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas lebih banyak yang tinggal di pedesaan daripada di kota-kota: 79.605.791 orang (64,91%) di pedesaan dan 43.040.719 orang (35,09%) di kota-kota.

5. Penutup

Kemantapan bahasa dan kemantapan berbahasa yang telah dikemukakan di atas pada hakikatnya merupakan perwujudan "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia" seperti yang diamanatkan oleh butir ketiga Sumpah Pemuda 1928. Dalam formulasi yang lebih populer dapat dikatakan bahwa amanat itu bermuara pada dua kegiatan, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa. Pembinaan bahasa berdampingan dengan pemantapan berbahasa, sedangkan pengembangan bahasa dengan pemantapan bahasa.

Mengingat hasil pembinaan bahasa tidak dapat dikuantifikasi seperti halnya hasil pengembangan bahasa, perhatian yang lebih bersungguh-sungguh perlu dipusatkan oleh semua pihak pada kegiatan pembinaan bahasa. Semua pihak mengandung arti bahwa yang terlibat dalam upaya pembinaan bahasa tidak hanya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi juga pihak-pihak lain yang langsung berkepentingan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi.

Media massa, baik cetak maupun elektronik, perlu ditampilkan sebagai pihak yang perannya amat strategis, dominan, dan (oleh karena itu) menentukan dalam perilaku berbahasa masyarakat kita. Dengan perkataan lain, kemantapan berbahasa media massa akan sangat mempengaruhi kemantapan berbahasa masyarakat dalam arti yang luas karena sering terdengar keluhan, misalnya, keprihatinan tentang rendahnya mutu pemakaian bahasa Indonesia di kalangan murid/mahasiswa tidak hanya dikaitkan dengan belum mengembirkannya pelaksanaan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah/ perguruan tinggi, tetapi juga hal itu sering dianggap sebagai akibat adanya pengaruh dari pemakaian bahasa Indonesia oleh media massa.

Gerakan pengindonesiaan nama dan kata asing yang "dicanangkan" oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1995 harus secara terus-

menerus dilakukan. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah daerah yang berperan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran mengenai hal itu dari para pengusaha yang selama ini memberikan kesan bahwa mereka itu jauh lebih mementingkan penggunaan bahasa asing (dengan alasan atau dalih apa pun) daripada penggunaan bahasa Indonesia. Setelah kegiatan itu berlangsung satu setengah tahun, gerakan tersebut perlu disimak kembali oleh semua pihak yang berkepentingan agar langkah berikutnya benar-benar dapat memberikan perasaan lega karena hal itu merupakan upaya nyata yang kita lakukan dalam memahami, menghayati, dan melaksanakan amanat butir ketiga Sumpah Pemuda 1928.

Kekayaan perbendaharaan kata yang didukung oleh tersedianya perangkat peristilahan, seperti telah disebutkan, merupakan tuntutan kemandirian bahasa yang memungkinkan bahasa Indonesia benar-benar dapat digunakan sebagai sarana pengungkap untuk menyatakan konsep, pandangan, atau gagasan apa pun, mulai dari yang amat praktis dan sederhana sampai kepada yang paling rumit dan kompleks. Tersedianya perangkat peristilahan itu diwujudkan dalam bentuk kamus istilah atau kamus bidang ilmu. Dengan demikian, penyerapan dan pengembangan bidang iptek yang mutakhir pun diharapkan dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa Indonesia.

Upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar, semboyan yang selama ini digunakan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Hal itu berarti bahwa komputer, misalnya, tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian kebahasaan, tetapi juga perlu dipertimbangkan untuk efisiensi dan peningkatan "kemasan" sehingga sumber-sumber rujukan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat pemakai, baik yang awam maupun yang profesional, dapat pula disajikan melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

CATATAN

1. Peningkatan jumlah kata dan istilah itu dapat diamati, antara lain, melalui kamus-kamus bahasa Indonesia sebagai berikut.
 - a. *Kamus Indonesia* (1951) oleh E. St. Harahap: 21.119 kata
 - b. *Kamus Modern Bahasa Indonesia* (1954) oleh St. Moh. Zain: 39.738 kata

- c. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1976) oleh W.J.S. Poerwadarminta: 48.004 kata
- d. *Kamus Bahasa Indonesia* (1983) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 55.406 kata
- e. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi I (1988) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 62.116 kata
- f. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II (1991) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 73.024 kata

2. Lihat *Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993*.
3. Ketidaksamaan hasil kedua jenis kegiatan itu diakibatkan oleh tidak mungkin dilakukan pengukuran secara tepat terhadap hasil pembinaan bahasa. Berbeda halnya dengan hasil pengembangan bahasa yang memang dapat di-kuantifikasi. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa melalui jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan-badan lain di dalam dan di luar negeri, Pusat Bahasa telah meneliti 241 bahasa daerah yang mencakupi 749 topik bahasa dan 188 topik sastra. Dalam hal peristilahan berbagai bidang ilmu telah dihasilkan kurang lebih 190.000 istilah yang beberapa di antaranya diolah lebih lanjut menjadi kamus istilah untuk bidang/subbidang ilmu tertentu. Selain itu, telah pula diperoleh sejumlah buku pedoman, dua buah buku tata bahasa, dan beberapa kamus ekabahasa (lihat Catatan 1) dan 54 kamus bahasa daerah-Indonesia.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA RAGAM IPTEK^{*)}

Pengantar

Sejak dinyatakan secara resmi sebagai bahasa persatuan melalui ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang kemudian disusul oleh penegasan konstitusional sebagai bahasa negara, seperti yang termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat diamati tidak hanya pada perubahan segi ketatabahasaan yang bertumpu pada tata kata dan tata kalimat, tetapi juga tercerminkan melalui makin bertambah kayanya kosakata bahasa Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kontak bahasa yang tidak akan pernah dapat dihindari oleh bahasa alami mana pun. Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, kontak bahasa itu bukan saja antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, melainkan juga antara bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa asing terkemuka, khususnya bahasa Inggris.

Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu perlu diarahkan agar bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara itu benar-benar menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien sehingga dapat digunakan secara mantap dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek, berdasarkan judul makalah ini, menyiratkan, sekurang-kurangnya, dua hal pokok, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta bahasa Indonesia ragam iptek. Kedua pokok masalah itu, berikut hal-hal lain yang berkaitan dengannya, dikemukakan lebih lanjut berikut ini.

^{*)} Makalah seminar "Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi" tanggal 2 Oktober 1993 di ITB, Bandung

Situasi Kebahasaan

Sebelum sampai pada uraian mengenai bahasa Indonesia ragam iptek, perlu digambarkan dulu bagaimana situasi kebahasaan di Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa ibu atau bahasa daerah yang berbeda-beda, maka para penutur bahasa Indonesia memperlihatkan corak yang monolingual atau bilingual. Sehubungan dengan pemakaian bahasa asing, corak itu mungkin berubah menjadi multilingual pada kelompok penutur tertentu.

Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di desa-desa yang terpencil dan yang termasuk ke dalam golongan yang tidak/kurang memperoleh pendidikan formal merupakan penutur yang monolingual karena mereka hanya menguasai dan menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa daerahnya. Sementara itu, kelompok yang monolingual ini terdapat juga di kota-kota besar, terutama pada generasi mudanya. Sebagai akibat dari begitu heterogennya masyarakat kota besar, ditambah pula oleh kemungkinan berbedanya kelompok etnis antara ibu dan ayah mereka, maka generasi muda di kota besar itu juga termasuk ke dalam penutur yang monolingual dan bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Indonesia. Mereka yang sekaligus menguasai dua bahasa, misalnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia, merupakan penutur yang bilingual. Adapun kelompok yang multilingual hampir dapat dipastikan terdapat pada golongan masyarakat yang terpelajar karena selain menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia, seperti yang dicontohkan tadi, salah satu bahasa asing juga dikuasainya. Dalam kasus tertentu ciri multilingual ini mungkin sama sekali tidak perlu dikaitkan dengan penguasaan bahasa asing. Seseorang yang sekaligus menguasai bahasa Indonesia dan dua bahasa daerah atau lebih, misalnya, dapat pula disebut penutur yang multilingual. Akan tetapi, kemultilingualan yang dimaksudkan dalam makalah ini mengacu pada penguasaan bahasa asing sebagai salah satu faktor-nya.

Dalam situasi kebahasaan yang demikian, kontak bahasa yang tadi disebutkan berlangsung antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Seberapa jauh kontak bahasa itu dapat mengakibatkan seseorang dapat diidentifikasi sebagai penutur yang monolingual, bilingual, atau multilingual sangat erat berkaitan dengan, antara lain, tingkat pendi-

dikan, latar belakang sosial, dan profesi yang bersangkutan. Arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi mengakibatkan makin gencar dan intensifnya proses saling mempengaruhi di antara ketiga bahasa itu sehingga yang terjadi ialah bahwa bahasa yang "kuat" akan mempengaruhi bahasa yang "lemah".

Saling mempengaruhi antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia, misalnya, sering mengakibatkan timbulnya interferensi, baik yang berciri leksikal maupun gramatikal. Yang menarik mengenai interferensi ini ialah kecenderungan pada sebagian di antara kita untuk memperlihatkan sikap yang mendua. Interferensi bahasa daerah akan dikatakan dapat memperkaya bahasa Indonesia, sementara interferensi bahasa Indonesia malah akan dinilai merusak kemurnian bahasa daerah.

Proses saling mempengaruhi yang berkembang ke arah interferensi itu berkorelasi dengan faktor "kuat-lemahnya"-nya bahasa yang bersangkutan, seperti yang dikemukakan di atas. Meskipun belum pernah dilakukan penelitian yang memadai mengenai hal itu, dapat dikemukakan hipotesis bahwa secara potensial bahasa Indonesia dapat mempengaruhi bahasa daerah dan bahasa Indonesia pada gilirannya dapat dipengaruhi bahasa asing. Sudut pandang ini bahkan dapat berubah menjadi asumsi kalau kita mencoba melihat ketiga bahasa itu dalam fungsinya sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek.

Kalau fungsi tersebut secara khusus kita hubungkan dengan bahasa Indonesia, sebagaimana yang diisyaratkan dalam judul makalah ini, pertanyaan yang cukup menarik untuk dijawab ialah: seberapa banyak orang Indonesia yang dapat "dilibatkan" ke dalam pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek? Untuk itu, yang terlebih dulu harus diketahui ialah jumlah penduduk Indonesia yang dapat digolongkan sebagai penutur bahasa Indonesia. Angka hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 berikut ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980, dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 146.775.000 orang yang menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari hanya 17.505.000 orang (12%), setelah penutur bahasa Jawa 59.357.000 orang (40%) dan penutur bahasa Sunda 22.110.000 orang (15%). Setelah bahasa Indonesia berturut-turut dapat

disebutkan, antara lain, bahasa Madura 6.914.000 orang (5%), bahasa Minang 3.546.000 orang (2%), bahasa Bugis 3.322.000 orang (2%), bahasa Batak 3.107.000 orang (2%), bahasa Bali 2.481.000 orang (2%), dan bahasa Banjar 1.662.000 orang (1%).

Angka 12 % yang menggambarkan jumlah penutur bahasa Indonesia menurut sensus penduduk 1980 itu memperlihatkan kenaikan pada sensus penduduk 1990 karena berdasarkan penduduk Indonesia usia lima tahun ke atas yang berjumlah 157.924.324 orang, yang menyatakan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berjumlah 23.802.520 orang (15%). Bandingkan dengan golongan penduduk yang sama sekali tidak dapat berbahasa Indonesia sebanyak 27.055.488 orang (17%) dan mereka yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tetapi menyatakan dapat memahaminya sebanyak 107.066.316 orang (68%).

Dasar dan Arah Kebijakan Bahasa

Seperti yang telah dikemukakan di atas, arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi situasi kebahasaan di Indonesia. Tanpa batas-batas pengendalian yang jelas, "persaingan" di antara ketiga bahasa itu akan merugikan bahasa yang berada dalam posisi yang "lemah". Oleh karena itu, perlu ditentukan garis yang tegas mengenai kebijakan bahasa di Indonesia agar bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing yang saling menunjang.

Dasar dan arah kebijakan bahasa di Indonesia harus ditelusuri mulai dari ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disinggung di atas. Selain itu, perlu pula disimak rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 mengenai hal tersebut.

Butir ketiga Sumpah Pemuda "Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" mencerminkan kebulatan semangat kebangsaan untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat sehingga bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antarsuku, antardaerah, dan bahkan antarbudaya. Pasal 36 Undang-Un-

dang Dasar 1945 yang menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu sekurang-kurangnya mengisyaratkan lima fungsi bahasa Indonesia, yaitu (1) sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, (2) sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan jenjang pendidikan (dengan catatan tambahan tentang dijadikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi), (3) sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), (4) sebagai sarana pengembangan iptek, dan (5) sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Sementara itu, penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh para penuturnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional juga tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan mengenai bahasa daerah dan bahasa asing dikemukakan dalam Pasal 42, yaitu (a) "Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu" dan (b) "Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu". Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan perlu diupayakan pelaksanaannya sedemikian rupa sehingga, misalnya, bahasa Indonesia benar-benar dapat digunakan baik oleh para mahasiswa maupun dosen agar mereka memiliki kemampuan akademik dan profesional untuk menerapkan, mengembangkan, dan bahkan menciptakan iptek, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut.

Dalam GBHN 1993 lebih ditegaskan lagi bahwa pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional perlu makin ditingkatkan agar bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa iptek. Untuk itu, perlu diupayakan "penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi sarana pengungkap citra, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi". Mengenai bahasa daerah digariskan dua hal, yaitu fungsinya sebagai salah satu sarana pen-

didikan dini dan sebagai landasan pengembangan dan pemerayaan perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Akan halnya peningkatan penguasaan bahasa asing, disebutkan bahwa hal itu diperlukan untuk memperluas cakrawala berpikir, memperkuat penguasaan iptek, dan memperlancar komunikasi dengan bangsa lain.

Berdasarkan kerangka pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing itu hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan bahasa Indonesia. Masukan dari bahasa daerah tidak hanya dimaksudkan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia semata-mata, tetapi juga untuk memberikan gambaran tentang betapa beraneka-ragamnya unsur-unsur bahasa dan budaya daerah yang jalin-menjalin dalam memberi corak dan warna pada bahasa dan kebudayaan Indonesia. Pemanfaatan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperkuat penguasaan iptek, seperti disebutkan di atas, harus diupayakan untuk keperluan pengembangan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa bagi setiap individu, selain sebagai sarana komunikasi kalau dia berhubungan dengan individu yang lain, juga merupakan sarana berpikir bagi dirinya sendiri. Jadi, kalau pada satu pihak bahasa asing dimanfaatkan untuk memperluas cakrawala berpikir, sedangkan pada pihak lain bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana berpikir, maka terlihat adanya korelasi antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan fungsi bahasa asing untuk memperkuat penguasaan iptek yang dapat dihubungkan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek.

Pemanfaatan bahasa daerah dan bahasa asing itu dengan demikian mengisyaratkan bahwa konsep mengenai apa pun yang dapat diungkapkan oleh bahasa daerah dan bahasa asing harus pula dapat diungkapkan oleh bahasa Indonesia. Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia perlu menyerap sebanyak-banyaknya konsep budaya daerah dan iptek yang menggambarkan tingkat peradaban kelompok etnis yang bersangkutan. Dalam rangka memacu bangsa kita ke arah peradaban modern, bahasa Indonesia juga perlu menyerap sebanyak-banyaknya konsep budaya dan iptek modern dari bahasa asing. Pengungkapan kembali segala konsep itu dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan sistem dan

kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Kalau hal itu menyangkut peristilahan, rujukan yang perlu diperhatikan ialah *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Kalau hal itu berkaitan dengan penulisan, rujukannya ialah *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

Kontak bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah berlangsung dengan intensitas yang berbeda dari kontak bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah ada hubungan timbal balik, sedangkan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing hubungan seperti itu boleh dikatakan tidak ada. Sebagai unsur kebudayaan yang hidup dan mempunyai peranan khusus dalam kelompok masyarakat etnis yang bersangkutan, bahasa daerah tumbuh serasi dengan bahasa Indonesia sehingga bahasa daerah itu menjadi sumber utama pemekaran kosakata bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia pun menjadi sumber pemekaran kosakata bahasa daerah sehingga bahasa daerah dapat memenuhi berbagai fungsi kemasyarakatannya. Yang perlu diperhatikan ialah kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beratus-ratus bahasa daerah dengan taraf perkembangan yang tidak sama. Kelompok masyarakat etnis yang mendukung setiap bahasa daerah itu pun jumlahnya tidak sama. Sementara itu, pembinaan bahasa asing, sebagai sarana ke arah peradaban modern di bidang iptek, agama, kebudayaan, ekonomi, dan politik itu, berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia, tanpa merusak bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia. Mengenai hal ini, GBHN 1993 memberi isyarat bahwa "penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari".

Bahasa Indonesia Ragam Iptek

Bahasa Indonesia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan yang amat luas cakupannya itu mesti dapat dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh seseorang kepada orang lain, oleh seorang pembicara kepada lawan bicaranya atau oleh seorang penulis kepada pembacanya. Dengan mengecualikan pemakaian bahasa Indonesia untuk keperluan komunikasi yang menurut sifatnya sangat khusus, seperti dalam pengisian formulir atau pengiriman berita lewat tele-

gram, pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan itu memperlihatkan persamaan dalam hal tata kata dan tata kalimatnya. Oleh karena itu, kalau semata-mata kita hanya memperhatikan tata kata dan tata kalimat itu saja, hampir tidak mungkin kita dapat melihat adanya perbedaan, misalnya, antara bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ekonomi dan bahasa Indonesia dalam bidang politik atau kebudayaan.

Sehubungan dengan hal itu, sebagai contoh, patut disinggung pandangan sementara orang yang cenderung beranggapan bahwa bahasa Indonesia dalam bidang hukum, terutama yang menyangkut perundang-undangan, sangat sukar dipahami karena kalimatnya panjang-panjang. Mereka menghendaki agar penataan atau formulasi kalimat dalam bidang tersebut disederhanakan menjadi kalimat yang pendek-pendek untuk memudahkan pemahamannya. Pandangan atau anggapan yang demikian tidaklah tepat karena pemahaman terhadap isi suatu kalimat tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya kalimat yang bersangkutan, tetapi oleh keapikan atau kerapian susunan kalimat dan oleh ketepatan memilih kata atau istilah yang digunakan. Atas dasar itu, kalimat yang pendek tidak dengan sendirinya berarti mudah dipahami. Sebaliknya, kita tidak akan menghadapi kesukaran dalam memahami kalimat-kalimat yang panjang selama bagian-bagian kalimat yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan masih secara jelas dapat diidentifikasi.

Kalau begitu halnya, yaitu bahwa berdasarkan tata kata dan tata kalimatnya, bahasa Indonesia yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan itu tidak menyiratkan adanya perbedaan, padahal kita mengenal, misalnya, bahasa Indonesia ragam politik, bahasa Indonesia ragam ekonomi/perdagangan, dan bahasa Indonesia ragam iptek. Pertanyaan yang timbul ialah: faktor apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan ragam itu?

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa faktor pembedanya terletak pada perangkat peristilahan yang digunakan dalam masing-masing bidang tersebut. Kata seperti *ekspor*, *pemegang saham*, dan *kamar dagang*, misalnya, tidak mungkin digunakan dalam bidang agama karena contoh itu merupakan istilah untuk bidang ekonomi/perdagangan. Demikian pula halnya dengan kata seperti *partai*, *oposisi*, dan *pemilihan umum*

yang lebih tepat digunakan untuk bidang politik daripada untuk bidang-bidang yang lain.

Sehubungan dengan sebutan bahasa Indonesia ragam iptek, dan apabila hal itu dihubungkan dengan klasifikasi bidang ilmu yang lazim berlaku di Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan ilmu pengetahuan budaya (IPB), persoalannya ialah unsur *ip* pada *iptek* itu merujuk pada bidang ilmu yang mana. Berdasarkan pemakaian kata *ilmu pengetahuan* sebagai padanan kata *science(s)* dengan muatan makna '*natural sciences*', maka unsur *ip* pada kata *iptek* itu merujuk pada ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, bahasa Indonesia ragam iptek itu ialah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, seperti yang telah disebutkan di atas, kita perlu memahami, menguasai, dan menyebarkan, terutama, konsep-konsep iptek modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing. Agar konsep-konsep iptek modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing, yang jumlahnya pasti sangat tidak berarti dibandingkan dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maka penyebaran konsep-konsep iptek itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Upaya penyebaran konsep iptek dalam bahasa Indonesia itu hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik kalau istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang iptek itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal itu berarti bahwa untuk dapat mengembangkan bahasa Indonesia ragam iptek, langkah pertama yang harus dilakukan ialah menyusun peristilahannya. Untuk keperluan itulah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dengan bantuan sejumlah ahli dari perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia, telah menyusun istilah untuk berbagai bidang ilmu dengan memberikan prioritas pada empat bidang ilmu dasar, yaitu fisika, matematika, biologi, dan kimia.

Sekarang ini peristilahan keempat bidang ilmu tersebut untuk keperluan pemakaian sampai dengan tingkat S-1 telah selesai disusun. Untuk itu, dalam rangka menyambut Kongres Bahasa Indonesia VI tanggal 28 Oktober—2 November 1993 di Jakarta, direncanakan penerbitannya

dalam bentuk daftar istilah yang komprehensif untuk setiap bidang ilmu tersebut. Keempat terbitan itu masing-masing diberi judul *Glosarium Fisika*, *Glosarium Matematika*, *Glosarium Biologi*, dan *Glosarium Kimia*.

Sementara itu, dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan tersebut, istilah-istilah yang telah berhasil disusun itu diolah lebih lanjut menjadi berbagai kamus istilah. Tentu saja, selain mengandung padanan istilah istilah dalam bahasa Indonesia, kamus istilah itu juga mencantumkan rumusan atau penjelasan setiap istilah yang dicantumkan. Sampai sekarang telah berhasil disusun sekurang-kurangnya 25 buah kamus istilah.

Penerbitan daftar dan kamus istilah itu sangat penting dan bermanfaat dalam rangka pemasyarakatan dan penyebarluasan perangkat istilah yang sudah dibakukan. Kalau upaya penerbitan itu tidak dilakukan, maka hasil penyusunan dan pembakuan istilah itu akan tetap tinggal sebagai harta karun.

Jika para ilmuwan diharapkan menggunakan istilah yang telah dibakukan itu dengan taat asas, maka harus pula diupayakan adanya arus balik yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses pengembangan bahasa selanjutnya. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang pembinaan bahasa, masuknya istilah-istilah yang sudah dibakukan itu ke dalam buku ajar, makalah, atau karangan-karangan ilmiah lainnya merupakan langkah berikutnya yang tidak dapat ditawar-tawar.

Penutup

Berdasarkan uraian singkat mengenai upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya yang menyangkut bahasa Indonesia ragam iptek, seperti yang telah dikemukakan di atas, kita perlu makin menyadari bahwa konsep dalam bidang apa pun, termasuk konsep di bidang iptek, harus dapat diungkapkan kembali dalam bahasa Indonesia.

Agar bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek, penyusunan dan pembakuan perangkat peristilahannya mutlak dilakukan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya para ahli di bidang/subbidang ilmu yang bersangkutan. Selepas itu, penerbitan dan pemasaran daftar dan kamus istilah yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran yang memerlukannya juga perlu mendapat perhatian

utama. Para ahli dari perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, kalangan profesi, dan bahkan mereka yang bergerak dalam bidang industri dan niaga seyogianya sama-sama memikul beban tanggung jawab demi pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam bidang iptek.

11

PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA^{*)}

Pengantar

Garis-Garis Besar haluan Negara 1993 mengisyaratkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun yang akan datang, yang disebut masa Pembangunan Jangka Panjang II, sumber daya manusia memperoleh porsi perhatian yang jauh lebih besar, dibandingkan dengan masa pembangunan 25 tahun sebelumnya. Bagi Indonesia yang hampir seluruh masyarakatnya bercorak bilingual, sumber daya manusia itu erat berkaitan dengan masalah bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara atau bahasa resmi.

Pada makalah ini akan dipaparkan secara singkat peran media massa dalam upaya pembinaan bahasa yang bertujuan menumbuhkan dan memelihara sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia sambil sekaligus meningkatkan mutu pemakaiannya.

Pembinaan Bahasa

Dalam hal bahasa Indonesia, masalah pembinaan bahasa sangat erat kaitannya dengan masalah pengembangan bahasa. Eratnya keterkaitan itu terutama disebabkan oleh masih sangat mudanya usia bahasa Indonesia itu sendiri (67 tahun sebagai bahasa nasional dan 50 tahun sebagai bahasa negara), sementara beban tugas yang dipikulnya sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangatlah sarat.

Dengan sasaran para pemakainya, upaya pembinaan bahasa bertujuan meningkatkan sikap positif warga masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk menggunakan bahasa secara ba-

^{*)} Simposium Nasional Ragam Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia tanggal 10--12 Juli 1995 di IKIP PGRI Semarang.

ik dan benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dan dengan memperhatikan lingkungan sosiolinguistik yang terkait.¹ Sementara itu, dengan sasaran bahasanya, upaya pengembangan bahasa bertujuan meningkatkan kelengkapan perangkat bahasa yang bersangkutan, seperti tata bahasa, tata ejaan, dan kosakata, agar bahasa itu benar-benar dapat digunakan sebagai sarana komunikasi umum, sarana komunikasi pemerintahan, sarana pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana pendukung kebudayaan (Halim, 1993).²

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan dengan porsi dan intensitas yang boleh dikatakan sama antara pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa. Akan tetapi, hasil yang dicapai dalam kedua bidang itu tidaklah sama. Hasil dalam bidang pengembangan cukup menggembirakan dan sudah memadai. Bahasa Indonesia sudah memiliki tata ejaan, tata bahasa, kamus, dan peristilahan.³ Pembinaan bahasa yang bermuara pada tumbuh dan terpeliharanya sikap positif itu hasilnya tidak saja tidak dapat dikuantifikasi, tetapi juga karena memang setakat ini masih jauh dari yang diharapkan.

Dengan memperhatikan kenyataan yang demikian, masalah sumber daya manusia berikut upaya peningkatannya lebih banyak berkenaan dengan masalah pembinaan bahasa daripada dengan masalah pengembangan bahasa.

Agar pembinaan bahasa itu berperan secara optimal dalam pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan secara terus-menerus berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan bahasa, di antaranya ialah (1) perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pemakaian bahasa Indonesia oleh pemakai yang bersangkutan, (2) tingkat keniraksaraan penduduk yang masih tinggi, (3) masih langkanya penuturan yang patut dijadikan teladan atau contoh dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, (4) adanya pemakaian bahasa asing tertentu (khususnya bahasa Inggris) yang dianggap oleh sebagian orang memiliki prestise dan gengsi sosial yang tinggi di dalam masyarakat, dan (5) kurang adanya motivasi pada sebagian terbesar warga masyarakat untuk meningkatkan penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia (Moeliono, 1985).

Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin dalam kerangka pembangunan bangsa yang dititikberatkan pada bidang ekonomi,⁴ sebagaimana yang dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 sebagai tujuan Pembangunan Jangka Panjang II, masalah peningkatan sumber daya manusia harus ditempatkan pada skala prioritas utama. Yang dimaksudkan dengan *peningkatan* dalam konteks itu tidaklah sekedar dalam hal jumlahnya, tetapi terutama mutunya.

Mutu sumber daya manusia ditentukan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan dan disiplin, keuletan, serta prestasi kerja. Untuk keperluan makalah ini, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia itu secara khusus perlu dihubungkan dengan tiga faktor yang merupakan prasyarat utama yang saling menunjang, yaitu kemampuan berbahasa Indonesia, kepandaian membaca dan menulis huruf Latin, serta tingkat pendidikan.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, berdasarkan pemakaian bahasa sehari-hari terdapat tiga kelompok penduduk, yaitu (1) yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari: 24.042.010 orang (15,19%); (2) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat menggunakannya: 107.066.141 orang (67,65%); dan (3) yang tidak memahami bahasa Indonesia: 27.154.488 orang (17,16%).⁵

Kualifikasi sumber daya manusia yang secara potensial dapat ditingkatkan mutunya tidak hanya menyangkut penduduk pada kelompok pertama, tetapi juga penduduk pada kelompok kedua karena penguasaan bahasa Indonesia kelompok pertama belum tentu lebih baik daripada kelompok kedua. Hal itu berarti bahwa upaya pengembangan mutu sumber daya manusia ini harus diupayakan terutama melalui pembinaan bahasa terhadap 82,84% dari penduduk Indonesia. Hambatan yang akan dihadapi ialah tidak atau belum diketahuinya tingkat kemampuan berbahasa Indonesia yang sebenarnya, baik dari kelompok pertama maupun dari kelompok kedua.

Seperti sudah disinggung di atas, tingkat keniraksaraan penduduk yang masih tinggi merupakan salah satu kendala pembinaan bahasa. Hasil sensus penduduk tahun 1990 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia

yang masih buta aksara berjumlah 21.494.117 orang (15,92%), sementara yang sudah memiliki kepandaian membaca dan menulis huruf Latin berjumlah 111.365.827 orang (82,47%).⁶

Dalam hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia, kelompok yang harus dianggap potensial untuk keperluan itu ialah penduduk Indonesia yang sudah dapat membaca dan menulis huruf Latin. Kalau diperhatikan jumlahnya, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa penduduk yang "melek huruf" Latin yang berjumlah 82,47% itu berkorelasi dengan penduduk Indonesia yang sudah dapat berbahasa Indonesia yang berjumlah 82,84%.⁷

Peran Media Massa

Bahwa media massa memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat dominan dalam upaya pembinaan bahasa, siapa pun tidak meragukannya. Mengingat peran dan tanggung jawabnya yang sangat dominan itu, bahasa media massa atau laras bahasa jurnalistik senantiasa menjadi topik bahasan yang menarik dalam setiap kali penyelenggaraan kongres bahasa Indonesia.

Gambaran mengenai hal itu dapat disimak melalui kutipan hasil Kongres Bahasa Indonesia I (25--27 Juni 1938 di Solo), Kongres Bahasa Indonesia II (28 Oktober--2 November 1954 di Medan), dan Kongres Bahasa Indonesia VI (28 Oktober--2 November 1993 di Jakarta) sebagai berikut.

a. Hasil Kongres Bahasa Indonesia I

Setelah mendengar praeadvies toean Adi Negoro, tentang "Bahasa Indonesia di dalam persoeratkabaran", maka sependjang pendapatan Konggerès, soe-dah waktoenja wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, karena itu berharap soepaja Perdi bermoepakat tentang hal itoe dengan anggota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoek oleh Bestuur Konggeres jang baroe bersama-sama dengan Hoofbestuur Perdi.

b. Hasil Kongres Bahasa Indonesia II

- (1) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio tak dapat di anggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak,

- (2) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio adalah bahasa masjarakat umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masjarakat,
- (3) Pers dan Radio hendaknja sedapat mungkin berusaha memperhatikan tatabahasa jang resmi,
- (4) Menganggap perlu supaya diandjurkan adanja kerdjasama jang lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai² Bahasa.

c. Hasil Kongres Bahasa Indonesia VI

- (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membina kerja sama yang luas dengan berbagai lembaga, terutama dengan perguruan tinggi dan media massa.⁸
- (2) Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendekia, media cetak dianjurkan menyediakan rubrik bahasa sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenai bahasa.
- (3) Dalam memperkaya bahasa Indonesia, dunia pers telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur serapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan. Namun, pengguna bahasa dalam pers dianjurkan untuk menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.
- (4) Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penerimaan calon wartawan.
- (5) Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantauan dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sebagai media komunikasi yang menggunakan bahasa, media massa (baik cetak maupun elektronik) telah membuktikan diri sebagai sarana yang sangat efektif tidak saja dalam pembinaan bahasa, tetapi juga bahkan dalam pengembangan bahasa. Oleh karena itu, peran media massa, terutama dalam hal pembinaan bahasa, yaitu sebagai penyebar dan sekaligus sebagai tolok ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.⁹

Penutup

Mengingat pentingnya peran pembinaan bahasa dalam pengembangan mutu sumber daya manusia di Indonesia, perlu dilakukan berbagai ren-

cana dan upaya yang terpadu dan terarah, berdasarkan suatu kebijaksanaan bahasa nasional yang komprehensif, agar pembinaan bahasa itu dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Rencana dan upaya itu sama sekali tidak akan memadai kalau hanya dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa saja. Dalam hal ini, media massa harus tampil sebagai salah satu pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat menentukan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

Organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Pers Dr. Soetomo, misalnya, perlu meningkatkan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan mutu dan keterampilan para wartawan Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan bidang profesinya karena, bagaimanapun, laras bahasa jurnalistik merupakan salah satu bentuk dari ragam bahasa baku.

CATATAN

1. Bandingkan dengan pandangan Gunarwan (1993) yang menyebutkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia merujuk pada empat sasaran yang bertingkat, yaitu (1) penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia, (2) peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia, (3) penumbuhan sikap yang baik terhadap bahasa Indonesia agar warga negara Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan (4) pemupukan rasa cinta dan kesetiaan kepada bahasa Indonesia.
2. Dalam hal tertentu, upaya pengembangan bahasa itu dapat juga disebut upaya pembakuan bahasa. Kalau dihubungkan dengan bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis, maka upaya pembakuan bahasa itu diprioritaskan terlebih dahulu pada bahasa Indonesia ragam tulis. Akibatnya, pembakuan bahasa untuk bahasa Indonesia ragam lisan, seperti masalah lafal, merupakan lahan garapan yang masih menunggu perhatian dari para ahli bahasa.
3. Hasil upaya pengembangan bahasa yang telah dicapai, antara lain; berupa *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Selain itu, melalui wadah kerja sama kebahasaan antarnegara Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim), telah dihasilkan sejumlah peristilahan untuk berbagai bidang ilmu, bahkan beberapa di antaranya telah diolah lebih lanjut menjadi kamus istilah.
4. Sebagaimana yang dikutip Boediono (1993) berdasarkan laporan penelitian

kebijaksanaan Bank Dunia dalam *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy* yang diterbitkan pada bulan Agustus 1993 oleh Oxford University Press, setelah Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan yang lazim dijuluki "Macan Asia", Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan tiga negara industri baru di kawasan Asia Tenggara. Menurut penilaiannya, kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia yang telah mengakibatkan pesatnya pembangunan bidang ekonomi di Indonesia itu tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh bahasa Indonesia.

5. Angka-angka ini didasarkan pada penduduk usia 5 tahun ke atas yang berjumlah 158.262.639 orang.
6. Angka-angka ini didasarkan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang berjumlah 135.039.581 orang. Sehubungan dengan hal itu, dapat ditambahkan bahwa yang sudah dapat membaca dan menulis bukan huruf Latin berjumlah 2.145.277 orang (1,59%), sementara mereka yang tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai kepandaian membaca dan menulis ini berjumlah 34.360 orang (0,03 %).
7. Korelasi semacam itu dapat pula dilihat antara 27.055.488 orang penduduk Indonesia yang belum dapat berbahasa Indonesia dengan 27 juta penduduk Indonesia yang sering disebut-sebut sebagai sasaran upaya "pengentasan kemiskinan" yang tengah dilancarkan.
8. Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan media massa itu antara lain terlihat dalam pertemuan berkala (dua minggu sekali) yang disponsori oleh majalah TEMPO. Seiring dengan permasalahan yang dihadapi majalah mingguan itu, pertemuan tersebut kemudian terhenti. Akan tetapi, dengan prakarsa pimpinan salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, pertemuan berkala yang secara khusus membahas masalah bahasa di kalangan media massa itu "dihidupkan" kembali dalam suatu acara yang diresmikan tanggal 28 Juni 1995 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Atmakusumah Astraatmadja, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo, mengemukakan sejumlah kasus kesalahan bahasa dalam media massa, antara lain yang menyangkut tidak digunakannya tanda koma dan, dengan alasan penghematan kata, kata *dengan* pada kelompok kata seperti *sehubungan dengan* dan *sesuai dengan* (Seri Seminar LPDS 1994:7).
 - a. Gubernur mengatakan di Jakarta sekarang sering terjadi banjir.
 - b. Hal ini sesuai benar keputusan menteri nomor sekian itu?

Selain itu, media massa masih sangat sering menampilkan jenis kalimat rancu. Masalah akronim yang tidak lazim juga amat subur tumbuh dan berkembang di dalam media massa. Hal yang disebutkan terakhir ini merupakan masalah kebahasaan yang sangat serius untuk disadari oleh berbagai pihak secara lebih bersungguh-sungguh.

1. Setiap kali bahasa Indonesia diposisikan dalam kaitannya dengan upaya untuk mengetahui seberapa jauh ia berfungsi secara efektif dan efisien sebagai sarana komunikasi dalam bidang kehidupan tertentu, ada baiknya hal itu diawali dengan melihat korelasi antara fungsi yang dimaksudkan dan kedudukan bahasa Indonesia tersebut dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, sesuai dengan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, memiliki fungsi yang berbeda dari bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara, seperti yang tertera di dalam pasal 36 UUD 1945.¹

Dalam bidang pendidikan, yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara. Dalam bidang pendidikan ini, selain berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan,² bahasa Indonesia juga merupakan salah satu mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Baik sebagai bahasa pengantar maupun sebagai salah satu mata pelajaran, bahasa Indonesia memainkan peran yang mendasar dan strategis dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita, termasuk dalam upaya mencapai tujuan seperti yang tertera di dalam bagian pembukaan atau mukadimah UUD 1945, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Judul makalah di atas mengisyaratkan bahwa yang akan dibahas berikut ini adalah bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran dalam sistem pendidikan nasional kita.

2. Yang perlu disimak secara lebih cermat lagi ialah bagaimana jawaban yang dapat dikemukakan atas pertanyaan: dapatkah bahasa Indonesia

^{*)} Makalah Konvensi Nasional Pendidikan IV, 19–22 September 2000, Hotel Indonesia, Jakarta.

digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."³

Dalam konteks yang demikian, bahasa Indonesia menurut Kurikulum 1994 berfungsi "mengembangkan kemampuan bernalar, berkomunikasi, dan mengungkapkan pikiran dan perasaan, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa". Mengembangkan kemampuan bernalar memberi petunjuk bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana berpikir untuk menginternalisasi berbagai gagasan yang timbul dari diri seseorang, bagaimana hal itu berkorelasi dengan sejumlah faktor eksternal dari orang yang bersangkutan, dan akhirnya bagaimana yang bersangkutan sampai pada kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses berpikir atau internalisasi itu. Mengungkapkan pikiran dan perasaan jelas menggambarkan betapa pentingnya fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana ekspresi. Sementara itu, ihwal membina persatuan dan kesatuan bangsa pada hakikatnya harus dipandang sebagai salah satu tujuan dari manfaat pengoptimalan ketiga fungsi bahasa Indonesia itu, baik sebagai sarana internalisasi, sarana ekspresi, maupun sarana komunikasi.

3. Pengoptimalan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana internalisasi, sarana ekspresi, dan sarana komunikasi itu menyiratkan adanya dua sisi yang sepiantas lalu tampak berbeda, tetapi sesungguhnya sama dalam pengertian bahwa sisi yang satu berpotensi dalam menentukan atau memberi corak pada sisi yang lain. Kedua sisi yang dimaksudkan masing-masing berhubungan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana internalisasi pada satu sisi dan fungsi bahasa Indonesia sebagai ekspresi dan sarana komunikasi pada sisi yang lain. Dengan perkataan lain, sisi yang satu berimplikasi pada kecermatan berbahasa, sedangkan sisi yang lain pada keterampilan berbahasa.

Kalau kecermatan bernalar atau kecermatan berpikir itu dihubungkan dengan matematika sebagai mata pelajaran yang paling ber-

kemampuan melatih atau membiasakan murid untuk berpikir atau bernalar secara cermat, maka perbandingan alokasi waktu--dalam bentuk jumlah jam pelajaran--antara bahasa Indonesia dan matematika dalam Kurikulum 1994 benar-benar memperlihatkan tingkat korelasi yang tinggi. Selain itu, bahasa Indonesia dan matematika dalam hal alokasi waktu tersebut merupakan mata pelajaran "yang diunggulkan".⁴

Tingginya korelasi antara bahasa Indonesia dan matematika itu menunjukkan bahwa kerapian berbahasa seseorang pada dasarnya merupakan refleksi dari kecermatan berpikir orang yang bersangkutan. Angka NEM rata-rata SMU untuk bahasa Indonesia dan matematika selama empat tahun, yaitu mulai tahun 1993/1994 s.d. tahun 1996/1997, sebagaimana yang dilaporkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian, Balitbang Departemen Pendidikan Nasional (pada masa itu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), memberi petunjuk yang jelas mengenai hal itu, yakni seperti yang diperlihatkan oleh tabel berikut.

Mata Pelajaran	93/94			94/95			95/96			96/97		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
1. Bhs Indonesia	6,70	6,35	6,10	6,84	6,35	6,07	6,97	6,51	6,08	7,25	6,75	6,25
2. Matematika	5,41	4,35	3,17	4,83	3,99	3,30	5,76	4,18	3,61	6,15	4,51	3,99

Tabel di atas memperlihatkan bahwa baik untuk bahasa Indonesia maupun matematika, NEM rata-rata A1, A2, dan A3 menggambarkan kecenderungan bahwa A1 lebih baik daripada A2 dan A3 serta A2 lebih baik daripada A3. Jurusan IPS (A3) yang angka matematikanya lebih rendah daripada jurusan Biologi (A2) dan Fisika (A1) ternyata juga memperlihatkan prestasi yang sama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekali lagi hal itu jelas menunjukkan bahwa tingkat kecermatan bernalar atau berpikir akan berpengaruh langsung pada tingkat kerapian berbahasanya.

4. Keterampilan berbahasa, baik yang menyangkut bahasa lisan maupun bahasa tulis, yang berhubungan dengan fungsi bahasa sebagai sarana ekspresi dan sarana komunikasi itu diharapkan akan diperoleh murid lewat empat komponen dasar atau aspek pokok dalam pembelajaran bahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.⁵ Lewat keempat aspek pembelajaran bahasa itu, diharapkan siswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara lisan ataupun tertulis. Kemampuan berkomunikasi ini mempersyaratkan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini pada gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan bernalar atau berpikir, bahkan akan berpengaruh pula pada kemampuan memperluas wawasan.⁶

Keterampilan berbahasa itu hanya akan diperoleh jika murid diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa lisannya lewat latihan berbicara dan meningkatkan keterampilan berbahasa tulisnya lewat latihan menulis atau mengarang.⁷ Apabila aspek berbicara dan terlebih-lebih aspek menulis ini tidak memperoleh porsi perhatian yang memadai dalam kegiatan pembelajaran bahasa, dapatlah dipastikan bahwa mutu dan keterampilan berbahasa murid tidak akan pernah memberikan kesan yang menggembirakan.

5. Jika dibandingkan dengan GBPP 1984 dan GBPP sebelumnya, GBPP 1994 memperlihatkan adanya persamaan dan sekaligus perbedaan. Persamaannya menyangkut bahan atau materi, yaitu selalu disebutkan empat aspek yang telah disebutkan di atas (mendengar, berbicara, membaca, dan menulis), di samping aspek kosakata, tata bahasa, dan sastra. Adapun perbedaannya berkaitan dengan cara penyajian. GBPP 1984 mengenai cara penyajian ini merujuk pada enam pokok bahasan, yaitu membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan sastra. Sementara itu, GBPP 1994 tidak merujuk pada pokok bahasan, tetapi pada komponen yang berjumlah tiga buah, yaitu komponen kebahasaan, komponen pemahaman, dan komponen penggunaan. Perbedaannya dari pokok bahasan seperti yang terdapat dalam GBPP 1984 yang disajikan secara sendiri-sendiri, ketiga komponen menurut GBPP 1994 disajikan secara terpadu melalui penentuan tema

tertentu yang akan mewarnai ketiga pemahaman tersebut.⁸

Komponen kebahasaan menempatkan dan memperlakukan bahasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan sebagai satuan-satuan yang merupakan aspeknya seperti fonologi, morfologi, kalimat, dan paragraf. Oleh karena itu, keutuhan seperti itu juga harus diperhatikan dalam penyajian komponen pemahamannya. Bahan pembelajaran harus disajikan dalam sebuah wacana, bukan dalam kalimat-kalimat yang saling tidak berhubungan. Demikian pula halnya dengan komponen penggunaan sehingga aspek mendengar, berbicara, membaca, dan menulis harus disajikan secara terpadu pula. Dengan demikian, kegiatan berbahasa lisan dipadukan dengan kegiatan belajar berbahasa tulis, seperti halnya keterpaduan antara aspek reseptif dan aspek produktif (mendengar dan berbicara atau membaca dan menulis).

6. Dengan memperhatikan Kurikulum 1994, upaya apa pun yang menyangkut pengembangan kurikulum bahasa haruslah diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa murid, baik keterampilan berbahasa secara tertulis maupun keterampilan berbahasa secara lisan. Selain kurikulum dan bahan ajar, guru boleh dikatakan memiliki peran yang sangat dominan dan menentukan.

Bagaimanapun baiknya kurikulum dan bahan ajar, pembelajaran bahasa tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi itu ialah tenaga pengajar yang (1) memahami secara tersurat dan tersirat latar belakang, tujuan, dan isi Kurikulum 1994; (2) menguasai seluruh permasalahan kebahasaan yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sebagai bahan ajar; dan (3) memiliki wawasan yang mendalam tentang metodologi pengajaran bahasa.⁹

Tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan seperti itu dalam batas-batas tertentu tergolong sebagai tenaga pengajar yang profesional. Yang bersangkutan tidak hanya memenuhi kualifikasi tersebut di atas, tetapi juga--dan ini mungkin yang lebih penting--memiliki minat, perhatian, dan kecintaan yang mendalam terhadap bidang profesinya sebagai guru bahasa Indonesia. Unsur mi-

nat, perhatian, dan kecintaan itu akan selalu menjadi pelita dan pembimbing yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru bahasa Indonesia.

Tenaga pengajar yang profesional tidak akan berhenti terpaku hanya pada bahan dan cara mengajar yang telah digariskan. Ia akan senantiasa tampil sebagai seseorang yang kreatif dan inovatif sehingga pada akhirnya murid akan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan perasaan gembira tanpa mengabaikan sikap yang bersungguhsungguh.

CATATAN

1. Menurut Seminar Politik Bahasa 1999, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah. Adapun bahasa Indonesia dengan kedudukan sebagai bahasa negara berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemer kaya bahasa dan sastra daerah.
2. Lihat Pasal 41 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan di sekolah dan sejauh diperlukan, terutama pada tahun-tahun awal (kelas I--III) di sekolah dasar (Pasal 42 UU No. 2 Tahun 1989).
3. Tujuan pendidikan nasional itu termaktub di dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1989 (tentang Sistem Pendidikan Nasional).
4. Hal itu jelas terlihat dalam tabel berikut yang berisi susunan program pengajaran pendidikan dasar menurut Kurikulum 1994.

Jenjang dan Kelas Mata Pelajaran	SD						SLTP		
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8	6	6	6
4. Matematika	10	10	10	8	8	8	6	6	6
5. IPA	-	-	3	6	6	6	6	6	6
6. IPS	-	-	3	5	5	5	6	6	6
7. Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9. Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	-	4	4	4
10. Muatan Lokal	2	2	4	5	7	7	6	6	6
Jumlah	30	30	38	40	42	42	42	42	42

- Sebagaimana kita ketahui, aspek mendengarkan dan berbicara bermuara pada keterampilan berbahasa lisan, sedangkan aspek membaca dan menulis pada keterampilan berbahasa tulis.
- Lihat bagian rambu-rambu GBPP bahasa Indonesia untuk SLTP.
- Sudah lama diungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya mutu berbahasa Indonesia di kalangan murid. Sudah pula diketahui secara meluas faktor penyebabnya, yaitu hampir tidak pernahnya guru memberikan kesempatan kepada murid melatih kemampuan berbicara dan kemampuan menulisnya. Kambing hitamnya selalu dialamatkan pada besarnya jumlah murid dalam satu kelas yang mencapai 40 orang atau bahkan lebih sehingga kalau latihan menulis atau mengarang itu dilakukan sebagaimana mestinya, guru tidak akan mungkin dapat memeriksa karangan murid-muridnya itu dengan baik. Akibatnya, karena murid memang praktis tidak pernah mendapat kesempatan

an untuk berlatih menulis, bahasa Indonesia yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ketika mereka sudah menjadi mahasiswa seringkali membuat pusing dosen pembimbingnya. Itulah sebabnya Menteri Pendidikan Nasional menginstruksikan kepada semua Kakanwil Depdiknas agar mulai tahun ajaran ini pelajaran mengarang dihidupkan kembali, sekurang-kurangnya sekali dalam dua minggu. Menurut Menteri, lewat kegiatan mengarang sebenarnya murid dilatih untuk merumuskan pikiran-pikirannya dan hal itu akan sangat bermanfaat bagi hari depan mereka (*Kompas*, 9 September 2000, halaman 9, kolom 8--9).

8. Persamaan dan perbedaan antara GBPP 1994 dan GBPP 1984 itu antara lain dapat disimak dalam *Pokok-pokok Pengajaran Bahasa dan Kurikulum 1994* yang disusun oleh Bambang Kaswanti Purwo dan diterbitkan tahun 1997 oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Mengenai pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan, Seminar Politik Bahasa Tahun 1999 berpendapat bahwa kegiatan itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai suatu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian dengan tujuan meningkatkan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, Seminar menyebutkan empat kegiatan berikut yang perlu dilakukan.
 - (a) Pengembangan kurikulum bahasa Indonesia
 - (b) Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa
 - (c) Pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional
 - (d) Pengembangan sarana pengajaran bahasa yang memadai

PERSPEKTIF DAN PELUANG MASA DEPAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA INTERNASIONAL^{*)}

1. Pangkal Tolak Pertumbuhan Bahasa Indonesia

Pertumbuhan bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua tonggak "besar" yang tidak boleh dilupakan oleh siapa pun orang Indonesia. Tonggak pertama adalah Sumpah Pemuda (1928), khususnya ikrar ketiga: "*Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa Persatuan bahasa Indonesia*". Ikrar itu merupakan pernyataan sepakat bahwa bangsa Indonesia memilih bahasa Indonesia, di antara beratus-ratus bahasa yang ada di Indonesia, sebagai wahana yang mengikat bangsa Indonesia dalam satu tali persatuan. Sejak itu, setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia, wajib sifatnya menggunakan bahasa Indonesia ini dalam komunikasinya untuk menjalin persatuan. Kemudian yang sangat nyata juga dapat dirasakan adalah bahwa bahasa Indonesia kemudian menjadi jati diri bangsa Indonesia.

Kedudukan bahasa Indonesia semakin mantap ketika Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 secara tegas menetapkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal itu menuntut kepada kita, agar setiap kegiatan bernegara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah apalagi bahasa asing. Proses belajar mengajar baik dari tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi harus menggunakan bahasa Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan mulai yang di tingkat kelurahan sampai ke tingkat lembaga-lembaga tinggi negara pun juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak saja mempunyai peran sebagai bahasa persatuan, tetapi sejak itu juga menjadi bahasa resmi negara. Dalam kaitannya dengan bahasa nasional inilah, kemudian bahasa Indonesia mau atau tidak mau juga mengem-

^{*)} Tulisan untuk kumpulan karangan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro, Januari 1998.

ban fungsi-fungsi lain, misalnya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana komunikasi politis, dan pergaulan di dunia perdagangan.

2. Penutur dan Peran Bahasa Indonesia

Pertumbuhan penutur bahasa Indonesia di Indonesia ternyata juga mengalami pertumbuhan yang amat pesat. Dari hanya 4,9% penduduk Indonesia pada tahun 1920-an yang waktu itu berjumlah 57 juta jiwa, menjadi 5,2% dari 73 juta jiwa pada tahun 1940-an, menjadi 73,1% dari 179 juta penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 1990. Dari sekitar 131 juta penutur bahasa Indonesia menurut penghitungan sensus penduduk yang terakhir itu, ada 24 juta penutur (13,4%) yang telah menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari, dan bahkan, ada sekitar 19 juta penutur (10,6%) yang mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya.

Apa sebenarnya yang membuat kenaikan indeks peningkatan jumlah penutur bahasa Indonesia itu begitu tajam? Jawaban pokoknya adalah bahwa bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan setiap peran yang dibebankan kepadanya juga dapat diemban bahasa Indonesia itu secara baik.

a. *Sebagai Bahasa Persatuan*

Dalam masa-masa perjuangan, terutama sejak Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia telah menjadi alat komunikasi pemersatu suku-suku bangsa di Indonesia. Bahasa Indonesia telah berhasil mempersatukan lebih dari beratus-ratus suku yang biasanya bertutur menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dengan wahana bahasa Indonesia ini, tentu saja dengan dukungan dua ikrar Sumpah pemuda lainnya, beratus-ratus suku bangsa itu kemudian membuktikan dirinya bahwa mereka adalah bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Daya ikat bahasa Indonesia terhadap beratus-ratus suku bangsa di Indonesia ini tetap terasa sampai sekarang, lebih-lebih setelah disadari bahwa sebagai wahana komunikasi bahasa Indonesia ternyata juga dapat menembus batas-batas lapisan sosial karena bahasa

Indonesia memang tidak mengenal variasi berdasarkan lapisan-lapisan sosial yang tegas.

b. Sebagai Bahasa Negara

Peran sebagai bahasa negara tidak diragukan lagi. Peristiwa-peristiwa kenegaraan, dokumen-dokumen resmi, dan kegiatan-kegiatan lain di dalam penyelenggaraan negara dapat ditampung oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi wahana yang sangat memadai untuk peran-peran yang dibebankan kepadanya itu. Tidaklah mungkin bahasa Indonesia digunakan oleh pejabat tertinggi negara di dalam lawatannya ke mana pun apabila bahasa Indonesia memang tidak mempunyai kapasitas yang sangat memadai.

c. Sebagai Bahasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Banyak seminar dan pertemuan ilmiah yang mencoba mempertanyakan akan mampukah bahasa Indonesia berperan sebagai wahana ilmu pengetahuan. Dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang kita pilih saat ini, mestinya memang tidak diragukan lagi kemampuan bahasa Indonesia. Pada dasarnya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia memberi peluang-peluang pengembangan kode bahasa secara leluasa. Dalam penyerapan konsep-konsep iptek dari luar negeri, misalnya, bahasa Indonesia tidak "mengharamkan" pemakaian kata atau istilah asing dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahkan, memberi sarana dan formula yang harus ditempuh apabila menghadapi konsep dalam kata atau istilah asing. Misalnya, jika memang bahasa Indonesia benar-benar tidak menemukan padanan istilah asing atau kata yang dapat digunakan untuk menyebut konsep itu, maka kita dapat menyerapnya dengan mengadaptasikannya dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Atau, kalau terpaksa harus meminjam istilah asing, maka istilah itu harus dicetak miring. Itu semua dilakukan dalam upaya agar identitas bahasa Indonesia masih tetap terjaga. Ini membuktikan bahwa secara pasti dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mempunyai kemantapan peran sebagai bahasa iptek. Peristiwa transformasi iptek dapat dilakukan secara baik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Proses belajar-mengajar, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi dapat ber-

jalan lancar dengan media bahasa Indonesia. Demikian pula komunikasi di dunia bisnis, pariwisata, dan sebagainya.

3. Bahasa Indonesia di Luar Negeri

Kini 70 tahun setelah tonggak pertama atau 53 tahun setelah tonggak kedua dipancarkan, bahasa Indonesia itu menuju kemapanannya sebagai wahana komunikasi dalam lingkup yang lebih luas lagi. Dengan tujuannya masing-masing (agar dapat berbicara dalam bahasa Indonesia biasanya mendominasi tujuan itu) banyak orang asing yang mulai meminati bahasa Indonesia. Ini menyebabkan kita tidak hanya perlu melakukan kongres bahasa Indonesia, seperti *Kongres Bahasa Indonesia VII* yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 1998, tetapi juga perlu melakukan forum atau pertemuan yang secara khusus membahas pengajaran bahasa Indonesia untuk para penutur asing sebab bahasa Indonesia ternyata banyak juga diminati di negara-negara lain. Pertemuan atau forum semacam itu memang pernah diadakan, misalnya seminar *Studi Melayu-Indonesia di Eropa* yang diadakan untuk mempertemukan negara penyelenggara BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di Eropa secara berkala sejak 1978; *Seminar BIPA* tahun 1991 di Jakarta yang dihadiri oleh penyelenggara BIPA dari Australia dan Indonesia; *Konferensi Internasional Pengajaran BIPA I* pada tahun 1994 di Salatiga (Indonesia); *Kongres Internasional Pengajaran BIPA* di Jakarta tahun 1995; dan *Konferensi Internasional II Pengajaran BIPA* tahun 1996 di Padang, Sumatera Barat.

Dari forum-forum seperti itu tercatat bahwa selain di Indonesia dan kawasan Melayu, ada 29 negara yang juga menyelenggarakan pengajaran atau kursus bahasa Indonesia yang umumnya disebut BIPA. Negara-negara itu adalah

1. Amerika Serikat
2. Arab Saudi
3. Australia
4. Austria
5. Belanda
6. Bulgaria
7. Ceko
8. Cina

9. Denmark
10. Filipina
11. Hongkong
12. India
13. Inggris
14. Italia
15. Jepang
16. Jerman
17. Kanada
18. Korea
19. Mesir
20. Norwegia
21. Papua Nugini
22. Prancis
23. Rusia
24. Selandia Baru
25. Suriname
26. Swedia
27. Swiss
28. Vatikan
29. Vietnam

Di antara negara-negara itu, Prancis boleh dikatakan merupakan negara pertama yang mengajarkan BIPA. Bersama-sama dengan bahasa Arab, Persia, dan Turki, sejak tahun 1795 bahasa Indonesia (pada saat itu tentu saja masih bernama bahasa Melayu) diajarkan di *Institut National des Langues et Civilisations Orientales*, terutama untuk kepentingan politik dan perdagangan pemerintah Prancis. Setelah itu, berturut-turut BIPA mulai diajarkan di Jepang (1925), Amerika (1948), Cina (1950), Australia (1957), Italia (1964), Korea Selatan (1964), Inggris (1967), dan Selandia Baru (1968). Tidak diketahui secara pasti sejak kapan BIPA mulai diajarkan di Jerman. Meskipun demikian, penelitian tentang sejarah bahasa Melayu telah dilakukan oleh, misalnya, Dempwolff tahun 1934--1938. Sementara itu, Hilgers-Hesse dan R. Carle merupakan peneliti sastra Indonesia yang terkemuka. Dewasa ini di sana

ada tiga universitas yang sekaligus mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia (Hamburg, Köln, dan Frankfurt) dan ada enam universitas yang hanya mengajarkan bahasa Indonesia (Bremen, Bonn, Bielefeld, Gonttingen, Nürtingen, dan München).

Di Jepang ada tiga perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA: *Tenri Daigaku* (sejak 1925, bahkan untuk bahasa Melayu sejak 1911), *Kyoto Sangyo Daigaku* (sejak 1967), dan *Setsunan Daigaku* (sejak 1967). Pengajaran BIPA di Cina dikelola oleh Universitas Beijing, sedangkan di Korea Selatan oleh Universitas Bahasa Asing Hankuk. Bidang studi yang disebut Jurusan Malay-Indonesia ini diselenggarakan di dua kampus, yaitu di Kampus Seoul (sejak 1964) dan Kampus Yongin (sejak 1982).

School of Oriental and African Studies (SOAS) di London merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Inggris yang melaksanakan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang didampingi dengan pengajaran bahasa/sastra Belanda dan Arab, antropologi, ekonomi, hukum, politik, dan perbandingan agama. Hal penting yang perlu dicatat ialah bahwa bahasa/sastra Indonesia dapat dipelajari di SOAS untuk memperoleh gelar akademik sampai dengan jenjang pascasarjana.

Sama halnya dengan di Inggris dan Prancis, hanya ada satu lembaga pendidikan di Italia yang menyelenggarakan pengajaran BIPA, yaitu *Instituto Universitario Orientale* yang berada di kota Napoli. Sementara itu, dilihat dari segi jumlah lembaga pendidikan penyelenggara BIPA ini, keadaan di Selandia Baru lebih "menggembirakan" karena di sana terdapat tiga perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA, yaitu Universitas Auckland, Universitas Victoria (di Wellington), dan *Rangitoto College*.

Di Amerika Serikat pengajaran BIPA dipelopori oleh Prof. Isidore Dyen pada tahun 1948 di Universitas Yale, menyusul kemudian Prof. John Echols pada tahun 1951 di Universitas Cornell. Selain di kedua universitas tersebut, pengajaran BIPA juga dapat diikuti di tujuh universitas lainnya yaitu di Universitas Hawaii, Berkeley, Wisconsin, Ohio, Michigan, Northern Illinois, dan Arizona. Menurut hasil penelitian yang dilaporkan oleh Soemarmo (1988), bahasa Indonesia di Amerika merupakan bahasa Asia ketiga yang paling banyak dipelajari setelah bahasa Jepang dan Cina.

Mengenai penelitian bahasa Indonesia di Amerika, seperti yang di-

laporkan oleh Collins (1993), terdapat perubahan yang "menggembirakan". Sebelum *Kongres Bahasa Indonesia V* (1988) diadakan, penelitian bahasa Indonesia di Amerika selalu dikaitkan untuk kepentingan ekonomi, politik kolonial, dan perang. Sekarang kaitan seperti itu sudah ditinggalkan karena penelitian bahasa Indonesia yang dilakukan memperlihatkan hubungan yang jelas dengan penelitian linguistik tradisional, penelitian linguistik sosial, dan penelitian pedagogi bahasa Indonesia.

Pengajaran BIPA di Australia memperlihatkan corak dan warna tersendiri karena tidak hanya melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga sekolah dasar dan sekolah menengah. Tercatat tidak kurang dari 13 perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA. Universitas Sydney dan Universitas Melbourne memelopori kegiatan itu pada tahun 1957, sedangkan *University College of the Northern Territory* baru mengawali pengajaran BIPA pada tahun 1986. *Royal Australian Air Force School of Languages* bahkan menyelenggarakan kursus intensif bahasa Indonesiaa sejak tahun 1950. Kursus semacam itu, yang lebih singkat, juga dikelola oleh beberapa perguruan tinggi dan sekolah menengah.

Minat orang Australia yang begitu besar untuk mempelajari bahasa Indonesia itu, selain karena makin gencarnya arus pariwisata di antara penduduk kedua negara, terutama dari Australia ke Indonesia, juga disebabkan oleh pertimbangan yang lebih bersifat geopolitik, mengingat Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan ASEAN, di samping peranan Indonesia selaku pelopor dan pimpinan gerakan nonblok. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau bahasa Indonesia senantiasa bersaing dengan bahasa-bahasa asing yang diajarkan di Australia, yaitu bahasa Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Cina.

4. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional

Dengan memperhatikan kenyataan yang telah diuraikan pada bagian-bagian terdahulu, tampak jelas bahwa jumlah penutur bahasa Indonesia, dengan pengertian orang yang dapat menuturkan bahasa Indonesia, jauh lebih besar dari apa yang kita peroleh melalui sensus penduduk. Era globalisasi yang ditakutkan akan melindas bahasa Indonesia, bisa jadi justru sebaliknya menjadi peluang emas pertumbuhan bahasa Indonesia di kancah komunikasi tingkat internasional. Bukan tidak mungkin para

politikus, pelaku bisnis, atau wisatawan yang sengaja ingin menjangkau Republik Indonesia justru merasa perlu menyiapkan diri dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Terbukti, misalnya, di antara negara-negara penyelenggara BIPA di atas, ada pula yang juga menggunakan bahasa Indonesia dalam penyiaran. Beberapa media massa elektronik, atau khususnya radio seperti BBC, Radio Australia, Voice of America, Radio Belanda, dan sebagainya secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Dengan siaran dalam bahasa seperti itu, orang Indonesia dapat menangkap lebih banyak apa yang terjadi di negara-negara itu secara lebih jelas. Tentu saja informasi-informasi yang disampaikan itu akan mempengaruhi pertumbuhan segi-segi lain, misalnya perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara itu.

Selain itu, peran Indonesia di percaturan internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun bidang kebudayaan, sudah dipertimbangkan oleh negara-negara yang maju. Di tingkat ASEAN, misalnya, Indonesia mempunyai posisi yang amat strategis. Bukan saja karena potensi alam dan kestabilan politiknya, tetapi beberapa negara anggota ASEAN juga menggunakan bahasa Indonesia/Melayu. Ini menyebabkan mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia memberi manfaat yang banyak bagi negara-negara anggota ASEAN. Dengan kenyataan pertumbuhan minat belajar bahasa Indonesia di luar negeri yang sangat menggembirakan itu, besarlah kemungkinan bahasa Indonesia ini pun akan diterima di percaturan internasional. Bukan tidak mungkin pelaku-pelaku bisnis akan melakukan transaksi bisnisnya dalam bahasa Indonesia. Bukan tidak mungkin percaturan politik tingkat internasional juga dapat dilakukan dalam bahasa Indonesia.

Sehubungan dengan hal itu, agar orang-orang asing pun tetap menganggap bahasa Indonesia itu layak digunakan sebagai sarana komunikasi baik di bidang politik, ekonomi, pariwisata, dan tentu saja ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dilakukan upaya-upaya mengembangkan bahasa Indonesia sejalan dengan perkembangan bidang-bidang di atas, dan merumuskan pola pembinaan terhadap penutur bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Berkaitan dengan pengembangan bahasa Indonesia sejalan dengan kemajuan di semua bidang tadi,

pengembangan kosakata bahasa Indonesia, penyelarasan istilah, peman-tapan dan pembakuan kaidah-kaidah bahasa Indonesia perlu terus dila-kukan.

Dalam keadaan seperti itu, cukuplah alasan bahwa bahasa Indonesia ini berpotensi menjadi bahasa besar, berpotensi menjadi bahasa komuni-kasi di tingkat internasional. Akan tetapi, sudah siapkah bahasa Indonesia menghadapi masa depan yang seperti itu? Pertanyaan itu memunculkan pertanyaan lain seperti: *Sudah benarkah kita memperlakukan bahasa In-donesia?* dan *Sudah benarkah cara kita membina penutur bahasa In-donesia?* Sebagian besar memang telah dilakukan secara benar, tetapi perkembangan jangkauan penyebaran bahasa Indonesia menuju ke ber-bagai negara itu membuat kita tetap perlu mencari jawaban atas per-tanyaan-pertanyaan tadi.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ASING*)

Judul makalah ini tidak sama dengan yang diminta oleh Panitia, yaitu "Perkembangan Bahasa Indonesia se-Dunia". Perubahan judul itu terpaksa dilakukan berdasarkan dua alasan. Pertama, karena tidak tersedianya informasi dan data yang dapat disajikan dalam makalah dengan judul seperti yang diminta Panitia itu. Kedua, judul yang dipilih sebagai pengganti itu rasanya cukup sesuai dengan tema Simposium.

Yang dimaksud dengan *bahasa Indonesia sebagai bahasa asing* dalam judul makalah ini ialah bahasa Indonesia yang diajarkan kepada atau yang dipelajari oleh mereka yang tidak tergolong sebagai orang Indonesia. Dengan pengertian seperti itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa asing (selanjutnya disebut BIPA) tidak hanya diberikan oleh lembaga pendidikan di luar Indonesia, tetapi juga oleh lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang berada di Indonesia. Untuk keperluan makalah ini, yang akan dipaparkan hanyalah pengajaran bahasa Indonesia yang diajarkan oleh beberapa perguruan tinggi yang berada di luar Indonesia.

Dengan mengecualikan Negeri Belanda yang memiliki Universitas Leiden yang sudah sejak lama dikenal sebagai pusat studi untuk bahasa dan sastra Indonesia, melalui Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988 di Jakarta kita memperoleh informasi yang cukup memadai mengenai pengajaran BIPA di luar Indonesia. Pertama-tama tentu perlu disebutkan Jepang, Korea Selatan, dan Cina sebagai tiga negara Asia terkemuka yang mengajarkan BIPA. Akan tetapi, karena informasi yang lebih mutakhir mengenai pengajaran BIPA di ketiga negara itu akan kita peroleh melalui simposium ini, maka hal itu tak akan disinggung pada makalah ini.

Perancis, Jerman, Inggris, dan Italia patut dicatat sebagai empat ne-

*) Makalah "Simposium Perkembangan Bahasa Indonesia di Kawasan Timur Jauh" yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Juli 1993 di Tokyo.

gara Eropa Barat yang mengajarkan BIPA. Selain itu, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan tentu saja Australia juga tak kalah pentingnya dalam hal perintisan dan pengembangan pengajaran BIPA. Berdasar kan urutan waktu yang menandai dimulainya pengajaran BIPA, Perancis boleh dikatakan meru pakan negara pertama. Bersama-sama dengan bahasa Arab, Persia, dan Turki, sejak tahun 1795 bahasa Indonesia (pada saat itu tentu saja masih bernama bahasa Melayu) diajarkan di Institut National des Langues et Civil isations Orientales, terutama untuk kepentingan politik dan perdagangan pemerintah Peran cis. Setelah itu, berturut-turut BIPA mulai diajarkan di Amerika (1948), Australia (1957), Italia (1964), Inggris (1967), dan Selandia Baru (1968). Tidak diketahui secara pasti sejak kapan BIPA mulai diajarkan di Jerman. Meskipun demikian, penelitian tentang sejarah bahasa Melayu telah dilakukan oleh, misalnya, Dempo-wolff tahun 1934--1938. Sementara itu, Hilgers-Hesse dan R. Carle merupakan peneliti sastra Indonesia yang terkemuka.¹ Dewasa ini di sana ada tiga universitas yang sekaligus mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia (Hamburg, Köln, dan Frankfurt) dan ada enam universitas yang hanya mengajarkan bahasa Indonesia (Bremen, Bonn, Bielefeld, Gottingen, Nurti ngen, dan Munchen).

School of Oriental and African Studies (SOAS) di London merupakan satu-satu nya perguruan tinggi di Inggris yang melaksanakan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang didampingkan dengan pengajaran bahasa/sastra Belanda dan Arab, antropo logi, ekonomi, hukum, politik, dan perbandingan agama. Hal penting yang perlu dica tat ialah bahwa bahasa/sastra Indonesia dapat dipelajari di SOAS untuk memperoleh gelar akade mik sampai dengan jenjang pascasarjana.

Sama halnya dengan di Inggris dan Perancis, hanya ada satu lembaga pendidikan di Italia yang menyelenggarakan pengajaran BIPA, yaitu Istituto Universitario Orien tale yang berada di kota Napoli. Sementara itu, dilihat dari segi jumlah lembaga pen didi kan penyelenggara BIPA ini, keadaan di Selandia Baru lebih "menggembirkan" karena di sana terdapat tiga perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA, yaitu Universitas Auckland, Universitas Victoria (di Wellington), dan Rangitoto College.

Di Amerika Serikat pengajaran BIPA dipelopori oleh Prof. Isidore Dyen pada tahun 1948 di Universitas Yale, menyusul kemudian Prof.

John Echols (yang di Indonesia kamus susunannya sangat dikenal secara meluas) pada tahun 1951 di Universitas Cornell. Selain di kedua universitas tersebut, pengajaran BIPA juga dapat diikuti di tujuh universitas lainnya yaitu di Universitas Hawaii, Berkeley, Wisconsin, Ohio, Michigan, Northern Illinois, dan Arizona. Menurut hasil penelitian yang dilaporkan oleh Soemarmo (1988), bahasa Indonesia di Amerika merupakan bahasa Asia ketiga yang paling banyak dipelajari (setelah bahasa Jepang dan Cina).

Pengajaran BIPA di Australia memperlihatkan corak dan warna tersendiri karena tidak hanya melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga sekolah dasar dan sekolah menengah. Tercatat tidak kurang dari 13 perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA. Universitas Sydney dan Universitas Melbourne memelopori kegiatan itu pada tahun 1957, sedangkan University College of the Northern Territory baru mengawali pengajaran BIPA pada tahun 1986. Royal Australian Air Force School of Languages bahkan menyelenggarakan akan kursus intensif bahasa Indonesia sejak tahun 1950. Kursus semacam itu, yang lebih singkat, juga dikelola oleh beberapa perguruan tinggi dan sekolah menengah.

Minat orang Australia yang begitu besar untuk mempelajari bahasa Indonesia itu, selain karena makin gencarnya arus pariwisata di antara penduduk kedua negara, terutama dari Australia ke Indonesia, juga disebabkan oleh pertimbangan yang lebih bersifat geopolitik, mengingat Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan ASEAN, di samping peranan Indonesia selaku pelopor dan pimpinan gerakan nonblok. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau menurut Survei 1983, seperti yang di kemukakan oleh Sarumpaet (1988), bahasa Indonesia menempati urutan keempat di antara bahasa-bahasa asing yang diajarkan di Australia, setelah bahasa Perancis, Jerman, dan Italia.

Berkenaan dengan materi pengajaran, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya pengajaran bahasa dikaitkan dengan rangka memperkenalkan sastranya. Melalui karya-karya sastra yang sudah diterjemahkan, makin jelas terlihat bahwa sastra tidak hanya menopang pengajaran bahasa dalam rangka memperkaya perbendaharaan kosakata para pelajar/mahasiswa, tetapi juga sangat bermanfaat untuk mengamati gaya bahasa yang di gunakan. Bahkan hal itu pada gilirannya dapat dijadikan

salah satu pintu masuk ke arah pengenalan perikehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia dalam arti yang luas.

Dengan memperhatikan dorongan semangat yang melatarbelakangi pilihan untuk mempelajari BIPA (masalah ini juga akan disinggung), persoalan yang dihadapi ialah bagaimana sebaiknya proporsi perbandingan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Ada kecenderungan bahwa bahasa lisan perlu lebih diperhatikan daripada bahasa tulis. Hal itu berarti bahwa kurikulumnya harus disusun sedemikian rupa sehingga para mahasiswa memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk melatih dan meningkatkan keteampilan dan penguasaan bahasa lisannya, baik pada saat menyimak maupun (terlebih-lebih) pada saat berbicara.

Upaya peningkatan penguasaan dan keterampilan berbahasa lisan ini dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas. Upaya ke arah itu perlu didukung, antara lain, oleh tersedianya berbagai bahan pengajaran yang diperlukan (termasuk buku dan kamus), laboratorium bahasa, dan (tenaga pengajar) penutur asli. Melakukan kunjungan langsung ke Indonesia dan tinggal di sana untuk beberapa waktu tentu merupakan hal yang akan sangat membantu, bukan saja karena yang bersangkutan akan memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperagakan sambil meningkatkan kemampuan bahasa lisannya, melainkan juga sekaligus yang bersangkutan akan mengetahui begitu beragamnya cara orang Indonesia berbahasa. Sebagai akibatnya, kalau kita berbicara mengenai usaha pembakuan, hal itu hanya mungkin dapat diterapkan (dan memang sudah diprioritaskan) terhadap bahasa tulis, terutama bahasa tulis ragam resmi melalui pemasyarakatan bahasa Indonesia (yang telah disepakati untuk disebut) yang baik dan benar. Upaya pembakuan dengan tujuan dan intensitas yang seperti itu sangat tidak mungkin dapat dilakukan terhadap pemakaian bahasa Indonesia lisan oleh masyarakat penutur di Indonesia secara menyeluruh.²

Kecenderungan untuk lebih memperhatikan/mengutamakan bahasa lisan daripada bahasa tulis itu didasarkan pada tuntutan untuk menguasai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi semata-mata untuk mencapai tujuan lain, misalnya agar dapat melakukan penelitian di Indonesia dalam bidang yang tidak ada kaitannya dengan bahasa dan sastra Indonesia. Dapat dikemukakan bahwa para peminat BIPA di berbagai negara pada

umumnya "didominasi" oleh mahasiswa jurusan antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, perbandingan agama, dll. Tuntutan semacam itu bahkan datang pula dari kalangan masyarakat di luar universitas sehingga tidaklah mengherankan kalau Nothofer (1988) merasa perlu untuk melaporkan bahwa para peminat BIPA di Jerman dari luar universitas lebih banyak jumlahnya daripada yang berasal dari dalam universitasnya (mahasiswa) sendiri.

Motivasi untuk mempelajari BIPA itu secara jelas terlihat pada laporan Soemarmo (1988) mengenai keadaan di Amerika. Ingin dapat berbicara (sebanyak 83%) merupakan urutan tertinggi sehubungan dengan alasan mempelajari bahasa Indonesia. Hal itu dikondusikannya dengan alasan ingin dapat menulis makalah (sebanyak 13%) yang menempati urutan paling bawah. Di antara keduanya berturut-turut terdapat alasan:

- a. berencana mengunjungi Indonesia (75%),
- b. agar dapat membaca surat kabar dan buku-buku terbitan Indonesia (63%),
- c. ingin mempelajari kebudayaan Indonesia (57%),
- d. agar dapat menulis surat dalam bahasa Indonesia (40%),
- e. untuk keperluan pekerjaan (38%),
- f. karena memiliki teman/keluarga di Indonesia (17%), dan
- g. ingin melakukan penelitian di Indonesia (16%).

Pada laporan itu dikemukakan juga urutan bidang yang ingin diketahui, yaitu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. sejarah (76%) | f. kesenian (49%) |
| b. politik (67%) | g. ekonomi (41%) |
| c. masalah sosial (65%) | h. bahasa daerah (24%) |
| d. cerita rakyat (57%) | i. olahraga (6%) |
| e. kesusasteraan (52%) | |

Minat mahasiswa Amerika itu cukup menarik untuk dibandingkan dengan minat sarjana Jerman ahli studi Indonesia. Seperti yang dikutip oleh Nothofer (1988), berdasarkan ahli studi Indonesia pada tahun 1987 yang berjumlah 127 orang, pemeringkatnya adalah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. antropologi (30 orang) | d. agama (9 orang) |
| b. ilmu-ilmu sosial (12 orang) | e. sastra (7 orang) |
| geografi (12 orang) | f. sejarah (6 orang) |
| c. ekonomi (10 orang) | g. kesenian (5 orang) |
| ilmu-ilmu terapan (10 orang) | |
| linguistik (10 orang) | |

Setelah kesenian, masih ada sejumlah bidang lain yang jumlah ahlinya berkisar antara satu sampai tiga orang.³

Di atas telah disebutkan bahwa keberhasilan pengajaran BIPA yang berorientasi pada penguasaan bahasa lisan antara lain ditentukan oleh faktor sarana (laboratorium bahasa) dan manusia (pengajar/penutur asli). Dalam konteks yang tidak dibatasi oleh penekanan terhadap keperluan tertentu seperti itu, buku rujukan yang digunakan dalam penyelenggaraan BIPA pastilah memainkan peran utama yang akan sangat menunjang keberhasilan tersebut. Agar buku rujukan pelajaran BIPA itu sesuai dengan latar belakang kebahasaan para mahasiswa yang mempelajarinya, maka perlu diusahakan agar untuk sekurang-kurangnya satu negara terdapat satu buku rujukan. Mungkin saja dapat dilakukan upaya yang melebihi hal itu, yakni setiap perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA dapat menyusun dan mengelaborasi bahan pelajarannya masing-masing, termasuk dalam penyusunan buku rujukan tersebut.⁴

Upaya setiap negara atau setiap perguruan tinggi penyelenggaraan BIPA seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk "mempertemukan" para penyelenggara BIPA. Simposium ini jelas merupakan bentuk tindak lanjut yang akan sangat bermanfaat bukan hanya dalam rangka saling menukar pengalaman dan informasi mengenai pengajaran BIPA di negara/perguruan tinggi masing-masing, melainkan juga dalam rangka melakukan koordinasi dan membina kerja sama agar pengajaran BIPA di kawasan Timur Jauh ini dapat ditingkatkan lagi.

Pertemuan koordinasi yang demikian dilakukan oleh negara-negara penyelenggara BIPA di Eropa. Sejak 1978 diadakan semacam seminar atau lokakarya "Studi Melayu-Indonesia di Eropa". Kegiatan itu diadakan secara berkala, dua tahun sekali. Pertemuan kedua bahkan diadakan ha-

nya setahun setelah pertemuan pertama: 1978 di Paris dan 1979 di London. Kota lain yang pernah menjadi penyelenggara, antara lain, Napoli, Leiden, Sintra (Portugal), Passau, dan Bern. Dapat ditambahkan bahwa pada tahun 1991 di Jakarta telah diadakan "Seminar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing)" yang dihadiri oleh wakil-wakil perguruan tinggi penyelenggara BIPA dari Australia dan Indonesia. Menurut rencana, pada tahun 1994 di Salatiga (Indonesia), dengan Universitas Kristen Sastya Wacana sebagai tuan rumah, akan diadakan pertemuan semacam itu dengan mengikutsertakan para penyelenggara BIPA yang lebih luas.

Dalam hubungan itu, patut pula dicatat berbagai kegiatan serupa yang tidak saja diprakarsai dan diselenggarakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh Malaysia dan Brunei Darussalam, baik yang berkenaan dengan bahasa dan sastra Indonesia, maupun yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Melayu. Catatan khusus dapat ditambahkan sehubungan dengan bahasa Indonesia/Melayu ini. Pertama, seminar tahun 1992 di Tanjung Pinang, dihadiri oleh para peserta yang mewakili kelima negara anggota ASEAN, dengan tema: Bahasa Melayu (bahasa Indonesia) sebagai Bahasa Pergaulan di Kawasan Asia Tenggara. Kedua, seminar tahun 1993 yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional (Jakarta), di bawah pimpinan Prof. Sutan Takdir Alisjahbana, bertujuan mengupayakan, melalui pembakuan (standarisasi), agar yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah jenis bahasa yang sama.⁵

Upaya yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang upaya peningkatan pengajaran BIPA itu dapat dilakukan melalui terbitan-terbitan berkala. Masalahnya adalah seberapa jauh kita bisa memanfaatkan terbitan-terbitan semacam itu. Mengenai terbitan ini dapat disebutkan, antara lain, *Bijdragen* (Belanda), *Archipel* (Perancis), *Rima* atau *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* (Australia), dan *Papers on Oriental Studies* (Cina). Di Malaysia ada *Dewan Bahasa* dan *Dewan Sastra* yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sedangkan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ialah (majalah) *Bahasa dan Sastra*. Kalau perlu, para penyelenggara BIPA peserta Simposium ini pun dapat pula mempertimbangkan kemungkinan melakukan kerja

sama dalam hal terbitan seperti itu.

Selain itu, kerja sama antara penyelenggara BIPA di luar Indonesia dengan mitranya yang berada di Indonesia pasti akan merupakan upaya yang akan banyak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Masih banyak upaya lainnya yang dapat dibicarakan dalam rangka meningkatkan pengajaran BIPA ini. Untuk itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sesuai dengan kemampuan dan batas-batas kewenangannya, akan memberikan bantuan yang diperlukan.

CATATAN

1. Untuk Italia, Giovanni Gaggino (lahir tahun 1846 di sebuah kota kecil dekat Genova), meskipun belum dapat digolongkan sebagai peneliti bahasa yang sebenarnya, pada tahun 1884 di Singapura berhasil menerbitkan sebuah kamus kecil bahasa Italia-Melayu untuk keperluan percakapan sehari-hari. Sebagai seorang pedagang, sebagian besar hidupnya dia jalani di Singapura dan meninggal tahun 1918 di sebuah sanatorium di Garut, Jawa Barat.
2. Strategi pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu memperhatikan hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 1990 (yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, Jakarta). Berdasarkan jenis bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh penduduk yang berusia 5 tahun ke atas, diketahui angka-angka sebagai berikut. Penduduk yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 23.802.520 (15,07%). Penduduk yang secara tegas menyatakan tidak dapat berbahasa Indonesia berjumlah 27.055.488 (17,13%). Sementara itu, ada pula golongan penduduk yang dapat berbahasa Indonesia, tetapi tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari; jumlahnya 107.066.316 (67,80%).
3. Pada bagian lain Nothofer (1988) juga mengutip dari sumber yang sama, yakni *Dictionary of West European Indonesianist* tahun 1987. Berdasarkan ahli-ahli studi Indonesia yang terdapat di Eropa yang jumlahnya 760 orang, diketahui bahwa yang terbanyak terdapat di Belanda (423 orang), kemudian secara berturut-turut (sampai peringkat ke-5) diikuti oleh Jerman (127 orang), Inggris (84 orang), Perancis (53 orang), dan Swis (25 orang). Berdasarkan bidang keahliannya, keadaan di kelima negara Eropa Barat itu menunjukkan bahwa yang paling banyak ialah ahli di bidang antropologi (174 orang), kemudian sejarah (130 orang), ekonomi (59 orang), dan lingu-

istik (53 orang). Setelah peringkat ke-4 itu, terlihat, antara lain, bahwa ahli di bidang sastra berjumlah 30 orang, sedangkan yang meminati bidang agama ada 27 orang.

4. Nothofer, Pampus, dan Poedjosoedarmo secara bersama-sama menyusun *Bahasa Indonesia: Indonesisch fur Deutsche* (2 jilid) untuk pengajaran BIPA di Jerman. Untuk Perancis tercatat dua buku, yakni *Introduction à l'Indonésien* karangan D. Lombard dan *Méthode d'Indonésien* yang disusun oleh P. Labrousse dan F. Soemargono. Di Amerika ada *Beginning Indonesian* yang ditulis oleh John U. Wolff. Yang paling banyak terdapat di Australia, sekurang-kurangnya ada 25 buah, lima di antaranya (sekadar contoh) adalah:
 - a. *Introduction to Bahasa Indonesia* (J.P. Sarumpaet dan J.A.C. Mackie)
 - b. *Indonesian fur Schools* (V.J. Turner)
 - c. *Learn Indonesian* (J.D. McGarry dan Sumaryono)
 - d. *Bahasa Indonesia: Langkah Baru, A New Approach* (Yohanni Johns)
 - e. *Essentials of Indonesian Grammar* (Li Chuan Siu)
5. Pada seminar itu penulis mengemukakan bahwa upaya pembakuan dengan tujuan seperti itu sangat tidak mungkin dapat dilakukan. Meskipun bahasa yang digunakan di ketiga negara itu bersumber dari bahasa yang sama (bahasa Melayu), perkembangan dan arah pengembangannya di negara masing-masing memperlihatkan perbedaan yang cukup besar. Dengan perkataan lain, bahasa di ketiga negara itu tidak dapat diseragamkan, apalagi melalui semacam usaha rekayasa. Yang dapat dilakukan ialah mengupayakan agar bahasa di ketiga negara itu benar-benar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang mantap di segala bidang, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern. Untuk itu, sejak tahun 1972 ada wadah kerja sama yang disebut *MBIM* (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia). Mulai tahun 1985, karena Brunei Darussalam ikut, nama wadah itu berubah menjadi *Mabbim* (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia). Tujuan utamanya ialah menyusun istilah dalam bidang iptek tersebut. Yang diprioritaskan ialah istilah untuk empat bidang ilmu dasar, yaitu biologi, kimia, matematika, dan fisika. Menurut program kegiatan untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang, upaya penyusunan istilah itu akan dialihkan pada bidang ekonomi, kedokteran, filsafat, linguistik, dan sastra.

UPAYA MENINGKATKAN PENGAJARAN BIPA DI LUAR INDONESIA*

1. Bahasa Indonesia sudah lama diajarkan di luar negeri, bahkan sejak sebelum nama bahasa Indonesia digunakan secara resmi sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928 yang merupakan keputusan Kongres Pemuda II.¹ Setiap negara melaksanakan pengajaran bahasa Indonesia dengan cara masing-masing, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, tenaga pengajar yang ada, ketersediaan bahan pelajaran dan sarana pendukung pengajaran yang lain (seperti kamus, bahan bacaan, dan laboratorium bahasa), serta jumlah mahasiswa yang berminat mempelajari bahasa Indonesia. Satu-satunya alat pengikat yang dapat "mendekatkan" para pengelola pengajaran bahasa Indonesia di berbagai negara itu² ialah perkembangan atau perubahan metodologi pengajaran, khususnya yang menyangkut pengajaran bahasa asing.

Ketiadaan kontak di antara negara/universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia itu berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurut catatan, baru mulai tahun 1978 diselenggarakan seminar/lokakarya berkala (setiap dua tahun?) "Studi Melayu-Indonesia di Eropa".³ Universitas-universitas di Asia Timur telah dua kali mengadakan Simposium Perkembangan Bahasa Indonesia di Kawasan Asia Timur, yaitu di Tokyo (19--20 Juli 1993) dan Beijing (14--17 Desember 1995).⁴

Yang cukup unik ialah perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Papua Nugini. Dengan maksud lebih memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di negara itu, Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby mengupayakan siaran pelajaran bahasa Indonesia lewat televisi (seminggu sekali) dan mengisi surat kabar setempat dengan bahan pelajaran bahasa Indonesia (juga

* Makalah Seminar dan Workshop Penyebaran/Peningkatan Studi Bahasa dan Kebudayaan Indonesia, Passau (Jerman), 18--21 September 1997.

seminggu sekali). Sejak setahun terakhir ini bahkan tengah disusun kamus tiga bahasa: Inggris-Indonesia-Pidgin. Sementara itu, beberapa universitas Australia menempuh cara yang dianggapnya lebih efektif dan efisien, yaitu menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi tertentu di Indonesia.⁵

2. Bahasa Indonesia yang diajarkan di luar negeri itu sekarang lazim disebut BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia terdapat juga di Indonesia. Itulah sebabnya beberapa perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 70-an juga mengajarkan BIPA.⁶ Kenyataan inilah yang melatarbelakangi dan menggerakkan adanya kerja sama di antara sejumlah universitas di luar negeri dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pengajaran BIPA, baik melalui pertukaran dosen maupun mahasiswanya (lihat juga Catatan 5).

Untuk memberi kesempatan kepada para pengelola BIPA di luar negeri dan Indonesia agar mereka dapat bertemu, saling bertukar wawasan dan pengalaman, maka pada Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988 dan juga pada Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993 masalah BIPA ini dibicarakan dalam sidang kelompok khusus.⁷ Kalau pada Kongres 1988 hanya disimpulkan tiga hal yang menyangkut kerja sama antar-pengelola BIPA di luar negeri, bantuan dari pihak (pemerintah) Indonesia, dan perlunya dibentuk satu pusat internasional untuk kajian bahasa Indonesia, maka pada kongres 1993 kesimpulan tentang pengajaran BIPA mencakupi bidang yang lebih luas lagi. Upaya peningkatan mutu pengajaran BIPA lebih eksplisit dan dirinci, ada yang menyangkut dosen berikut kurikulum dan materi pengajaran dan ada pula yang berkenaan dengan perlunya dilakukan penelitian yang cukup komprehensif tentang aspek-aspek pengajaran BIPA. Selain itu, unsur budaya mendapat penekanan yang penting dalam kaitannya dengan materi BIPA.⁸

3. Sejak Kongres Bahasa Indonesia 1988 membicarakan BIPA, berbagai forum diadakan. Pada bulan Februari 1991 Fakultas Sastra Universitas Indonesia tampil sebagai penyelenggara "Seminar BIPA" yang pesertanya mewakili sejumlah perguruan tinggi dari dua negara: Indonesia

dan Australia. Kemudian Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga mengadakan "Konferensi Internasional I Pengajaran BIPA" pada tanggal 20--23 Januari 1994, sedangkan "Konferensi Internasional II Pengajaran BIPA" diadakan oleh IKIP Padang pada tanggal 29 Mei--1 Juni 1996. Kedua konferensi ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sebelum Konferensi Padang, Universitas Indonesia mengadakan "Kongres Internasional Pengajaran BIPA" (28--30 Agustus 1995). Yang menarik ialah persoalan nama: di Salatiga dan Padang digunakan *konferensi*, sedangkan Universitas Indonesia menggunakan *kongres*.⁹ Sementara itu, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia telah pula menjadi tuan rumah "Kongres Bahasa Melayu Sedunia" di Kuala Lumpur pada tanggal 21--25 Agustus 1995. Konsep bahasa Melayu pada kongres itu bercorak supra-nasional karena cakupannya meliputi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, termasuk bahasa Melayu yang digunakan di Brunei Darussalam (lihat juga Catatan 3 dan 4).

4. Salah satu keputusan Kongres Bahasa Indonesia 1993 berkenaan dengan upaya meningkatkan mutu pengajaran BIPA. Unsur pertama dan utamanya ialah bahan pengajaran, terutama yang berupa buku. Mengingat sudah cukup memadainya, terutama dari segi jumlah, buku pelajaran yang digunakan untuk keperluan pengajaran BIPA, sekarang ini sudah saatnya dilakukan penelitian terhadap semua buku pelajaran BIPA yang telah diterbitkan dan digunakan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Dilihat dari segi bahasa yang digunakan, ada buku pelajaran yang menitikberatkan pada penguasaan bahasa yang baku dan ada pula yang lebih mementingkan penguasaan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkataan lain, yang disebutkan terakhir ini berorientasi pada penguasaan bahasa percakapan. Dalam menghadapi pilihan semacam itu, yang perlu dijadikan pertimbangan utama ialah tujuan penutur asing yang bersangkutan dalam mempelajari bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa (bahasa baku atau bahasa percakapan) itu perlu dilengkapi dengan pengenalan terhadap unsur budayanya.

Pengenalan terhadap unsur budaya ini sebaiknya dilakukan melalui

pengiriman mahasiswa yang bersangkutan ke Indonesia dan tinggal di sana beberapa lama, bergaul dengan sesama mahasiswa dari Indonesia, berbicara dengan orang-orang Indonesia yang kelompok etnisnya sangat beragam, mengetahui adat-istiadat dan kebiasaan mereka, dan lain-lain. Dalam keadaan "darurat", yaitu apabila pengiriman mahasiswa ke Indonesia itu tidak mungkin dilakukan, pengenalan terhadap unsur budaya ini bisa ditempuh melalui bahan bacaan, termasuk surat kabar dan majalah Indonesia, melihat rekaman elektronik yang secara audio-visual menggambarkan "denyut budaya" Indonesia. Khusus dalam hal ini perwakilan Indonesia di luar negeri dapat berperan secara lebih aktif. Oleh karena itu, perwakilan Indonesia di suatu negara perlu mengetahui lembaga-lembaga pendidikan mana yang mengajarkan BIPA sambil sekaligus berupaya mengetahui pula kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan penelitian terhadap buku-buku pelajaran BIPA itu, paling tidak dapat disusun suatu buku pelajaran yang berlaku secara umum untuk negara yang bersangkutan. Dari buku "resmi" untuk setiap negara itu dapat pula disusun semacam buku pelengkap, yaitu buku yang disusun oleh masing-masing lembaga pendidikan penyelenggara pengajaran BIPA itu sendiri. Untuk itu, pertemuan berkala di antara para penyelenggara pengajaran BIPA di suatu negara akan memberikan manfaat yang makin berarti.

5. Pengajar BIPA di luar Indonesia seyogianya dilengkapi oleh seorang penutur asli yang sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan sarjana (S1). Akan tetapi, kenyataannya sering menunjukkan bahwa tenaga pengajar Indonesia tersebut belum tentu berlatar belakang pendidikan dan memiliki kualifikasi yang cocok untuk keperluan pengajaran BIPA. Ada kalanya, mungkin dalam keadaan terpaksa, persyaratan seperti itu terpaksa pula "dilupakan" karena yang penting adalah menampilkan sosok bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Indonesia sendiri. Kasus seperti ini harus dianggap sementara. Apabila tidak, hal itu pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi upaya pencapaian tujuan yang sebenarnya dari pengajaran BIPA itu sendiri.¹⁰

6. Pertumbuhan dan perkembangan pengajaran BIPA sekarang, baik yang diselenggarakan di luar Indonesia maupun di Indonesia, sudah mencapai taraf yang tidak lagi memungkinkan penyelenggara pengajaran BIPA itu asyik berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, kerja sama dan koordinasi di antara mereka merupakan sesuatu yang dari waktu ke waktu memerlukan perhatian yang makin bersungguh-sungguh.

Kerja sama dan koordinasi yang demikian dapat dilaksanakan melalui pertemuan berkala, baik di antara para penyelenggara BIPA di suatu negara tertentu, di antara sejumlah negara yang secara geografis berada di kawasan tertentu, maupun melalui pertemuan antarnegara yang cakupannya lebih internasional.

Kerja sama yang sifatnya lebih permanen perlu diupayakan antara perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di luar Indonesia dengan perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di Indonesia. Memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*) untuk keperluan itu sebaiknya dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal itu diperlukan agar pelaksanaannya, yang pasti akan menyangkut pengaturan dari segi administrasi, sarana, dan dana, tidak menghadapi kendala birokratis yang berarti. Selain itu, kerja sama semacam itu akan lebih efisien dan efektif kalau sebelum piagam kerja sama tersebut diresmikan/ditandatangani, sudah ada perjanjian kerja sama kebudayaan di antara kedua pemerintah yang dapat dirujuk.

Setakat ini telah ada kerja sama dalam arti dan bentuk yang lebih sederhana. Meskipun demikian, upaya setiap negara atau setiap perguruan tinggi penyelenggara BIPA seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang bertujuan "mempertemukan" para penyelenggara BIPA. Seminar ini jelas merupakan bentuk tindak lanjut yang akan sangat bermanfaat bukan hanya dalam rangka saling menukar pengalaman dan informasi mengenai pengajaran BIPA di perguruan tinggi masing-masing, melainkan juga dalam rangka melakukan koordinasi dan membina kerja sama agar pengajaran BIPA secara keseluruhan dapat ditingkatkan lagi.

7. Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengajaran BIPA, terutama di luar Indonesia, pemerintah Indonesia, melalui koordinasi antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Luar

Negeri, perlu segera mengambil langkah-langkah sehubungan dengan hal-hal berikut.

- a. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengajaran BIPA di luar Indonesia, antara lain yang berupa buku pelajaran, bahan bacaan, serta alat penunjang pengajaran lainnya seperti surat kabar, majalah, kaset, dan VCD.
- b. Memberikan kemudahan bagi tenaga Indonesia yang akan bertugas sebagai pengajar BIPA di luar Indonesia.
- c. Mengupayakan agar di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dibentuk semacam Pusat Kebudayaan Indonesia yang dapat disejajarkan/dibandingkan dengan Centre Culturel Français-nya Perancis, Goethe Institut-nya Jerman, atau Erasmus Huis-nya Belanda (khusus untuk keperluan ini, kalau dianggap perlu, dapat dipertimbangkan kemungkinan melakukan kerja sama dengan kantor perwakilan Malaysia dan Brunei Darussalam di negara yang bersangkutan).
- d. Mempertimbangkan pemberian beasiswa kepada calon pengajar BIPA dari luar Indonesia untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi Indonesia sampai tingkat sarjana (S1).

8. Di samping keempat aspek pengajaran BIPA yang telah secara singkat dipaparkan di atas (bahan pelajaran, pengajar, kerja sama, dan peran pihak Indonesia), tentu masih ada sejumlah aspek lainnya yang juga perlu dikemukakan dan dibicarakan dalam seminar ini. Dari keempat aspek itu sendiri pun tentu masih ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau diberi catatan khusus.

Sekadar contoh, program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan tenaga pengajar BIPA bukanlah merupakan terminal akhir. Kepada mereka yang sudah menjadi pengajar BIPA pun perlu pula diberi kesempatan untuk senantiasa memutakhirkan pengetahuan dan wawasannya.

CATATAN

1. Dengan mengecualikan Negeri Belanda, bahasa Indonesia diajarkan di Prancis mulai 1795 dan di Jepang mulai 1925. Setelah Sumpah Pemuda 1928 dan sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945, pada tahun 1931 Jerman mulai mengajarkan bahasa Indonesia di Universitas Hamburg. Setelah zaman kemerdekaan, berturut-turut bahasa Indonesia mulai diajarkan di Amerika

Serikat (1984), RRC (1950), Australia (1957), Italia (1964), Korea Selatan (1964), Inggris (1967), dan Selandia Baru (1968). Selain di negara-negara tersebut, Rusia juga pantas dicatat sebagai salah satu negara yang mengajarkan bahasa Indonesia.

2. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, selaku penyelenggara Kongres Internasional Pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) pada tanggal 28--30 Agustus 1995 di Depok (Jawa Barat), menyebutkan bahwa ada 29 negara yang mengajarkan BIPA, yaitu: Amerika, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Malaysia, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Perancis, Rusia, Singapura, Selandia Baru, Swedia, Swis, Suriname, Vatikan, dan Vietnam.
3. Seminar/lokakarya yang dihadiri oleh wakil-wakil universitas di Eropa Barat itu pernah diadakan di Paris, London, Napoli, Leiden, Sintra (Portugal), Passau, dan Bern. Pertemuan sekarang di Passau ini diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman bekerja sama dengan Universitas Passau dan antara lain dihadiri oleh para peserta yang mewakili universitas Hamburg, Köln, Bonn, Passau, Frankfurt, Berlin, Jena, Wien, dan Bern serta sejumlah peserta yang mewakili beberapa universitas di Indonesia (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Merdeka, Malang).
4. Simposium di Tokyo yang diprakarsai majalah berita *Tempo* dihadiri oleh wakil-wakil dari Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Peserta yang menghadiri simposium di Beijing lebih banyak lagi karena selain ketiga negara yang mengikuti simposium di Tokyo, juga hadir wakil-wakil dari Korea Utara, Hongkong, Taiwan, Mongolia, dan Rusia. Pemrakarsa simposium di Beijing adalah majalah berita *Gatra*.
5. Mengenai hal itu dapat disebut sebagai contoh kerja sama antara Monash University dengan Universitas Gadjah Mada, University of Western Sydney dengan IKIP Yogyakarta, University of Northern Territory dengan Universitas Nusa Cendana dan Universitas Pattimura, serta Sydney University dengan Universitas Kristen Satya Wacana (lihat Sugino, 1993). Sehubungan dengan kerja sama seperti itu, ada pula hubungan kerja sama antarkota yang lazim disebut kota kembar (*twin city*), seperti antara Jakarta dan Tokyo atau

Semarang dan Brisbane. Seberapa jauh keberadaan kota kembar tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran bahasa Indonesia belum diketahui.

6. Sehubungan dengan hal itu, ada informasi bahwa para diplomat asing, sebelum melaksanakan tugasnya di Indonesia, mempelajari dan memperdalam dahulu bahasa Indonesianya di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi Indonesia yang biasa menerima "kunjungan" para diplomat asing untuk maksud itu ialah Universitas Gadjah Mada. Dipilihnya universitas ini mungkin karena Yogyakarta, kota tempat universitas itu berada, secara meluas dikenal sebagai kota budaya. Dengan demikian, mereka dapat melakukan dua hal sekaligus, yakni mempelajari bahasa Indonesia sambil berkenalan langsung dengan adat-istiadat dan budayanya. Hal yang disebut terakhir ini masih terbuka untuk dibicarakan lebih lanjut karena, misalnya, kita masih harus menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh adat-istiadat budaya yang dapat disaksikan di Yogyakarta merupakan representasi serupa dengan cakupan nasional Indonesia.
7. Kongres Bahasa Indonesia V (1988) merumuskan tiga hal sebagai berikut.
 - a. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.
 - b. Pemerintah Indonesia perlu membantu lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama antara lain dengan ikut menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
 - c. Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

Sementara itu, Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) menyepakati enam hal sebagai berikut.

- a. Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan para pembelajar agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula dikembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemerintah dan swasta mengadakan program pertukaran pengajaran dan materi

pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri.

- b. Perlu dikembangkan materi BIPA yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ujaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara proporsional dan sesuai dengan konteks.
 - c. Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu ditingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum, mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran, serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
 - d. Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan praanggapan, yang sangat lazim dipergunakan di dalam interaksi informal. Di samping itu, perlu diperhatikan juga unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya.
 - e. Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain.
 - f. Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru sampai lulus S1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan lebih baik di negara asal pembelajar..
8. Bahwa masalah atau unsur budaya merupakan aspek yang amat penting dalam materi BIPA, hal itu banyak disoroti oleh para pemakalah Konferensi Internasional II Pengajaran BIPA (29 Mei--1 Juni 1996 di Padang), antara lain oleh John Wolff, Siahaan, Suroso, Atmazaki, Sudjiman, Sudewa, dan Sihombing.
 9. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berkeinginan "meluruskan" masalah ini agar pada waktu-waktu yang akan datang forum internasional di Indonesia yang membicarakan pengajaran BIPA sebaiknya menggunakan nama yang tidak mengundang timbulnya perbedaan seperti itu.

10. Sehubungan dengan tenaga pengajar BIPA ini, perlu diperhatikan dua hal berikut. Pertama, selain berlatar belakang pendidikan dan memiliki kualifikasi yang cocok, pengajar BIPA di luar Indonesia yang bukan orang Indonesia juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang budaya Indonesia. Untuk itu, yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan itu dengan menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Indonesia atau dengan jalan tinggal di Indonesia dalam waktu yang dianggap cukup lama, misalnya sambil melakukan penelitian lapangan mengenai salah satu aspek kebahasaan yang relevan dengan pengajaran BIPA. Kedua, penutur asli yang menjadi pengajar BIPA di luar Indonesia pada saatnya nanti perlu memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas. Sehubungan dengan kedua hal itu, pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak sekarang harus mempersiapkan suatu program pendidikan khusus (pada jenjang pascasarjana?) yang akan menghasilkan tenaga pengajar BIPA. Langkah ke arah itu dapat dimulai dengan mempertemukan para pimpinan perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pengajaran BIPA. Masukan dari penyelenggara pengajaran BIPA di luar Indonesia untuk keperluan itu jelas akan sangat bermanfaat, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum dan penentuan metodologi pengajaran yang tepat.

Pengembangan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) sebagai sarana peningkatan persahabatan antarbangsa, tema kongres ini, merupakan salah satu upaya nyata untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan dan dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam pembukaan konstitusi itu juga disebutkan "ikut melaksanakan ketertiban dunia".

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Kalau dihubungkan dengan isi Pasal 36 landasan konstitusional bangsa Indonesia itu, yang secara eksplisit menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, maka hal itu berarti bahwa upaya ke arah pencapaian ketertiban dunia itu dapat dilaksanakan melalui bahasa Indonesia. Dengan demikian, jelas terlihat adanya benang merah antara tema kongres ini dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam salah satu bagian kalimat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada makalah ini, yang judulnya mungkin bisa menimbulkan kesan agak "provokatif", akan dikemukakan keadaan pengajaran BIPA di beberapa negara. Mengingat sangat terbatasnya data dan informasi BIPA yang tersedia di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa¹, sajian berikut mengenai hal itu hanya didasarkan pada makalah-makalah yang telah disampaikan baik pada Kongres Bahasa Indonesia V (1988) maupun pada Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).

Pengajaran BIPA di Belanda, seperti diketahui oleh kalangan yang sangat luas, sudah memiliki tradisi dan akar kesejarahan yang paling mantap dan kuat. Dardjowidjojo (1993) bahkan menjuluki Leiden (di Negeri Belanda) sebagai "kota suci" pengajaran BIPA, terutama dalam kaitannya dengan pengajaran dan penelitian sastra Indonesia. Setelah itu,

Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, 28--30 Agustus 1995, Universitas Indonesia.

Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia patut dicatat sebagai empat negara Eropa Barat yang mengajarkan BIPA. Selain itu, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan tentu saja Australia juga tak kalah pentingnya dalam hal perintisan dan pengembangan pengajaran BIPA. Jepang, Cina, dan Korea Selatan merupakan tiga negara Asia terpenting dalam hal pengajaran BIPA. Tentu saja untuk bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan bahasa Melayu, pengajaran BIPA di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura merupakan hal yang tak perlu dibahas lagi, sekurang-kurangnya dalam makalah ini.

Berdasarkan urutan waktu yang menandai dimulainya pengajaran BIPA, Perancis boleh dikatakan merupakan negara pertama. Bersamaan dengan bahasa Arab, Persia, dan Turki, sejak tahun 1795 bahasa Indonesia (pada saat itu tentu saja masih bernama bahasa Melayu) diajarkan di Institut National des Langues et Civilisations Orientales, terutama untuk kepentingan politik dan perdagangan pemerintah Perancis. Setelah itu, berturut-turut BIPA mulai diajarkan di Jepang (1925), Amerika (1948), Cina (1950), Australia (1957), Italia (1964), Korea Selatan (1964), Inggris (1967), dan Selandia Baru (1968). Tidak diketahui secara pasti sejak kapan BIPA mulai diajarkan di Jerman. Meskipun demikian, penelitian tentang sejarah bahasa Melayu telah dilakukan oleh, misalnya, Dempwolff tahun 1934--1938. Sementara itu, Hilgers-Hesse dan R. Carle merupakan peneliti sastra Indonesia yang terkemuka.² Dewasa ini di sana ada tiga universitas yang sekaligus mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia (Hamburg, Koln, dan Frankfurt) dan ada enam universitas yang hanya mengajarkan bahasa Indonesia (Bremen, Bonn, Bielefeld, Göttingen, Nürtingen, dan München).

Di Jepang ada tiga perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA: Tenri Daigaku (sejak 1925, bahkan untuk bahasa Melayu sejak 1911), Kyoto Sangyo Daigaku (sejak 1967), dan Setsunan Daigaku (sejak 1967). Pengajaran BIPA di Cina dikelola oleh Universitas Beijing, sedangkan di Korea Selatan oleh Universitas Bahasa Asing Hankuk. Bidang studi yang disebut Jurusan Malay-Indonesia ini diselenggarakan di dua kampus, yaitu di Kampus Seoul (sejak 1964) dan Kampus Yongin (sejak 1982).

School of Oriental and African Studies (SOAS) di London merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Inggris yang melaksanakan

pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang didampingkan dengan pengajaran bahasa/sastra Belanda dan Arab, antropologi, ekonomi, hukum, politik, dan perbandingan agama. Hal penting yang perlu dicatat ialah bahwa bahasa/sastra Indonesia dapat dipelajari di SOAS untuk memperoleh gelar akademik sampai dengan jenjang pascasarjana.

Sama halnya dengan di Inggris dan Perancis, hanya ada satu lembaga pendidikan di Italia yang menyelenggarakan pengajaran BIPA, yaitu Instituto Universitario Orientale yang berada di kota Napoli. Sementara itu, dilihat dari segi jumlah lembaga pendidikan penyelenggara BIPA ini, keadaan di Selandia Baru lebih "menggembirakan" karena di sana terdapat tiga perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA, yaitu Universitas Auckland, Universitas Victoria (di Wellington), dan Rangitoto College.

Di Amerika Serikat pengajaran BIPA dipelopori oleh Prof. Isidore Dyen pada tahun 1948 di Universitas Yale, menyusul kemudian Prof. John Echols (yang di Indonesia kamus susunannya sangat dikenal secara meluas) pada tahun 1951 di Universitas Cornell. Selain di kedua universitas tersebut, pengajaran BIPA juga dapat diikuti (di tujuh universitas lainnya yaitu di Universitas Hawaii, Berkeley, Wisconsin, Ohio, Michigan, Northern Illinois, dan Arizona. Menurut hasil penelitian yang dilaporkan oleh Soemarmo (1988), bahasa Indonesia di Amerika merupakan bahasa Asia ketiga yang paling banyak dipelajari (setelah bahasa Jepang dan Cina).

Mengenai penelitian bahasa Indonesia di Amerika, seperti yang dilaporkan oleh Collins (1993), terdapat perubahan yang "menggembirakan". Sebelum Kongres Bahasa Indonesia V diadakan, penelitian bahasa Indonesia di Amerika selalu dikaitkan untuk kepentingan ekonomi, politik kolonial, dan perang. Sekarang kaitan seperti itu sudah ditinggalkan karena penelitian bahasa Indonesia yang dilakukan memperlihatkan hubungan yang jelas dengan penelitian linguistik tradisional, penelitian linguistik sosial, dan penelitian pedagogi bahasa Indonesia.

Pengajaran BIPA di Australia memperlihatkan corak dan warna tersendiri karena tidak hanya melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga sekolah dasar dan sekolah menengah. Tercatat tidak kurang dari 13 perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA. Universitas Sydney dan Universitas Melbourne memelopori kegiatan itu pada tahun 1957, sedangkan

University College of the Northern Territory baru mengawali pengajaran BIPA pada tahun 1986. Royal Australian Air Force School of Languages bahkan menyelenggarakan kursus intensif bahasa Indonesia sejak tahun 1950. Kursus semacam itu, yang lebih singkat, juga dikelola oleh beberapa perguruan tinggi dan sekolah menengah.

Minat orang Australia yang begitu besar untuk mempelajari bahasa Indonesia itu, selain karena makin gencarnya arus pariwisata di antara penduduk kedua negara, terutama dari Australia ke Indonesia, juga disebabkan oleh pertimbangan yang lebih bersifat geopolitik, mengingat Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan ASEAN, di samping peranan Indonesia selaku pelopor dan pimpinan gerakan nonblok. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau menurut Survei 1983, seperti yang dikemukakan oleh Sarumpaet (1988), bahasa Indonesia menempati urutan keempat di antara bahasa-bahasa asing yang diajarkan di Australia, setelah bahasa Perancis, Jerman, dan Italia.³

Berkenaan dengan materi pengajaran, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya pengajaran bahasa dikaitkan dengan upaya memperkenalkan sastranya. Melalui karya-karya sastra yang sudah diterjemahkan, makin jelas terlihat bahwa sastra tidak hanya menopang pengajaran bahasa dalam rangka memperkaya perbendaharaan kosakata para pelajar/mahasiswa, tetapi juga sangat bermanfaat untuk mengamati gaya bahasa yang digunakan. Bahkan hal itu pada gilirannya dapat dijadikan salah satu pintu masuk ke arah pengenalan perikehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia dalam arti yang luas.

Dengan memperhatikan dorongan semangat yang melatarbelakangi pilihan untuk mempelajari BIPA (masalah ini juga akan disinggung), persoalan yang dihadapi ialah bagaimana sebaiknya proporsi perbandingan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Ada kecenderungan bahwa bahasa lisan perlu lebih diperhatikan daripada bahasa tulis. Hal itu berarti bahwa kurikulumnya harus disusun sedemikian rupa sehingga para mahasiswa memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk melatih dan meningkatkan keterampilan dan penguasaan bahasa lisannya, baik pada saat menyimak maupun (terlebih-lebih) pada saat berbicara.

Upaya peningkatan penguasaan dan keterampilan berbahasa lisan ini dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas. Upaya ke arah itu perlu

didukung, antara lain, oleh tersedianya berbagai bahan pengajaran yang diperlukan (termasuk buku dan kamus), laboratorium bahasa, dan (tenaga pengajar) penutur asli. Melakukan kunjungan langsung ke dan tinggal di Indonesia untuk beberapa waktu tentu merupakan hal yang akan sangat membantu, bukan saja karena yang bersangkutan akan memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperagakan sambil meningkatkan kemampuan bahasa lisannya, melainkan juga sekaligus untuk mengetahui begitu beragamnya cara orang Indonesia berbahasa. Sebagai akibatnya, kalau kita berbicara mengenai usaha pembakuan, hal itu hanya mungkin dapat diterapkan (dan memang sudah diprioritaskan) terhadap bahasa tulis, terutama bahasa tulis ragam resmi melalui pemasyarakatan bahasa Indonesia (yang telah disepakati untuk disebut) yang baik dan benar. Upaya pembakuan dengan tujuan dan intensitas yang seperti itu sangat tidak mungkin dapat dilakukan terhadap pemakaian bahasa Indonesia lisan oleh masyarakat penutur di Indonesia secara menyeluruh.⁴

Kecenderungan untuk lebih memperhatikan/mengutamakan bahasa lisan daripada bahasa tulis itu didasarkan pada tuntutan untuk menguasai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi semata-mata untuk mencapai tujuan lain, misalnya agar dapat melakukan penelitian di Indonesia dalam bidang yang tidak ada kaitannya dengan bahasa dan sastra Indonesia. Dapat dikemukakan bahwa para peminat BIPA di berbagai negara pada umumnya "didominasi" oleh mahasiswa jurusan antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, perbandingan agama, dll. Tuntutan semacam itu bahkan datang pula dari kalangan masyarakat di luar universitas sehingga tidaklah mengherankan kalau Nothofer (1988) merasa perlu untuk melaporkan bahwa para peminat BIPA di Jerman dari luar universitas lebih banyak jumlahnya daripada yang berasal dari dalam universitasnya (mahasiswa) sendiri.

Motivasi untuk mempelajari BIPA itu secara jelas terlihat pada laporan Soemarmo (1988) mengenai keadaan di Amerika. Ingin dapat berbicara (sebanyak 83%) menempati urutan tertinggi sehubungan dengan alasan mempelajari bahasa Indonesia. Hal itu dikontraskannya dengan alasan ingin dapat menulis makalah (sebanyak 13%) yang menempati urutan paling bawah. Di antara keduanya berturut-turut terdapat alasan: berencana mengunjungi Indonesia (75%), agardapat membaca surat kabar

dan buku-buku terbitan Indonesia (63%), ingin mempelajari kebudayaan Indonesia (57%), agar dapat menulis surat dalam bahasa Indonesia (40%), untuk keperluan pekerjaan (38%), karena memiliki teman/keluarga di Indonesia (17%), dan ingin melakukan penelitian di Indonesia (16%).

Pada laporan itu dikemukakan juga urutan bidang yang ingin diketahui, yaitu sejarah (76%), politik (67%), masalah sosial (65%), cerita rakyat (57%), kesusastraan (52%), kesenian (49%), ekonomi (41%), bahasa daerah (24%), dan olah raga (6%).

Minat mahasiswa Amerika itu cukup menarik untuk dibandingkan dengan minat sarjana Jerman ahli studi Indonesia. Seperti yang dikutip oleh Nothofer (1988), berdasarkan ahli studi Indonesia pada tahun 1987 yang berjumlah 127 orang, pemerangkatnya adalah: antropologi (30 orang), ilmu-ilmu sosial (12 orang), geografi (12 orang), ekonomi (10 orang), ilmu-ilmu terapan (10 orang), linguistik (10 orang), agama (9 orang), sastra (7 orang), sejarah (6 orang), dan kesenian (5 orang). Setelah kesenian, masih ada sejumlah bidang lain yang jumlah ahlinya berkisar antara satu sampai tiga orang.⁵

Di atas telah disebutkan bahwa keberhasilan pengajaran BIPA yang berorientasi pada penguasaan bahasa lisan antara lain ditentukan oleh faktor sarana (laboratorium bahasa) dan manusia (pengajar/penutur asli). Dalam konteks yang tidak dibatasi oleh penekanan terhadap keperluan tertentu seperti itu, buku rujukan yang digunakan dalam penyelenggaraan BIPA pastilah memainkan peran utama yang akan sangat menunjang keberhasilan tersebut. Agar buku rujukan pelajaran BIPA itu sesuai dengan latar belakang kebahasaan para mahasiswa yang mempelajarinya, maka perlu diusahakan agar untuk sekurang-kurangnya satu negara terdapat satu buku rujukan. Mungkin saja dapat dilakukan upaya yang melebihi hal itu, yakni setiap perguruan tinggi yang mengajarkan

BIPA dapat menyusun dan mengelaborasi bahan pelajarannya masing-masing, termasuk dalam penyusunan buku rujukan tersebut.⁶

Upaya setiap negara atau setiap perguruan tinggi penyelenggaraan BIPA seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang bertujuan "mempertemukan" para penyelenggara BIPA. Kongres ini jelas merupakan bentuk tindak lanjut yang akan sangat bermanfaat bukan

hanya dalam rangka saling menukar pengalaman dan informasi mengenai pengajaran BIPA di negara/ perguruan tinggi masing-masing, melainkan juga dalam rangka melakukan koordinasi dan membina kerja sama agar pengajaran BIPA secara keseluruhan dapat ditingkatkan lagi. Kerja sama antara UGM dengan Monash University, IKIP Yogyakarta dengan University of Western Sydney, IKIP Malang dengan Cornell University, Universitas Nusa Cendana Kupang dan Universitas Pattimura Ambon dengan University of Northern Territory, Unhas Ujung Pandang dengan LaTrobe University, serta UKSW Salatiga dengan Sydney University merupakan contoh konkret dalam hal itu. Demikian pula halnya dengan disepakatinya kota kembar, seperti Brisbane dengan Semarang, perlu dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengajaran BIPA.⁷

Pertemuan atau forum antarnegara penyelenggara BIPA di Eropa diadakan sejak 1978 dalam bentuk seminar atau lokakarya "Studi Melayu-Indonesia di Eropa". Kegiatan itu diadakan secara berkala, dua tahun sekali. Pertemuan kedua bahkan diadakan hanya setahun setelah pertemuan pertama: 1978 di Paris dan 1979 di London. Kota lain yang pernah menjadi penyelenggara, antara lain, Napoli, Leiden, Sintra (Portugal), Passau, dan Bern. Dapat ditambahkan bahwa pada tahun 1991 di Jakarta telah diadakan "Seminar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing)" yang dihadiri oleh wakil-wakil perguruan tinggi penyelenggara BIPA dari Australia dan Indonesia. Kemudian pada tahun 1994 di Salatiga (Indonesia), dengan Universitas Kristen Sastya Wacana sebagai tuan rumah, telah diadakan pertemuan semacam itu dengan mengikutsertakan para penyelenggara BIPA yang lebih luas. Pertemuan Salatiga ini merupakan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA I. Menurut rencana, kegiatan serupa yang kedua akan diselenggarakan pada bulan Januari 1996 di IKIP Padang.⁸

Dalam hal pertemuan antarnegara penyelenggara BIPA ini, dapat pula ditambahkan Simposium Perkembangan Bahasa Indonesia di Kawasan Timur Jauh yang diselenggarakan tanggal 19--20 Juli 1993 di Tokyo. Pada simposium yang disponsori oleh majalah *Tempo* itu dibahas pengajaran BIPA di Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Pada akhir tahun ini, yaitu pada tanggal 14--17 Desember 1995 di Beijing, akan diadakan Simposium Internasional Bahasa Indonesia di Kawasan Timur Jauh. Pada

Simposium Beijing ini, yang merupakan kelanjutan dari Simposium Tokyo 1993, akan hadir tidak saja yang mewakili pengajaran BIPA dari Jepang, Cina, dan Korea Selatan, tetapi juga dari Korea Utara, Hongkong, Taiwan, dan bahkan Mongolia serta Rusia.

Patut pula dicatat berbagai kegiatan serupa yang tidak saja diprakarsai dan diselenggarakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh Malaysia dan Brunei Darussalam, baik yang berkenaan dengan bahasa dan sastra Indonesia, maupun yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Melayu. Catatan khusus dapat ditambahkan sehubungan dengan bahasa Indonesia/Melayu ini. Pertama, seminar tahun 1992 di Tanjung Pinang, dihadiri oleh para peserta yang mewakili kelima negara anggota ASEAN, dengan tema: Bahasa Melayu (bahasa Indonesia) sebagai Bahasa Pergaulan di Kawasan Asia Tenggara. Kedua, seminar tahun 1993 yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional (Jakarta) dengan tujuan mengupayakan, melalui pembakuan (standardisasi), agar yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah jenis bahasa yang sama.

Upaya yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang upaya peningkatan pengajaran BIPA itu dapat dilakukan melalui terbitan-terbitan berkala. Masalahnya adalah seberapa jauh kita bisa memanfaatkan terbitan-terbitan semacam itu. Mengenai terbitan ini dapat disebutkan, antara lain, *Bijdragen* (Belanda), *Archipel* (Perancis), *Rima* atau *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* (Australia), dan *Papers on Oriental Studies* (Cina). Di Malaysia ada *Dewan Bahasa dan Dewan Sastra* yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sedangkan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ialah majalah *Bahasa dan Sastra*. Kalau perlu, para penyelenggara BIPA peserta Simposium ini pun dapat pula mempertimbangkan kemungkinan melakukan kerja sama dalam hal terbitan seperti itu.

Akhirnya, kita perlu juga memperhatikan dan sekaligus meninjau balik apa yang telah direkomendasikan oleh Kongres Bahasa Indonesia V dan VI tentang pengajaran BIPA.¹⁰ Hal itu akan sangat bermanfaat, baik untuk keperluan upaya peningkatan pengajaran BIPA di negara masing-masing maupun untuk keperluan yang menyangkut kerja sama antarnegara penyelenggara pengajaran BIPA.

CATATAN

1. Menurut Panitia Kongres, seperti yang dapat dibaca dalam edarannya, BIPA diajarkan di 29 negara, yaitu di Amerika, Arab Saudi, Australia, Austria, Belanda, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Malaysia, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Perancis, Rusia, Singapura, Selandia Baru, Swedia, Swis, Suriname, Vatikan, dan Vietnam.
2. Untuk Italia, Giovanni Gaggino (lahir tahun 1846 di sebuah kota kecil dekat Genova), meskipun belum dapat digolongkan sebagai peneliti bahasa yang sebenarnya, pada tahun 1884 di Singapura berhasil menerbitkan sebuah kamus kecil bahasa Italia-Melayu untuk keperluan percakapan sehari-hari. Sebagai seorang pedagang, sebagian besar hidupnya dia jalani di Singapura dan meninggal tahun 1918 di sebuah sanatorium di Garut, Jawa Barat.
3. Mengenai minat orang Australia belajar bahasa Indonesia, Sneddon (1993) mengemukakan catatan yang cukup menarik. Dikatakannya bahwa pada kurun waktu yang disebutnya "masa konfrontasi" antara Australia dan Indonesia, minat itu memperlihatkan peningkatan. Namun, setelah di Indonesia terbentuk pemerintahan Orde baru yang lebih stabil sehingga hubungan Indonesia-Australia pun makin baik, minat itu memperlihatkan kecenderungan menurun.
4. Strategi pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu memperhatikan hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 1990 (yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, Jakarta). Berdasarkan jenis bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh penduduk yang berusia 5 tahun ke atas, diketahui angka-angka sebagai berikut. Penduduk yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 23.802.520 (15,07%). Penduduk yang secara tegas menyatakan tidak dapat berbahasa Indonesia berjumlah 27.055.488 (17,13%). Sementara itu, ada pula golongan penduduk yang dapat berbahasa Indonesia, tetapi tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari; jumlahnya 107.066.316 (67,80%). Dalam hubungan ini, Biro Pusat Statistik memproyeksikan bahwa pada tahun 2010 penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas semuanya sudah akan dapat memahami bahasa Indonesia (lihat Djojonegoro, 1995).
5. Pada bagian lain Nothofer (1988) juga mengutip dari sumber yang sama, yakni *Dictionary of West European Indonesianist* tahun 1987. Berdasarkan

ahli-ahli studi Indonesia yang terdapat di Eropa yang jumlahnya 760 orang, diketahui bahwa yang terbanyak terdapat di Belanda (423 orang), kemudian secara berturut-turut (sampai peringkat ke-5) diikuti oleh Jerman (127 orang), Inggris (84 orang), Perancis (53 orang), dan Swis (25 orang). Berdasarkan bidang keahliannya, keadaan di kelima negara Eropa barat itu menunjukkan bahwa yang paling banyak ialah ahli di bidang antropologi (174 orang), kemudian sejarah (130 orang), ekonomi (59 orang), dan linguistik (53 orang). Setelah peringkat ke-4 itu, terlihat, antara lain, bahwa ahli di bidang sastra berjumlah 30 orang, sedangkan yang meminati bidang agama ada 27 orang.

6. Nothofer, Pampus dan Poedjosoedarmo secara bersama-sama menyusun *Bahasa Indonesia: Indonesisch fur Deutsche* (2 jilid) untuk pengajaran BIPA di Jerman. Untuk Perancis tercatat dua buku, yakni *Introduction à l'Indonésien* karangan D. Lombard dan *Méthode d'Indonésien* yang disusun oleh P. Labrousse dan F. Soemargono. Di Amerika ada *Beginning Indonesian* yang ditulis oleh John U. Wolff. Yang paling banyak terdapat di Australia, sekurang-kurangnya ada 25 buah, lima di antaranya (sekadar contoh) adalah:
 - a. *Introduction to Bahasa Indoensia* (J.P. Sarumpaet dan J.A.C. Mackie)
 - b. *Indonesian fur Schools* (V.J. Turner)
 - c. *Learn Indonesian* (J.D. mcGarry dan Sumaryono)
 - d. *Bahasa Indonesia: Langkah Baru, A New Approach* (Yohanni Johns)
 - e. *Essentials of Indonesian Grammar* (Li Chuan Siu).
7. Lihat Sugiono (1993).
8. Forum internasional pengajaran BIPA ini perlu ditangani dan dikoordinasi secara lebih efisien lagi. Apa yang telah dihasilkan oleh Konferensi Internasional Pengajaran BIPA I tahun 1994 di Salatiga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kongres Internasional Pengajaran BIPA sekarang ini. Apa yang akan dilakukan di IKIP Padang pada tahun 1996 juga harus memperlihatkan kesinambungan dengan Konferensi Salatiga 1994 dan juga harus jelas hubungannya dengan kongres ini. Kalau tidak, akan terjadi pertumpangtindihan kegiatan, di samping kemubaziran dalam hal tenaga dan dana.
9. Pada seminar itu penulis mengemukakan bahwa upaya pembakuan dengan tujuan seperti itu sangat tidak mungkin dapat dilakukan. Meskipun bahasa yang digunakan di ketiga negara itu bersumber dari bahasa yang sama

(bahasa Melayu), perkembangan dan arah pengembangannya di negara masing-masing, mem-perlihatkan perbedaan yang cukup besar. Dengan perkataan lain, bahasa di ketiga negara itu tidak dapat diseragamkan, apalagi melalui semacam usaha rekayasa. Yang dapat dilakukan ialah mengupayakan agar ketiga bahasa di ketiga negara itu benar-benar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang mantap di segala bidang, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern. Untuk itu, sejak tahun 1972 ada wadah kerja sama yang disebut *MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia)*. Mulai tahun 1985, karena Brunei Darussalam ikut, nama wadah itu berubah menjadi *Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia)*. Tujuan utamanya ialah menyusun istilah dalam bidang iptek tersebut. Yang diprioritaskan ialah istilah untuk empat bidang ilmu dasar, yaitu biologi, kimia, matematika, dan fisika. Menurut program kegiatan untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang, upaya penyusunan istilah itu akan dialihkan pada bidang ekonomi, kedokteran, filsafat, linguistik, dan sastra.

10. Kongres Bahasa Indonesia V (1988) merumuskan tiga hal sebagai berikut.
 - a. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.
 - b. Pemerintah Indonesia perlu membantu lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama antara lain dengan ikut menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
 - c. Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

Sementara itu, Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) menyepakati enam hal sebagai berikut.

- a. Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan para pembelajar agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula dikembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemerintah dan swasta mengadakan program pertukaran pengajaran dan materi pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri.

- b. Perlu dikembangkan materi BIPA yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ujaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara proporsional dan sesuai dengan konteks.
- c. Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu ditingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran, serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- d. Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan praanggapan, yang sangat lazim dipergunakan di dalam interaksi informal. Di samping itu, perlu diperhatikan juga unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya.
- e. Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain.
- f. Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru sampai lulus S1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan lebih baik di negara asal pembelajar.

PENGAJARAN BIPA: UPAYA PENGEMBANGAN*

Pengantar

Pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) dilaksanakan pada umumnya oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi, terutama yang berada di luar Indonesia. Oleh karena itu, pengajaran BIPA di luar Indonesia memiliki latar belakang kesejarahan yang jauh lebih lama dibandingkan dengan pengajaran BIPA di Indonesia yang boleh dikatakan baru mengawali kegiatan itu di sekitar tahun tujuh puluhan.

Menurut catatan, Perancis merupakan negara pertama yang menyelenggarakan pengajaran BIPA, yaitu mulai tahun 1795. Setelah itu, berturut-turut BIPA mulai diajarkan di Jepang (1925), Amerika Serikat (1948), RRC (1950), Australia (1957), Italia (1964), Korea Selatan (1964), Inggris (1967), dan Selandia Baru (1968). Terhadap nama BIPA itu sendiri tentu saja perlu ditambahkan semacam keterangan khusus, mengingat *bahasa Indonesia* baru digunakan setelah Sumpah Pemuda 1928. Namun, pada makalah ini kegiatan serupa sebelum tahun 1928 tidak perlu disebut BMPA (Bahasa Melayu bagi Penutur Asing).

Sebagai salah satu disiplin ilmu yang belum terlalu lama mulai dibicarakan dalam "forum akademis" yang bertaraf internasional, BIPA masih sarat mengandung sejumlah permasalahan yang belum "dijamah" secara bersungguh-sungguh. Hal itu berarti bahwa dalam simposium ini pun pembicaraan mengenai berbagai aspek pengajaran BIPA itu memerlukan tindak lanjut yang mungkin masih tetap panjang dan rumit.

Pada makalah ini, yang berfokus pada upaya pengembangan pengajaran BIPA, akan dikemukakan empat aspek, yaitu bahan pelajaran, pengajar, masalah kerja sama, dan peran pemerintah Indonesia. Hal itu antara lain didasarkan pada putusan Kongres Bahasa Indonesia mengenai pengajaran BIPA (lihat **Forum Pengajaran BIPA** pada makalah ini).

* Makalah Simposium Bahasa Indonesia di Asia Timur, 14-17 Desember 1995, Beijing.

Uraian keempat aspek itu didahului dengan penyampaian informasi tentang beberapa forum yang secara khusus membahas pengajaran BIPA.

Forum Pengajaran BIPA

1. Pertemuan atau forum antarnegara penyelenggara BIPA di Eropa diadakan sejak 1978 dalam bentuk seminar atau lokakarya "Studi Melayu-Indonesia di Eropa". Kegiatan itu diadakan secara berkala, dua tahun sekali, antara lain di Paris, London, Napoli, Leiden, Sintra (Portugal), Passau, dan Bern.
2. Dalam hubungannya dengan Kongres Bahasa Indonesia, baru pada Kongres ke-5 pengajaran BIPA dibicarakan. Mengingat pentingnya putusan Kongres Bahasa Indonesia V (1988) dan Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) mengenai pengajaran BIPA.

Kongres Bahasa Indonesia V (1988) merumuskan tiga hal sebagai berikut.

- a. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.
- b. Pemerintah Indonesia perlu membantu lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama antara lain dengan ikut menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
- c. Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

Sementara itu, Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) menyepakati enam hal sebagai berikut.

- a. Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan para pembelajar agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula dikembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemerintah dan swasta mengadakan program pertukaran peng-

ajaran dan materi pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri.

- b. Perlu dikembangkan materi BIPA yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ujaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara proporsional dan sesuai dengan konteks.
 - c. Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu ditingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum, mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran, serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
 - d. Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan praanggapan, yang sangat lazim dipergunakan di dalam interaksi informal. Di samping itu, perlu diperhatikan juga unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya.
 - e. Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain.
 - f. Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru sampai lulus S1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan lebih baik di negara asal pembelajar.
3. Setelah 1988, di Indonesia ada beberapa pertemuan lain yang perlu dicatat.
 - a. Seminar BIPA (Februari 1991) di Universitas Indonesia yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Australia dan Indonesia
 - b. Konferensi Internasional I Pengajaran BIPA (20-23 Januari 1994) di Universitas Kristen Satya Wacana (Salatiga, Jawa Tengah)

- c. Kongres Internasional Pengajaran BIPA (28-30 Agustus 1995) di Universitas Indonesia
 - d. Konferensi Internasional II Pengajaran BIPA yang menurut rencana akan diadakan di Padang, Sumatera Barat (29 Mei - 1 Juni 1996)
4. Kongres Bahasa Melayu Sedunia (21-25 Agustus 1995) di Kuala Lumpur.
 5. Pertemuan antarnegara penyelenggara BIPA di Asia Timur:
 - a. Simposium I (19-20 Juli 1993) di Tokyo
 - b. Simposium II (14-17 Desember 1995) di Beijing

Bahan Pengajaran

Yang dimaksudkan dengan bahan pengajaran pada makalah ini dibatasi hanya pada yang berupa buku. Mengingat sudah cukup memadainya, terutama dari segi jumlah, buku pelajaran yang digunakan untuk keperluan pengajaran BIPA, sekarang ini sudah saatnya dilakukan penelitian awal terhadap semua buku pelajaran BIPA yang telah diterbitkan dan digunakan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Dilihat dari segi bahasa yang digunakan, ada buku pelajaran yang menitikberatkan pada penguasaan bahasa yang baku dan ada pula yang lebih mementingkan penguasaan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkataan lain, yang disebutkan terakhir ini berorientasi pada penguasaan bahasa percakapan. Dalam menghadapi pilihan semacam itu, yang perlu dijadikan pertimbangan utama ialah tujuan penutur asing yang bersangkutan dalam mempelajari bahasa Indonesia. Namun, terlepas dari masalah itu, yang paling mendasar untuk disadari ialah perlu dibedakannya pengajaran BIPA ini dari pengajaran bahasa Indonesia untuk orang Indonesia sendiri. Karena pada umumnya pengajaran BIPA itu diselenggarakan di luar Indonesia, maka penguasaan bahasa (bahasa baku atau bahasa percakapan) itu perlu dilengkapi dengan pengenalan terhadap unsur budayanya.

Pengenalan terhadap unsur budaya ini sebaiknya dilakukan melalui pengiriman mahasiswa yang bersangkutan ke Indonesia dan tinggal di sa-

na beberapa lama, bergaul dengan sesama mahasiswa dari Indonesia, berbicara dengan orang-orang Indonesia yang kelompok etnisnya sangat beragam, mengetahui adat-istiadat dan kebiasaan mereka, dan lain-lain. Dalam keadaan "darurat", yaitu apabila pengiriman mahasiswa ke Indonesia itu tidak mungkin dilakukan, pengenalan terhadap unsur budaya ini bisa ditempuh melalui bahan bacaan, seperti surat kabar dan majalah Indonesia, melihat rekaman elektronik yang secara audio-visual menggambarkan "denyut budaya" Indonesia. Khusus dalam hal ini perwakilan Indonesia di luar negeri dapat berperan secara lebih aktif. Oleh karena itu, perwakilan Indonesia di suatu negara perlu mengetahui lembaga-lembaga pendidikan mana yang mengajarkan BIPA sambil sekaligus berupaya mengetahui pula kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan penelitian terhadap buku-buku pelajaran BIPA itu, paling tidak dapat disusun suatu buku pelajaran yang berlaku secara umum untuk negara yang bersangkutan. Dari buku "resmi" untuk setiap negara itu dapat pula disusun semacam buku pelengkap, yaitu buku yang disusun oleh masing-masing lembaga pendidikan penyelenggara pengajaran BIPA itu sendiri. Untuk itu, pertemuan berkala di antara para penyelenggara pengajaran BIPA di suatu negara akan memberikan manfaat yang makin berarti, di samping pertemuan antarnegara seperti yang kita lakukan pada simposium ini.

Pengajar

Pengajar BIPA di Indonesia sudah dapat dipastikan adalah orang Indonesia sendiri yang sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan sarjana (S1). Adapun pengajar BIPA di luar Indonesia, selain orang dari negara yang bersangkutan yang memang sudah memiliki kualifikasi sebagai pengajar BIPA di (tingkat) pendidikan tinggi, adalah juga penutur asli (*native speaker*), yaitu orang Indonesia yang berada di negara tersebut.

Orang Indonesia yang menjadi tenaga pengajar BIPA di luar Indonesia itu belum tentu berlatar belakang pendidikan dan memiliki kualifikasi yang cocok untuk keperluan pengajaran BIPA. Ada kalanya, mungkin dalam keadaan terpaksa, persyaratan seperti itu terpaksa pula "dilupakan" karena yang penting adalah menampilkan sosok bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Indonesia sendiri. Kasus seperti ini harus

dianggap sementara. Apabila tidak, hal itu pada akhirnya akan menimbulkan akibat dan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi upaya pencapaian tujuan yang sebenarnya dari pengajaran BIPA di negara yang bersangkutan.

Mengenai tenaga pengajar BIPA ini, perlu diperhatikan dua hal berikut.

1. Selain berlatar belakang pendidikan dan memiliki kualifikasi yang cocok, pengajar BIPA di luar Indonesia yang bukan orang Indonesia juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang budaya Indonesia. Untuk itu, yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan itu dengan menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Indonesia atau dengan jalan tinggal di Indonesia dalam waktu yang dianggap cukup lama, misalnya sambil melakukan penelitian lapangan mengenai salah satu aspek kebahasaan yang relevan dengan pengajaran BIPA.
2. Penutur asli yang menjadi pengajar BIPA di luar Indonesia pada saatnya nanti perlu memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas.

Sehubungan dengan butir 1 dan 2 itu, pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak sekarang harus mempersiapkan suatu program pendidikan khusus (pada jenjang pascasarjana?) yang akan menghasilkan tenaga pengajar BIPA. Langkah ke arah itu dapat dimulai dengan mempertemukan para pimpinan perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pengajaran BIPA. Masukan dari penyelenggara pengajaran BIPA di luar Indonesia untuk keperluan itu jelas akan sangat bermanfaat, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum dan penentuan metodologi pengajaran yang tepat.

Kerja Sama

Pertumbuhan dan perkembangan pengajaran BIPA sekarang, baik yang diselenggarakan di luar Indonesia maupun di Indonesia, sudah mencapai taraf yang tidak lagi memungkinkan penyelenggara pengajaran BIPA itu asyik berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, kerja sama dan koordinasi di antara mereka merupakan sesuatu yang dari waktu ke waktu memerlukan perhatian yang makin bersungguh-sungguh.

Kerja sama dan koordinasi yang demikian dapat dilaksanakan melalui pertemuan berkala, baik di antara para penyelenggara BIPA di suatu negara tertentu, di antara sejumlah negara yang secara geografis berada di kawasan tertentu (pertemuan regional seperti simposium ini), maupun melalui pertemuan antarnegara yang cakupannya lebih internasional.

Kerja sama yang sifatnya lebih permanen perlu diupayakan antara perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di luar Indonesia dengan perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di Indonesia. Memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*) seperti itu sebaiknya dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal itu diperlukan agar pelaksanaannya, yang pasti akan menyangkut pengaturan dari segi administrasi, sarana, dan dana, tidak menghadapi kendala birokratis yang berarti. Selain itu, kerja sama semacam itu akan lebih efisien dan efektif kalau sebelum piagam kerja sama tersebut diresmikan/ditandatangani, sudah ada perjanjian kerja sama kebudayaan di antara kedua pemerintah yang dapat dirujuk.

Setakat ini telah ada kerja sama dalam arti dan bentuk yang lebih sederhana. Meskipun demikian, upaya setiap negara atau setiap perguruan tinggi penyelenggaraan BIPA seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang bertujuan "mempertemukan" para penyelenggara BIPA. Kongres ini jelas merupakan bentuk tindak lanjut yang akan sangat bermanfaat bukan hanya dalam rangka saling menukar pengalaman dan informasi mengenai pengajaran BIPA di negara/perguruan tinggi masing-masing, melainkan juga dalam rangka melakukan koordinasi dan membina kerja sama agar pengajaran BIPA secara keseluruhan dapat ditingkatkan lagi. Kerja sama antara UGM dengan Monash University, IKIP Yogyakarta dengan University of Western Sydney, IKIP Malang dengan Cornell University, Universitas Nusa Cendana Kupang dan Universitas Pattimura Ambon dengan University of Northern Territory, Unhas Ujung Pandang dengan LaTrobe University, serta UKSW Salatiga dengan Sydney University merupakan contoh konkret dalam hal itu. Demikian pula halnya dengan disepakatinya kota kembar, seperti Brisbane dengan Semarang atau Jakarta dengan Tokyo, perlu dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengajaran BIPA.

Peran Indonesia

Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengajaran BIPA, terutama di luar Indonesia, pemerintah Indonesia, melalui koordinasi antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Luar Negeri, perlu segera mengambil langkah-langkah sehubungan dengan hal-hal berikut.

1. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengajaran BIPA di luar Indonesia, antara lain yang berupa buku pelajaran, bahan bacaan, serta alat penunjang pengajaran lainnya seperti surat kabar, majalah, kaset, dan video.
2. Memberikan kemudahan bagi tenaga Indonesia yang akan bertugas sebagai pengajar BIPA di luar Indonesia.
3. Mengupayakan agar di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dibentuk semacam Pusat Kebudayaan Indonesia yang dapat disejajarkan/dibandingkan dengan Centre Culturel Français-nya Perancis, Goethe Institut-nya Jerman, atau Erasmus Huis-nya Belanda (khusus untuk keperluan ini, kalau dianggap perlu, dapat dipertimbangkan kemungkinan melakukan kerja sama dengan kantor perwakilan Malaysia dan Brunei Darussalam di negara yang bersangkutan).
4. Mempertimbangkan pemberian beasiswa kepada calon pengajar BIPA dari luar Indonesia untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi Indonesia sampai tingkat sarjana (S1).

Penutup

Di samping keempat aspek pengajaran BIPA yang telah secara singkat dipaparkan di atas, tentu masih ada aspek-aspek lainnya yang juga perlu dibahas dalam simposium ini. Dari keempat aspek itu sendiri pun tentu masih ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau diberi catatan khusus.

Sekadar contoh, program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan tenaga pengajar BIPA (lihat bagian **Pengajar** pada makalah ini) bukanlah merupakan terminal akhir. Bahkan kepada mereka yang sudah menjadi pengajar BIPA pun perlu pula diberi kesempatan untuk mengikuti semacam penataran, agar ilmu dan metodologi yang dikuasainya tetap dapat dimutakhirkan, sesuai dengan pengalaman yang diperolehnya atau dengan perkembangan terakhir pengajaran BIPA itu sendiri secara umum.

Akhirnya, diharapkan melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman selama simposium ini, para peserta akan dapat menyepakati langkah-langkah tindak lanjut yang cocok untuk membina dan mengembangkan pengajaran BIPA, terutama di kawasan Asia Timur ini.

BAHAN BACAAN

- Abdullah, Taufik. 1996. "Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eks-ternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia." Dalam Latif, Yudi dan Idi Subandy (Ed.): *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Adam, Asvi Warman. "Strategi Pengajaran Bahasa Indonesia di Luar Negeri: Kasus *Langues-O*". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Alieva, Natalia J. "Dasar-dasar Tipologi buat Analisa Bahasa Indonesia sebagai Obyek Pengajaran untuk Penutur Asing". Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, Universitas Indonesia, 28-30 Agustus 1995.
- Alwi, Hasan. 1993. "Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah". Makalah Simposium Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jawa, Kaliurang, 26--27 Juli 1993.
- , "Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing". Makalah Simposium Perkembangan Bahasa Indonesia di Kawasan Timur Jauh, 19--20 Juli 1993, Tokyo.
- , 1993. "Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1993. "Pembinaan Bahasa: Tantangan dan Harapan". Makalah Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya (IKIP Medan, 15-16 Desember 1993).
- , "BIPA: Hari ini dan Esok". Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, 28--30 Agustus 1995, Universitas Indonesia.
- , "Pengajaran BIPA: Upaya Pengembangan". Makalah Simposium Bahasa Indonesia di Asia Timur, 14--17 Desember 1995, Beijing.
- , 1996. "Dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia: Peman-tapan Sarana ~~Pencerdasan~~ ~~Kehidupan~~ Bangsa". Makalah Simposium Raja Ali Haji, 29--31 Oktober 1996, Pulau Penyengat, Riau.

- Alwi, Hasan, Dendy Sugono, dan S.R.H. Sitanggang (Ed.). 1998. *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Atmazaki. "Menggunakan Karya Sastra untuk Bahan Pembelajaran Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Asing". Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei--1 Juni 1996, Padang.
- Bachtiar, Harsja W. 1981. "Bahasa Indonesia and the Indonesian Nation". Dalam Amran Halim (Ed.). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*: 357--376. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Biro Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk 1980*. Jakarta.
- Biro Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- Boediono. "Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Chung Young-Rhim. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing Hankuk, Seoul, Korea". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- , "Keadaan Pengajaran Bahasa Indonesia di Korea". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Collins, James T. "Kemajuan Penelitian Bahasa Indonesia di Amerika Serikat". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Dardjowidjojo, Soenjono. "Peningkatan Peran Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- , "Masalah dalam Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing di Indonesia". Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, Universitas Indonesia, 28-30 Agustus 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Kongres Kebudayaan 1991*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya.
- , 1991. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*.
- , 1993. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1975--1993*.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Djojonegoro, "Pembudayaan Bahasa Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Nasional". Makalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pertemuan dengan Menteri Penerangan dan para Pimpinan Media Massa Cetak dan Elektronik, 9 Maret 1995, di Jakarta.
- Eastman, Carol M. 1991. *Language Planning*. San Francisco: Chandler & Sharp Publishers.
- Edwards, John. 1985. *Language Society and Identity*. Oxford: Blackwell.
- Effendi, S. 2000. "Peningkatan Mutu Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa Indonesia". Dalam Hasan Alwi, Dendy Sugono, dan Abdul Rozak Zaidan (Ed.): 890-901. *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Fasold, Ralph W. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. Oxford: Blackwell.
- , 1990. *Sociolinguistics of Language*. Cambridge: Blackwell.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998*.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1993*.
- Gunarwan, Asim. 1993. "Bahasa Asing sebagai Kendala Pembinaan Bahasa Indonesia". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Halim, Amran (Ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1979. *Pembinaan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1981. "Language, Education and Nation Building". Dalam Amran Halim (Ed.). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*: 329-337. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , "Kesinambungan Dalam Kebijakan Bahasa Nasional". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Hassan, Abdullah (Ed.). 1994. *Languages Planning in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hoed, Benny H. "Kerja Sama Antarpemerintah dan Antarlembaga untuk

- Pengembangan BIPA".** Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, 28-30 Agustus 1995, Universitas Indonesia.
- Holmes, Janet. 1994. *An Introduction to Sociolinguistics*. Cetakan ke-4. London: Longman.
- Iskandar, Maskun dan Atmakusumah Astraatmadja (Ed.). 1995. *Masalah Bahasa dan Nama Geografi dalam Pers Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo.
- Koh Young Hun. "Pengajaran Bahasa Indoensia di Perguruan Tinggi Korea dan Peranannya dalam Kerja Sama antara Dua Negara". Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, Universitas Indonesia, 28-30 Agustus 1995.
- Kong Yuan-Zhi. "Pengajaran Bahasa Indonesia di China dan Latar Belakang Budayanya". Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, Universitas Indonesia, 28-30 Agustus 1995.
- Kratz, E.U. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Negara Inggris". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Kridalaksana, Harimurti. "Peningkatan Kepiawaian Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing". Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, Universitas Indonesia, 28-30 Agustus 1995.
- Kwee, John B. "Bahasa dan Sastra Indonesia di Selandia Baru". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Lauder, Multamia R.M.T. 1999. "Derap Perkembangan Linguistik". Dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono (Ed.): 183--195. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Liang Liji. "Pengajaran dan Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia di Tiongkok". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Maier, H.M.J. "Keadaan dan Perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia di Negeri Belanda". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Moeliono, Anton M. 1981. "Language Royalty Versus Linguistics Diversification". Dalam Amran Halim (Ed.). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*: 339--345. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Moeliono, Anton M. 1994. "Indonesian Language Development and Cultivation". Dalam Abdullah, Hasan (ed). 1994. *Language Planning in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Moeliono, Anton M. dan Soenjono Dardjowidjojo (Ed.). 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhadjir, Lucy Montolalu, Suyati Suwarso (ed.). 1988. *Bahasa Indonesia Tahun 2000*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Noss, Richard B. 1994. "The Unique Context of Language Planning in Southeast Asia". Dalam Abdullah Hassan (Ed.): 1--51. *Language Planning in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nothofer, Bernd. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Republik Federal Jerman". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Nothofer, Bernd. "Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia di Jerman". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Pride, J.B. dan J. Holmes (Ed.). 1972. *Sociolinguistics*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1999. "Rumusan Seminar Politik Bahasa".
- Rosidi, Ajip. 1976. "Pengembangan Bahasa Daerah". Dalam Amran Halim (Ed.): 103--115.
- Salim, Emil. "Membangun Bahasa Pembangunan". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Sato, Masanori. "Satu Tinjauan mengenai Bahan Pengajaran Bahasa Indonesia di Universitas Jepang". Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, Universitas Indonesia, 28-30 Agustus 1995.
- Santa Maria, Luigi. "Tiga Windu Pengajaran bahasa dan Sastra Indonesia di Tanah Air Antonio Pigafetta: Sebuah Survei". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Sarumpaet, J.P. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia". Makalah

Kongres Bahasa Indonesia V (1988).

- Sedyawati, Edi. 1998. "Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional". Dalam Hasan Alwi *et. al.* (Ed.): 52--58.
- Shigeru, Morimura. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Jepang". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Siahaan, Bistok A. "Muatan Budaya dalam materi Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing". Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei--1 Juni 1996, Padang.
- Sihombing, Tetty Simanjuntak. "Pendekatan Lintas Budaya dalam Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing". Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei--1 Juni 1996, Padang.
- Sneddon, James. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Soedjatmoko. 1996. "Bahasa dan Transformasi Bangsa". Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Ed.): 173--194.
- Soemarmo, Marmo. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Amerika Serikat". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V (1988).
- Sudewa, Alex. "Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (Sebagai Pengantar Menghayati Kehidupan Sosial, Budaya, dan Orientasi Nilai Masyarakat Indonesia)". Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei--1 Juni 1996, Padang.
- Suroso. "Kontribusi Orientasi Kontekstual Terhadap Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing (Studi Kasus Pengajaran Bahasa dan Budaya Indonesia untuk Mahasiswa Charles Sturt dan Deakin University)". Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei--1 Juni 1996, Padang.
- Sugino, S. "Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI (1993).
- Teuuw, A. 1994. *Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Pustaka Jaya.

- Wahab, Abdul. 2000. "Perkembangan Kajian Linguistik di Indonesia". Dalam *Linguistik Indonesia*. Tahun 18 Nomor 1:31--49.
- Wolff, John. "Penerapan Penemuan Sociolinguistik dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing". Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei--1 Juni 1996, Padang.



Bidang bahasa dan sastra di Indonesia boleh dikatakan tergolong sebagai bidang ilmu yang peminatnya masih sangat sedikit dan terbatas, baik yang berkenaan dengan peneliti, penulis, maupun pembacanya.

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa persatuan dan bahasa negara kita, terutama yang berkenaan dengan mutu dan tingkat keterampilan masyarakat pemakai serta cakupannya ranah pemakaiannya.

Buku ini berisi tujuh belas tulisan yang membahas pelbagai masalah seputar pemakai dan pemakaian bahasa, mulai dari fungsi politik bahasa, peran bahasa dalam seni dan budaya, pembinaan dan pengembangan bahasa ragam iptek, pengembangan kurikulum bahasa, hingga pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing.